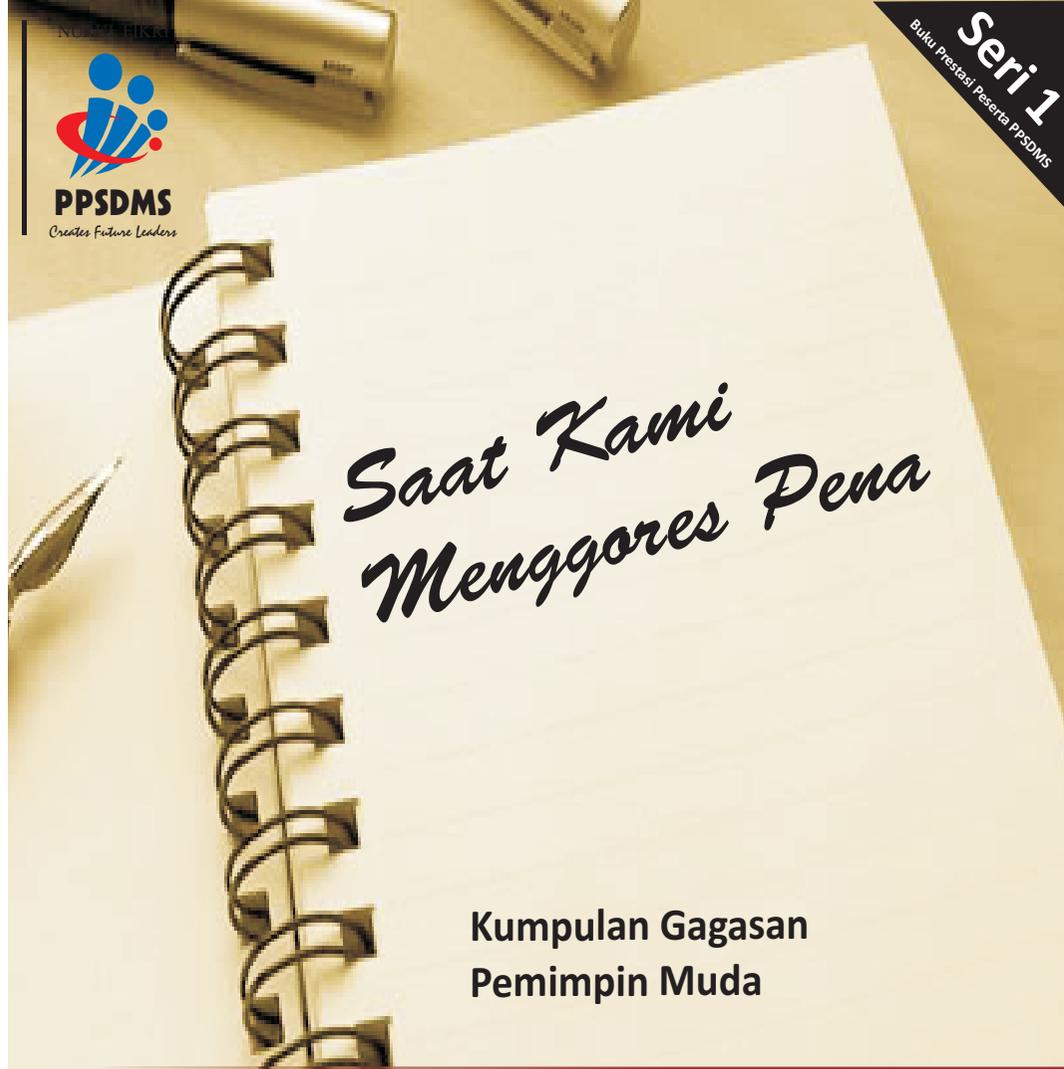




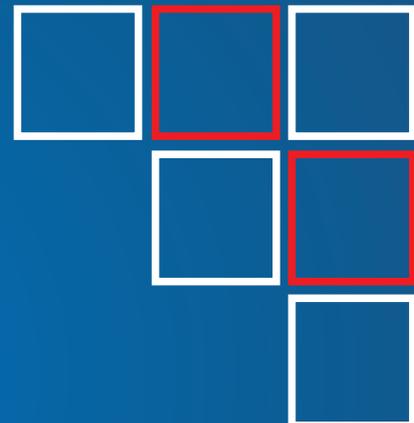
Seri 1
Buku Prestasi Peserta PPSDMS

SAAT KAMI MENGGORES PENNA



*Saat Kami
Menggores Pena*

**Kumpulan Gagasan
Pemimpin Muda**



PPSDMS Nurul Fikri
Gedung Pusat PPSDMS
Jl. Lenteng Agung no. 20 Jakarta Selatan
telp. 021 7888 3828 | fax 021 7888 3829
www.ppsdms.org



Program Pembinaan Sumber Daya Manusia Strategis

Saat Kami Menggores Pena

Kumpulan Gagasan Pemimpin Muda

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Lingkup Hak Cipta

Pasal 2

1. Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pidana

Pasal 72 :

1. Barang siapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

Saat Kami Menggores Pena

Kumpulan Gagasan Pemimpin Muda



PPSDMS Nurul Fikri

Jakarta

MF Media Center
2011

Saat Kami Menggores Pena

Kumpulan Gagasan Pemimpin Muda

© 2011, PPSDMS Nurul Fikri

Tata Letak : Adi Wahyu Adji

Desain Sampul : Herry Wibowo

Editor : Sapto Waluyo

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-undang

Diterbitkan pertama kali oleh :

NF Media Center

Jl. Lenteng Agung Raya No.20 Srengseng Sawah, Jakarta Selatan
12640, Indonesia

Telp: 021 7888 3838; Fax:021 7888 3829

ISBN: 978-602-95647-4-7

Halaman : vi + 156 hlm

Dilarang mengutip, memperbanyak dan menerjemahkan sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin penerbit.

Daftar Isi

Daftar Isi – v

Kata Pengantar – vii

Prolog: Saat Kami Menggores Pena – ix

POLITIK HUKUM DAN PEMERINTAHAN

1. Deligitimasi Hukum di Negara Ini – *Mir'atul Latifah* – 3
2. Legitimasi Indonesia Sebagai Pemimpin ASEAN – *Avina Nadhila Widarsa* – 6
3. Menjadi Mahasiswa Hukum Progresif dan Organik – *Dewa Mahendra* – 8
4. Mahasiswa dan Masa Depan Pemberantasan Korupsi – *Miftahul Husni* – 11
5. Rethinking The Nation: Negarawan Vs Politisi – *Jiwo Damar Anarkie* – 13
6. Banjir dan Macet Jakarta Butuh Langkah Aktif, Berani, dan Berbeda – *Muhammad Irfan Hasan* – 16
7. Kepemimpinan Lokal Mengurangi Kepanikan – *Siti Zahara Triani Putri* – 19
8. Belajar Demokrasi Santai Tapi Serius – *Haniva Az Zahra* – 21

EKONOMI

1. Indonesia Masih “Takut” Hadapi CAFTA – *Aldian Farabi* – 25
2. Melestarikan Pasar Tradisional – *Miftahul Husni* – 28
3. Penanganan Ekonomi Melupakan Etika – *Jiwo Damar Anarkie* – 30
4. Leadership Mahasiswa dalam Socioagropreneur – *Rinaldy Ardana Harahap* – 32
5. Membangun Kompetisi Lewat Kewirausahaan – *Muhammad Irfan Hasan* – 34
6. ‘Brownish’ Brownies Mini Stylish Berbasis Tepung Bekatul Padi – *Ahmadun* – 36
7. Student Today, Entrepreneur Also: Sebuah Paradigma Pemuda Globalisasi Tingkat Ketiga – *Ibnu Abdul Aziz* – 39
8. Menciptakan Surga Pariwisata dari Sabang hingga Merauke – *Noviandri Nurlaili K.* – 43

SOSIAL BUDAYA

1. Membangun Kerukunan Antarumat Beragama – *Abdullah Kholifah* – 49
2. Pancasila Education In The Nation's Diversity – *Asep Sarifudin* – 52
3. Pemuda dalam Persaingan Global – *Dewa Mahendra* – 55
4. Jurnalisme Kemanusiaan sebagai Pengatur Pola Pikir Bangsa – *Gugi Yogaswara* – 57
5. Masihkah Ada Toleransi Beragama di Negeri Ini? – *Novan Anugrah Prasetyo* – 61
6. BlackBerry dan Anak Muda Indonesia – *Haniva Az Zahra* – 63
7. Minimalisir Dampak Bencana – *Citra Amaliyah* - 65
8. Mahasiswa Apatitis Tidak Semuanya Apatitis – *Wahyu Awaludin* – 67

PEREMPUAN

1. Bagai Sang Surya, Ibu Menerangi Dunia – *Aisyah Bidara* – 73
2. Refleksi Hari Ibu: Titik Tolak Menuju Indonesia Bermartabat – *Neti Triwinanti* – 75
3. Kontradiksi Antara Peran dan Kesehatan Ibu – *Citra Amaliyah* – 77
4. Era Digital Membuat Perempuan Berani “Bicara” – *Haniva Az Zahra* – 79
5. Kisah Inspiratif ‘Ibu Pertiwi’ – *Nisa Yulianti Suprahman* – 82
6. Gerakan Baru Pemberdayaan Perempuan – *Noviandri Nurlaili K.* – 84
7. Satu Lagi Potensi Perempuan – *Haniva Az Zahra* – 87
8. Setiap Hari adalah Hari Ibu – *Ridwan Kharis* – 89

PENDIDIKAN

1. Mimpi Ki Hajar Dewantara – *Afra Afifah* – 93
2. Hitam Putih UN - *Fuad Mushthafa B.* – 95
3. Menggugah Budaya Pendidikan Indonesia – *Giovanni F. van Empel* – 97
4. Meneropong Wajah Pendidikan Indonesia – *Muhammad Rifqi Abidin* – 99
5. Wajah Pendidikan Indonesia: Membeli Jendela Dunia – *Rima Febrina* – 101
6. Model Integrasi Pendidikan Pondok Pesantren dan Konsep Kepemimpinan Profetik – *Septian Suhandono* – 104
7. Guru dan Semangat Mendidik – *Giovanni F. Van Empel* – 107
8. Pendidikan Karakter untuk Calon Pemimpin – *Haniva Az Zahra* – 109

KESEHATAN

1. Ketika Rokok Menjadi Makanan Pokok – *Agung Supriyadi* – 112
2. Motrafood (Modern Traditional Food) Penggalan dan Optimalisasi Pangan Lokal – *Ary Kristianto* – 114
3. Menyejahterakan Kesehatan Indonesia – *Giovanni F. Van Empel* – 117
4. Perlunya Revolusi Sanitasi Indonesia – *Muhammad Irfan Hasan* – 119
5. Kesenjangan Status Kesehatan, Tantangan Indonesia 2011 – *Nisa Yulianti Suprahman* – 122
6. Rapuhnya Ketahanan Pangan Negriku – *Rinaldy Ardana Harahap* – 125
7. Mitos Industri Obat Murah – *Giovanni F. Van Empel* – 127
8. Meningkatkan Peran Farmasis Indonesia demi Mengisi Kemerdekaan – *Muhammad Irfan Hasan* – 129

SAINS TEKNOLOGI DAN LINGKUNGAN

1. Etnobiologi sebagai Modal Dasar Kebangkitan Bangsa – *Aditya Kuspriyanga* – 135
2. Hutan adalah Otot Peradaban Bangsa – *Awalludin Ramdhan* – 138
3. Peneliti Indonesia: Antara Idealisme dan Kebutuhan – *Enung Azizah Mulyawati* – 141
4. Tantangan Bidang Sains Indonesia – *Faldo Maldini* – 143
5. Isu Iklim dan Politik Global – *Muh. Dimas Arifin* – 145
6. Potensi Pemuda dalam Menekan Laju Kenaikan Suhu Bumi – *Rima Febrina* – 148
7. Peran Strategis Pemuda terhadap Perubahan Iklim – *Nisa Yulianti Suprahman* – 151
8. Analisis Tren Kemasan Produk AMDK untuk Indonesia Hijau 2011 – *Rima Febrina* – 153

Profil Kontributor Pilihan – 156

Profil PPSDMS Nurul Fikri – 161

Kata Pengantar

Assalaamu'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh

Alhamdulillahirobbil'alamiin, tidak henti ucapan syukur kepada Allah yang Maha Agung, atas segala karunia dan kemudahan yang selalu dicurahkan-Nya kepada kita semua. Shalawat dan salam pun tak lupa kita haturkan bagi pemimpin sekaligus teladan terbaik umat ini, Rasulullah Muhammad SAW beserta seluruh keluarganya.

Salah satu karunia Allah SWT yang begitu berarti dirasakan oleh keluarga besar PPSDMS Nurul Fikri adalah keberlangsungan program pembinaan ini, yang saat ini memasuki satu dekade. Tak terasa perjalanan panjang itu. Dengan tekad yang kuat serta dukungan para pembina dan mitra, kami mampu melewati naik dan turun serta lika-liku perjalanan panjang ini. Melewati berbagai ujian juga tantangan yang membuat institusi ini semakin dewasa dan tegar, insya Allah.

Sebagai institusi yang mencanangkan pembinaan kepemimpinan, maka sudah selayaknya PPSDMS Nurul Fikri memfasilitasi seluruh aspek yang mendukung terwujudnya karakter dan skill of leadership tersebut. Salah satunya adalah menulis. Seorang pemimpin perlu menuangkan buah pikirnya ke dalam tulisan, sehingga dapat dibaca, ditelaah dan direalisasikan tidak hanya oleh dirinya sendiri, tapi juga masyarakat sekitarnya.

Oleh karena itulah, PPSDMS Nurul Fikri mendorong pesertanya untuk berlatih menulis dan menyebarluaskan ide pemikirannya kepada khalayak luas. Beberapa program yang digulirkan untuk mewujudkan ini semua adalah Training Jurnalistik, Studi Pustaka, serta Sharing dengan para Alumni seputar pengalaman mereka dalam menulis. Setiap bulannya peserta diarahkan untuk menuangkan pandangan dan gagasannya terhadap kondisi yang ada di sekitar mereka, lalu mengirimkannya ke media.

Alhamdulillah, sejak pertama dibina di bulan Agustus 2010 lalu, perlahan-lahan karya mereka muncul satu per satu. Bahkan di antara mereka ada yang seolah-olah menemukan bakat yang terpendam selama ini. Saat ini PPSDMS memasuki angkatan ke V dan ternyata puluhan sudah tulisan peserta yang bermunculan di berbagai media massa cetak maupun on line.

Ini adalah suatu yang sudah seharusnya disyukuri bersama. Para calon pemimpin masa depan yang menggoreskan penanya untuk menuangkan ide segar dan brilian, karena dilandasi keinginan untuk melihat bangsanya menjadi lebih baik dan bermartabat di masa depan. Dua

puluh atau tiga puluh tahun lagi, kami berharap apa yang mereka tulis hari ini bisa terealisasikan di masa depan dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh entitas negeri ini. Amin Ya Rabbal Alamin.

Karena itulah, sebagai salah satu karya dari PPSDMS Nurul Fikri, kami merangkum buah pikiran para calon pemimpin masa depan itu menjadi buku yang saat ini ada di hadapan kita semua. Semoga upaya kecil ini memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik dan bermartabat.

Wassalaamu'alaikum warahmatullahi wabakaatuh

Drs. Musholli

Direktur PPSDMS Nurul Fikri,

Prolog: Saat Kami Menggores Pena

Menulis adalah mencatatkan sejarah dan peradaban. Para ahli sejarah memberikan tanda keberadaan (eksistensi) dari suatu peradaban dilihat dari aktivitas tulis-menulis yang dihasilkannya. Maka dengan itu kita mengenal peradaban-peradaban tua seperti di Mesir, Cina, Romawi, Yunani dan lain-lain.

Menulis juga mengabadikan nama dan karya manusia. Mudah saja, orang-orang yang terkenal di masa lampau dikenal karena karya tulisannya. Apa yang kita kenal dari seorang Socrates misalnya jika dia tidak pernah menuangkan ide pemikirannya dalam bentuk tulisan. Demikian pula jika seorang Al Ghazali, Ibnu Khaldun, Ibnu Sina, Al Khawarizmi, Ibnu Taimiyah dan ulama besar lainnya hanya sekedar berkata-kata sepanjang hari, tanpa ada selembaar tulisan yang dibuatnya, niscaya kita tak pernah mengenal mereka apalagi membicarakan nama dan karyanya hari ini.

Rangkaian huruf dan kata yang bersatu membentuk kalimat, lalu disulam dengan pemilihan kosa kata dan alur argumentasi yang bernas menghasilkan sebuah tulisan layaknya sebuah lukisan yang indah lagi sedap dipandang mata. Bahkan lebih dari itu, tulisan dapat menggerakkan pembacanya, membangunkannya dari tidur panjang dan menyadarkannya untuk senantiasa berada di garis terdepan kemuliaan hidup. Bukalah kembali sebuah pledoi "Indonesia Menggugat", karya pemuda berusia 24 tahun saat ia divonis 4 tahun penjara oleh pemerintah Hindia Belanda. Dalam waktu 15 tahun kemudian, ternyata dialah Sukarno, yang berdiri tegak membacakan proklamasi kemerdekaan bangsa ini, setelah 350 tahun terlelap dalam penjajahan.

Maka, ketika PPSDMS bercita-cita melahirkan pemimpin-pemimpin masa depan, adalah suatu hal yang tidak dapat ditinggalkan bahwa kader-kader yang dihasilkannya harus memiliki kebiasaan dan kemampuan menulis yang berbobot sebagai penopang kualitas kepemimpinannya. Untuk itulah serangkaian program digelar guna memuluskan target khusus ini. Program Training Jurnalistik setiap dua bulan sekali dan tugas membuat opini lalu dikirim ke media setiap bulannya adalah langkah nyata yang telah berjalan selama 9 tahun lembaga ini berdiri.

Menulis membutuhkan keahlian tersendiri sehingga buahnya dapat dinikmati pembacanya. Keahlian itu tentu saja tidak datang tiba-tiba melainkan harus dilatih dan dikembangkan setiap waktu. Setiap orang bahkan para mahasiswa yang notabene bergumul sehari-hari dengan bacaan dan tulisan, idealnya dapat menjadi penulis yang handal. Dan itu semua berawal ketika mereka akhirnya mau menggoreskan pena.

Tidak sedikit di antara peserta yang awalnya tidak memiliki kebiasaan apalagi keahlian menulis. Namun melalui serangkaian program yang PPSDMS buat, dan saat mereka menggoreskan pena, terciptalah lebih dari 150 tulisan yang dihasilkan sepanjang 1 tahun masa pembinaan PPSDMS angkatan V. Yang kami maksud di sini adalah tulisan yang dibuat oleh peserta PPSDMS lalu mendapatkan apresiasi publik berupa pemunculannya di berbagai media cetak dan *on line* baik lokal regional maupun nasional bahkan internasional.

Bukan hanya sekedar rangkaian huruf dan kata lalu bersusun menjadi kalimat dan paragraf. Tulisan yang ada di buku ini mencerminkan pula asa dan gelora yang membumbung dari kumpulan anak bangsa yang kelak menjadi pemimpin masa depan. Mereka yang hari ini melihat segudang problema negrinya, namun juga bersiap untuk nantinya mengurai lalu merenovasi dan menghasilkan bangunan Indonesia lebih baik dan bermartabat yang menjadi mimpi setiap tidurnya hari ini.

Kami memilih 56 tulisan terbaik yang layak dimasukkan dalam buku ini. Kami menyajikannya dalam 7 kelompok kajian yaitu: politik hukum dan pemerintahan, ekonomi, sosial budaya, perempuan, pendidikan, kesehatan dan sains lingkungan. Berbagai gaya penulisan dapat dilihat sendiri pada masing-masing karya. Ada yang dalam dalam mencerna masalah, memberikan analisis bermodal pengetahuannya di bangku kuliah, hingga tak lupa pula ada yang memberikan alternatif solusi sebagai jalan keluar dari masalah tersebut.

Selain karya tulisan dalam bentuk artikel/feature seperti dalam buku ini, ada pula karya tulisan Peserta PPSDMS dalam bentuk lainnya yaitu karya ilmiah. Bentuk ini sengaja tidak dimasukkan ke karena jumlah halaman yang jauh lebih banyak dan sangat spesifik pembahasannya. Walaupun sebenarnya beberapa dari karya ilmiah tersebut justru lebih memiliki nilai kompetitif karena telah lolos seleksi untuk dipresentasikan pada berbagai ajang kompetisi karya tulis ilmiah nasional dan internasional.

Buku ini diberi *tag-line* tambahan yaitu: "Seri-1 Prestasi Peserta PPSDMS". Karena berikutnya kami akan berjuang untuk menghasilkan buku-buku karya peserta dengan tema yang tidak kalah menariknya. Kisah keberhasilan peserta berangkat untuk berkompetisi di ajang Internasional dengan berangkat ke luar negeri, kisah pernak-pernik saat mereka menjadi pemimpin organisasi serta kisah-kisah unik dan menginspirasi saat mereka berada di Asrama PPSDMS, akan menjadi ruh dalam buku seri prestasi peserta PPSDMS selanjutnya.

Semoga karya ini dapat menjadi batu bata yang kokoh untuk menegakkan bangunan Indonesia lebih baik dan bermartabat

Adi Wahyu Adji

Manajer Program PPSDMS Nurul Fikri



**POLITIK,
HUKUM DAN
PEMERINTAHAN**



Deligitimasi Hukum di Negara Ini ¹

Oleh: Mir'atul Latifah *)



"Negara Indonesia adalah Negara Hukum"

Begitulah bunyi Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 merupakan dasar konstitusional bahwa negara Indonesia berdasarkan hukum sehingga negara merupakan alat untuk penegakan hukum. Indonesia sebagai negara hukum harus dibangun dengan mengembangkan perangkat hukum itu sendiri sebagai satu sistem yang fungsional dan berkeadilan. Sistem tersebut kemudian dikembangkan dengan menata suprastruktur dan infrastruktur kelembagaan politik, ekonomi, dan sosial yang tertib dan teratur, serta dibina dengan membangun budaya dan kesadaran hukum yang rasional dan impersonal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Lembaga hukum Indonesia secara gradual terdeligitimasi oleh banyaknya penyelewengan hukum. Kasus Century, mafia hukum dan isu-isu hukum lainnya banyak menjadi sorotan publik yang menodai penegak hukum hingga membentuk opini publik tentang kegagalan penegak hukum dalam mewujudkan keadilan.

Konsep penegakan hukum dan penegakan keadilan menjadi dua hal yang berbeda sebab parameter keadilan dan hukum dapat berbeda di mata penegak hukum dan masyarakat. Penegakan hukum rigid mengikuti peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum yang mengatur secara imperatif suatu pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Contoh kasus Ibu Minah yang mencuri buah kakao yang telah terbukti secara materiil memenuhi segala unsur delik yang didakwakan dapat diputus bersalah dan dipidana. Hal ini karena hukum yang mengatur delik pidana tersebut bersifat limitatif dan dari kasus tersebut sekilas terlihat keadilan tidak memihak masyarakat kecil.

¹ Tulisan dimuat di Okezone.com kolom Opini Kampus, 4 Januari 2011

Tanda tanya besar kemudian muncul ketika Gayus yang menggelapkan pajak Rp 270 juta –yang kemudian terungkap Rp 24 Miliar—diputus bebas karena tidak terbukti secara materiil memenuhi unsur-unsur delik pidana yang didakwakan berdasarkan pertimbangan hakim. Kasus Gayus menjadi bukti bahwa hukum telah dijadikan komoditi bagi para oknum yang selayaknya menegakkan hukum.

Realitas dalam penegakan hukum seringkali jauh dari tataran akademis ilmu hukum akibat penyelewengan oknum-oknum tertentu. Namun secara konsep, mengacu pada *International Framework for Court Excellence (IFCE)*, terdapat tiga bagian utama yang memerlukan peningkatan dalam lembaga peradilan, yaitu :

- (1) *Court management and leadership* sebagai pengendali utama;
- (2) *Court policies and Human, material and financial resources*, serta *Court proceedings* sebagai satu kesatuan sistem; dan
- (3) *Client needs and satisfaction*, dan *Affordable and accessible court services*, serta *Public trust and confidence* sebagai keluaran yang akan dihasilkan.

Dalam sebuah definisi, pengadilan adalah lembaga kehakiman yang menjamin tegaknya keadilan melalui penerapan undang-undang dan kitab undang-undang (*wet en wetboeken*). Sebagai tempat mencari keputusan hukum demi keadilan, lembaga peradilan sudah seharusnya menjunjung tinggi independensi dan prinsip ketidakberpihakan. Selain itu, terdapat enam prinsip penting yang harus dijadikan pegangan bagi para hakim di Indonesia yang termuat dalam The Bangalore Principles :

- a. Kemerdekaan dalam mengambil keputusan (*Independence*)
- b. Ketidakberpihakan (*Impartiality*)
- c. Integritas (*Integrity*)
- d. Kepantasan dan kesopanan (*Propriety*)
- e. Kesetaraan (*Equality*)
- f. Kecakapan dan keseksamaan (*Competence and diligence*)

Namun peran penegakan hukum harus didukung dengan penguatan lembaga-lembaga hukum lainnya dalam satu kesatuan sistem. Penguatan KPK, Kejaksaan dan Kepolisian menjadi agenda yang urgent bagi penegakan hukum di Indonesia. Peran ketiganya bersinergi dalam mendukung *law enforcement* di Indonesia. Tentu kasus Cicak versus Buaya telah cukup membuat bangsa Indonesia malu lantaran antar lembaga penegak hukum saling injak dan sikut-sikutan.

Melihat *track record* penegakan hukum yang belum beres oleh aparat penegak hukum, selayaknya elemen negara—dalam hal ini pemerintah dan lembaga legislatif—bersinergi menegakkan hukum dan membersihkan sistem yang 'kotor' akibat ulah oknum yang mengkomodikasi keadilan dengan atas nama hukum.

**) Peserta PPSDMS Angkatan V Regional 1 Jakarta Putri, mahasiswa Fakultas Hukum UI 2009.*

Legitimasi Indonesia Sebagai Pemimpin ASEAN²

Oleh: Avina Nadhila Widarsa *)



Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN yang ke-18 telah berakhir beberapa hari yang lalu. Keberhasilan Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggara patut diacungi jempol karena selama berlangsungnya konferensi tidak ada hambatan berarti khususnya terkait masalah keamanan.

Namun, kepemimpinan Indonesia selama tujuh bulan ke depan dalam lingkup organisasi regional di kawasan Asia Tenggara tersebut sepertinya akan penuh dengan tantangan yang dapat berdampak pada keutuhan ASEAN dan reputasi Indonesia di dunia internasional. Salah satu tantangan besar yang harus dihadapi Indonesia dalam kapasitasnya sebagai pemimpin ASEAN adalah tantangan legitimasi Indonesia sebagai ketua ASEAN 2011. Tantangan tersebut terlihat jelas dengan tidak hadirnya Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Long dalam KTT ASEAN tanggal 6–8 Mei 2011 lalu di Jakarta.

Singapura sebagai salah satu negara termaju di kawasan dengan GDP per kapita di atas USD 30.000 terkesan “menguji” kepemimpinan Indonesia dalam ASEAN dengan tidak menghadirkan perdana menterinya. Alasan ketidakhadiran Perdana Menteri Singapura tersebut karena Singapura sedang mengadakan pemilihan umum. Alasan ini menurut penulis tidak cukup signifikan untuk dijadikan sebagai justifikasi ketidakhadiran pemimpin negara dalam sebuah konferensi tingkat tinggi.

Suatu negara yang menjadi anggota sebuah organisasi regional seharusnya memiliki komitmen. Ketidakhadiran tersebut bisa diartikan Singapura tidak menganggap penting ASEAN atau bisa jadi tidak menganggap Indonesia layak sebagai Ketua ASEAN. Selama ini hubungan Indonesia-Singapura memang diwarnai dengan persaingan dan banyak perjanjian yang tidak berakhir dengan kata sepakat. Contohnya saja, kita dapat melihat betapa Singapura iri kepada Indonesia yang menjadi salah satu anggota G-20, padahal Singapura jelas-jelas jauh lebih kaya

²Tulisan dimuat di Harian Seputar Indonesia kolom Suara Mahasiswa, 16 Mei 2011.

secara GDP. Legitimasi kepemimpinan Indonesia dalam ASEAN juga akan diuji dengan konflik perbatasan Thailand-Kamboja.

Indonesia yang selama ini dikenal sebagai juru damai dalam berbagai konflik di ASEAN harus kembali berurusan dengan permasalahan perbatasan yang terjadi di Thailand-Kamboja. Jika Indonesia gagal menyelesaikan konflik atau paling tidak berkontribusi untuk menurunkan tegangan di Thailand-Kamboja, tentu saja reputasi Indonesia sebagai pemimpin ASEAN akan dipertanyakan di mata dunia internasional.

Oleh sebab itu, Pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Luar Negeri, wajib membuat suatu terobosan guna meningkatkan legitimasi Indonesia sebagai pemimpin ASEAN 2011

**) Peserta PPSDMS Angkatan V Regional 1 Jakarta Putri, mahasiswa Departemen Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UI 2008.*

Menjadi Mahasiswa Hukum (yang) Progresif dan Organik³

Oleh: Dewa Mahendra*)



Manusia, khususnya Penegak hukum selaku aktor penting dan utama di belakang kehidupan hukum tidak hanya dituntut mampu menciptakan dan menjalankan hukum (*making the law*), tetapi juga keberanian mematahkan dan merobohkannya (*breaking the law*) manakala hukum tidak sanggup menghadirkan roh dan substansi keberadaannya yakni menciptakan keharmonisan, kedamaian, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat (Satjipto Raharjo).

Menjadi mahasiswa adalah sebuah manifesto dunia pendidikan. Namun yang lebih penting adalah bagaimana seharusnya mahasiswa khususnya mahasiswa fakultas hukum menjadi seorang yang mampu berpikir secara Intelektual dan menjadikan dirinya sebagai Cendekiawan diantara yang lainnya. Dalam artikel kali ini saya mencoba menawarkan kepada rekan mahasiswa hukum untuk merefleksikan diri menjadi mahasiswa Organik namun juga bersifat Progresif.

Gramsci memahami peran intelektual sebagai bagian yang terintegrasi di dalam masyarakat. Bahkan ia tidak dapat dipisahkan karena telah menjadi bagian dari materialitas konkret berbagai problematika dan dialektika yang membentuk masyarakat. Inilah intelektual organik. Yaitu mereka yang tidak tinggal diam ketika melihat berbagai kondisi di masyarakat yang begitu meresahkan. Mereka adalah orang-orang yang mampu menginisiasi, mengorganisasi masyarakat atau kaum mustadafin yang termarjinalkan.

Untuk bisa menginisiasi, Wisnu dalam Mahasiswa Intelektual Organik, mengatakan tentu kita harus belajar langsung dari masyarakat. Belajar langsung dari masyarakat adalah memberdayakan masyarakat yang artinya kita tidak membedakan antara teori dan praksis.

³Tulisan dimuat di MediaIndonesia.com kolom Citizen Journalism, 19 Mei 2011.

Dalam perspektif marxian, inilah yang disebut sebagai praksis emansipatoris. Jika program pemberdayaan pemerintah tersebut kebanyakan berorientasi pada logika ekonomi, kita cukup melakukan *community empowerment* dengan berorientasi pada logika sosial. Artinya, kita sedang melakukan sebuah *transfer of knowledge*, bukan *transfer of money* atau yang lain. Dalam wilayah praksis, hal ini tentu sudah saya lakukan bersama teman satu asrama.

Transfer of knowledge ini memang akan jauh lebih bermanfaat bagi masyarakat, Pemberdayaan memang akan berhasil apabila masyarakat mampu mengubah kondisi masa depan melalui tindakan dan pengambilan keputusan oleh masyarakat sendiri. Dengan kata lain, masyarakat tidak bergantung kepada pemerintah atau siapapun. Artinya, *transfer of knowledge* bisa diartikan sebagai sebuah upaya membangun power yang dimiliki oleh masyarakat.

Terakhir, melakukan pemberdayaan masyarakat tidak perlu kita lakukan dengan muluk-muluk. Sekali lagi perlu digaris bawahi bahwa pemberdayaan yang kita lakukan jauh berbeda dengan pemberdayaan yang dilakukan oleh LSM-LSM, apalagi negara. Sebagai seorang pemimpin muda, yang cukup kita lakukan saat ini baru melakukan pemberdayaan berbasis komunitas. Tentu bisa kita lakukan dengan hal yang cukup sederhana seperti di lingkungan kita. Hal ini semata-mata diikhtiarkan sebagai sarana untuk melatih kepekaan sosial, demi Indonesia yang lebih baik dan bermartabat.

Menurut Satjipto Raharjo Keterpurukan, karut marut dan lain lain potret negatif, yang sering dialamatkan kepada hukum di negeri ini, justru menjadikan Indonesia sebagai laboratorium hukum dan masyarakat *par excellence*. Disini tampil pergulatan antara hukum dan aneka kekuatan lain masyarakat. Kita sebagai Mahasiswa Hukum didorong untuk mengajukan berbagai pertanyaan kritis, tajam, dan mendasar mengenai tempat dan bekerjanya hukum dalam masyarakat. Kita berbicara tentang keadaan luar biasa, suasana darurat dan lainnya, tentu saja itu membutuhkan respons aksi luar biasa dan progresif. jika kita tetap menjalankan hukum secara "biasa-biasa", itu bukan jawaban tepat untuk menghadapi keluarbiasaan itu.

Sebagai Negara Hukum sebagaimana terdapat dalam Konstitusi yaitu pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia membutuhkan para profesional (*professionals*) hukum untuk menggerakkan roda negara hukum tersebut. Mereka ini adalah para hakim, jaksa, advokat dan di bidang-bidang lain, seperti pemerintahan dan bisnis. Mereka muncul sebagai kelompok yang unik, dan mempunyai kekhasan dalam hukum. Salah satu hasil dari pembelajaran profesional tersebut adalah terciptanya suatu pola dan cara berpikir tertentu (*mindset*) para profesional dibidang hukum.

Satjipto Raharjo (2010) mengatakan para mahasiswa hukum bertahun-tahun belajar hukum di sekolah-sekolah hukum, para mahasiswa mengalami, apa yang disebut “pencucian otak”. Karena menurut beliau proses pendidikan hukum tersebut memasuki dunia baru yang berbeda sekali dengan sebelumnya. Dunia baru mereka sudah menjadi proyeksi dari pikiran-pikiran, konsep-konsep, sebagai hasil pembelajaran selama bertahun-tahun tersebut. Dunia dan kehidupan sudah berubah menjadi abstrak.

Tentunya para profesional ini melihat dunia dengan pikirannya sendiri yang idiosinkratis. Mereka tidak lagi melihat dunia secara alami, melainkan sebagai skema-skema yang abstrak. Oleh mahasiswa hukum, manusia dilihat tidak lagi secara utuh namun, hanya dipandang sebagai subjek hukum yang memikul hak dan kewajiban

**) Peserta PPSDMS Angkatan V Regional 3 Yogyakarta, mahasiswa Fakultas Hukum UGM 2009.*

Mahasiswa dan Masa Depan Pemberantasan Korupsi⁴

Oleh: Miftahul Husni*)



EWAKIL Ketua KPK, Chandra M. Hamzah menyatakan dalam suatu pelatihan antikorupsi, "Banyak masalah negeri ini yang bermuara pada korupsi, bahkan hal-hal seperti kemacetan lalu lintas." Pernyataan beliau ini memang benar adanya. Pada kesempatan yang sama beliau menyebutkan bahwa biaya yang dihabiskan negara untuk mengatasi kemacetan adalah Rp 35 Triliun per tahun. Sebuah harga yang seharusnya menuntaskan masalah kemacetan negeri ini.

Telah habis energi bangsa ini, jika pembicaraan mengarah pada topik korupsi. Korupsi sudah tumbuh dan mengakar di berbagai tataran kehidupan bangsa. Aktor-aktornya sudah menjamah akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), hingga kepala sekolah dan kepala desa. Kasus-kasus di kalangan pemerintahan sudah tak perlu disebut lagi. Uang rakyat di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dikorup lewat berbagai cara seperti mark up, proyek fiktif, penggelapan, suap-menyuap, gratifikasi, dan perbuatan curang sehingga merugikan keuangan negara.

Di tengah kegersangan yang timbul akibat tindak pidana korupsi, lahirlah institusi KPK yang mencoba menantang arus keburukan di negeri ini. Sejak pertama berdirinya, KPK telah menuai berbagai prestasi. KPK menyebutkan bahwa antara tahun 2007 dan 2010 kekayaan negara yang berhasil diselamatkan adalah sebanyak Rp 3.219 Milyar. Secara sosial pun, di tengah masyarakat telah muncul semangat untuk memberantas korupsi terbukti dengan dicanangkannya zona integritas antikorupsi di beberapa kota seperti kota Medan, Palembang, dan Bandung.

Meskipun demikian, masalah korupsi hingga hari ini masih jauh dari kata tuntas. Perlu kontribusi dari berbagai pihak untuk mendukung usaha KPK. Walau bagaimanapun, KPK hanyalah sebuah

⁴Tulisan dimuat di MediaIndonesia.com kolom CitizenJournalism, 13 Mei 2011.

institusi yang berada di bawah aturan pemerintah. Posisi ini membuat KPK cenderung mudah dilemahkan, seperti isu yang sedang santer di masyarakat akhir-akhir ini. Di sinilah peran dari seluruh anggota masyarakat diharapkan, tak terkecuali dari kalangan mahasiswa.

Mahasiswa adalah agen perubahan Indonesia menuju arah sejati vektor perubahan, yaitu ke arah yang lebih baik. Disebabkan posisinya yang strategis di tengah-tengah masyarakat Indonesia, mahasiswa adalah sebuah elemen yang bisa mewakili aspirasi masyarakat. Suara mahasiswa adalah suara masyarakat dan bahasanya adalah bahasa masyarakat. Dengan kelebihan ini, mahasiswa dapat mengambil peran dalam pemberantasan korupsi dengan cara memunculkan gerakan-gerakan antikorupsi di berbagai daerah di manapun ia berada.

Lebih jauh lagi, mahasiswa dapat menjadi *watchdog* lembaga-lembaga negara dan penegak hukum. Berlakunya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) no. 14 tahun 2008 sejak tanggal 30 April tahun 2010 lalu memungkinkan hal ini. UU KIP memberikan hak pada masyarakat untuk meminta informasi apapun pada lembaga pemerintah dan lembaga lain yang mendapatkan dana dari APBN melalui hak publik atas informasi. Ini merupakan sebuah peluang baru dalam pemberantasan korupsi.

Tindak pidana korupsi tidak akan dapat diberantas jika tidak mendapat sokongan dari setiap bagian negara Indonesia. Negara yang bersih bebas korupsi hanya akan sebatas khayalan jika tidak ada tindakan nyata. Mari bergerak sekarang juga demi masa depan Indonesia yang lebih baik dan bermartabat.

**) Peserta PPSDMS Angkatan V Regional 1 Jakarta Putri, mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer UI 2008*

Rethinking The Nation: Negarawan Vs Politisi⁵

Oleh: Jiwo Damar Anarkie *)



"Jadilah negarawan, jangan jadi politisi"

Begitulah kata salah seorang ahli politik termasyhur di negeri ini. Negarawan dan politisi menurut sebagian besar awam tidaklah berbeda, sama-sama terjun di dunia politik. Paling yang membedakannya hanyalah pada pemilihan kosakata saja antara negarawan dan politisi yang masing-masing identik dengan namanya politik. Ya tentunya pendapat ini tidak dapat dipermasalahkan ketika banyak dari warga negara kita hanya menjadi penduduk saja bukan warga negara.

Secara substansial, banyak indikator yang menunjukkan perbedaan antara negarawan dan politisi. Saya membuat setidaknya ada tiga indikator di dalamnya yaitu kepentingan, ideologi, dan pemikiran.

Kepentingan seorang politisi cenderung pragmatis, hanya mementingkan kepentingan diri mereka dan kelompoknya. Hal inilah yang sekarang ini terjadi, contoh ketika kongres sebuah partai dimana para politisinya berpidato lantang atas nama kepentingan rakyat. Saya berani jamin, mereka pasti memiliki tujuan-tujuan pragmatis demi kepentingan mereka.

Lain halnya dengan kepentingan seorang negarawan dimana ketika mereka lebih mengutamakan kepentingan masyarakat luas dari pada kepentingan pribadi dan golongan. Dengan istilah lain, negarawan adalah Rahmatan lil Alamin, juru selamat atau istilah lainnya yang berarti cahaya untuk semua. Mereka hadir bukan hanya memimpin masyarakat saja melainkan lebih dari itu, mereka membina dan dekat dengan masyarakatnya. Inilah yang membuat mereka menjadi sangat kharismatik bagi rakyatnya.

Indikator kedua adalah ideologi. Ideologi bagi seorang dengan politisi tak ubahnya pisau bermata dua, yang mudah diganti-ganti dan diubah-ubah. Mereka cenderung memiliki ideologi yang tidak mendarah daging dalam dirinya. Ketika mereka bertemu dengan konstelasi

⁵ Tulisan dimuat di Detik.com kolom Opini, 26 Agustus 2010.

politik yang ada dan mengharuskan mereka mengubah ideologi walaupun masalah yang ada tidaklah terlalu substansial. Mereka dengan mudahnya mengubah pandangan dan ideologi mereka untuk mendapat keuntungan pribadi dan kelompoknya.

Pun lain halnya dengan negarawan dimana memosisikan ideologi menjadi sangat penting ketika mereka bekerja untuk negara dan rakyatnya. Mereka senantiasa menjadi seorang idealis yang tidak terganggu dengan konstelasi-konstelasi yang mereka hadapi. Dengan kata lain, mereka akan mempertahankan ideologi mereka dalam keadaan apapun meskipun nyawa taruhannya. Tetapi adakalanya ketika mereka harus mengalah dengan keadaan yang ada. Keadaan disini adalah ketika mereka dihadapkan dengan permasalahan yang menyangkut kepentingan rakyat. Hal ini pernah terjadi ketika para *Founding Fathers* kita mengalah untuk tidak memaksakan Piagam Jakarta demi menjaga keutuhan bangsa. Inilah bentuk kearifan ideologis yang pada akhirnya menyelamatkan keutuhan bangsa kita. Mengalah untuk kemaslahatan bersama.

Pemikiran, inilah indikator terakhir yang menurut saya dapat menilai apakah mereka politisi atau negarawan. Saya memiliki keyakinan bahwa seorang politis tak ubahnya dengan orang bodoh yang bunuh diri (walaupun banyak gelar dan pangkat yang dimilikinya). Mereka memiliki pemikiran yang pendek atau bahkan sesaat, bukan memiliki pemikiran yang visioner dan berjangka panjang. Lagi-lagi adalah kepentingan pragmatis mereka yang menjadikan mereka tak ubahnya sebagai orang bodoh. Sedangkan seorang negarawan, mereka memiliki pemikiran visioner dan berjangka panjang, ditambah dengan keahlian mereka dalam mengelola dengan cermat negara dan rakyatnya. Pemikiran yang visioner dan berjangka panjang pun bukan hanya untuk kepentingan pragmatis mereka, lebih dari itu, kepentingan rakyat dan negaralah yang menjadi prioritasnya.

Lagi-lagi *Founding Fathers* negara ini dapat menjadi contoh ketika mereka menentukan bentuk negara yang paling sesuai yaitu negara hukum (*rechtstaat*). Mereka pasti telah memperhitungkan dengan cermat, matang dan hati-hati segala konsekuensi yang harus ditanggung oleh segenap komponen bangsa pada generasi-generasi sesudahnya. Secara eksplisit dipesankan bahwa penamaan itu dimaksudkan agar sistem pemerintahan negara kita diselenggarakan berdasar atas hukum, dan bukan berdasar atas kekuasaan belaka (*machtstaat*).

Dalam konteks ke-Indonesiaan yang unik karena terkenal dengan gado-gadonya yang campur sana - campur sini, sistem sana - sistem sini. Maka tidak dapat dipungkiri hal ini juga berpengaruh pada masalah yang dibahas diatas –negarawan dan politisi. Ada yang menyebut istilah dengan "Politisi-Negarawan". Istilah inilah yang sering muncul akhir-akhir ini. Saya sendiri pun bingung dengan makna dari politisi-negarawan tersebut.

Mungkin secara bahasa saya dapat artikan sebagai seorang politisi yang memiliki sikap seorang negarawan. Seorang politisi yang tidak memiliki indikator seorang negarawan dapat memiliki sifat dan sikap seperti seorang negarawan. Di sinilah dapat ditarik sebuah otokritik dari istilah tersebut. Politisi bukan negarawan, dan negarawan sudah pasti seorang politisi karena memang substansinya jauh berbeda.

Fenomena inilah yang menjadi polemik saat ini. Indonesia yang notabennya adalah negara unik dengan gaya "Gado-Gadonya" yang dengan pedanya pula mempengaruhi seluruh aspek kehidupan negara ini, bahkan untuk pembedaan negarawan-politisi saja pun dapat dicampur adukan seperti pecel dan gado-gado dengan berbagai sayur-mayur di dalamnya. Apapun itu, saya hanya bisa berharap, janganlah mencampur adukan politisi dan negarawan yang notabennya bak air dan minyak. Atau saya bisa mengalah dengan pragmatisme keadaan dengan menyebutnya sebagai "Politisi-Negarawan asli Indonesia" (dengan mengenyitkan dahi tentunya).

**) Peserta PPSDMS Angkatan V Regional 1 Jakarta Putra, mahasiswa Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UI 2009.*

Banjir dan Macet Jakarta Butuh Langkah Aktif, Berani, dan Berbeda⁶

Oleh: Muhammad Irfan Hasan*)



Pada awal pengembangan kota Jakarta (dahulunya Batavia) oleh pemerintah kolonial Belanda Kota Jakarta memiliki tata kota yang sangat baik dan menarik. Model sistem tata kota tersebut diadaptasi oleh kota besar lainnya. Namun, ada satu permasalahan yang utama di sini yaitu desain tata kota Jakarta bukan untuk jumlah penduduk sebanyak sekarang.

Jumlah penduduk DKI Jakarta terus meningkat dari tahun ke tahun. Menurut sumber Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi penduduk DKI Jakarta pada Juli 2010 berjumlah 8.503.135 orang. Angka ini sungguh merupakan angka fantastis dibandingkan dengan Singapura yang notabene merupakan suatu negara serta mengingat luas negara Indonesia yang amat luas dengan persebaran penduduk yang tidak merata.

Salah satu masalah yang ditimbulkan dari padatnya penduduk di Jakarta adalah kemacetan dan banjir yang melanda tiap tahunnya. Karena hal ini berlangsung terus-menerus maka masalah ini dianggap sebagai ciri khas dari Jakarta. Diperlukan upaya untuk menghapuskan citra tersebut dan mengubah ciri khas Jakarta menjadi kota yang lebih nyaman, bersih, dan teratur.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi kemacetan dan banjir. Namun, usaha tersebut masih belum memberikan dampak baik yang signifikan untuk mengatasi banjir dan kemacetan di Jakarta. Salah satunya adalah upaya dengan membangun proyek banjir kanal timur dan pengoperasian busway.

Bagaimana pun juga usaha-usaha tersebut masih dirasa kurang maksimal. Selalu saja ada masalah dalam program-program tersebut. Proyek banjir kanal timur masih terkendala dengan masalah pembebasan lahan. Sedangkan busway saat ini masih dianggap belum mencukupi

⁶Tulisan dimuat di Detik.com kolom Opini, 4 November 2011.

untuk mengakomodasi transportasi bagi seluruh warga Jakarta. Akibatnya banyak orang tetap memilih kendaraan pribadi karena kenyamanan yang bisa didapat dibandingkan busway yang harus bersesakan di dalamnya.

Dalam mengatasi banjir dan kemacetan di Jakarta diperlukan langkah sistematis dan bertahap. Walaupun harus melakukan kebijakan-kebijakan yang tidak populer. Mandeknya proyek monorail di Jakarta merupakan salah satu akibat dari upaya mengatasi kemacetan Jakarta yang tidak sistematis.

Fokus pertama yang harus dilakukan adalah membatasi laju penduduk yang masuk ke Jakarta sekaligus membangun daerah-daerah lain dengan memberikan koneksi pekerjaan dengan institusi/perusahaan yang ada di Jakarta. Dengan begitu arus transmigrasi dapat berjalan sekaligus pembangunan daerah-daerah selain Jakarta juga berkembang.

Perlu diingat bahwa masalah Jakarta bukan lagi menjadi masalah pemerintah daerah. Namun, juga pemerintah pusat serta menuntut peran aktif masyarakat Indonesia.

Setelah fokus terhadap penduduk berjalan dengan baik pengaplikasian peraturan yang lebih ketat harus dilakukan. Misalnya, dibentuk bidang pengawasan khusus bagi orang-orang yang membuang sampah di kali, sungai, jalan, dan tempat lain yang tidak seharusnya. Ketika petugas dari bidang pengawasan tersebut melihat pelanggaran, maka hukuman dijatuhkan pada pelanggar.

Hukuman tidak harus berupa uang atau pidana tapi sanksi berupa diharuskannya ia menyapu jalanan dengan panjang tertentu atau sanksi moral diumumkan namanya dengan pengumuman tiap bulannya di mana hukuman ini diberlakukan bekerja sama dengan RT setempat. Kebijakan ini memang tidak populer. Namun, nyatanya kebijakan yang serupa efektif diberlakukan di negara Singapura sehingga negara tersebut menjadi negara yang terkenal akan kebersihannya.

Jadi, diperlukan keberanian dari pemerintah untuk melakukan kebijakan yang berbeda namun sistematis dan efektif untuk menghadapi banjir dan kemacetan di Jakarta. Diawali dengan fokus terhadap penduduknya serta pembangunan daerah lain, bekerja sama dengan berbagai institusi yang memiliki koneksi dengan Jakarta, sehingga arus transmigrasi berjalan.

Sambil hal itu berjalan dilakukan pendekatan kebijakan yang berbeda namun tegas untuk mengubah gaya hidup serta kebiasaan penduduk Jakarta menjadi lebih baik. Dengan itu semua ciri khas Kota Jakarta yang buruk dapat dihilangkan berganti dengan ciri khas baru yang terbentuk yaitu kota metropolitan yang bersih, nyaman, dan teratur rapi.

**) Peserta PPSDMS Angkatan V Regional 1 Jakarta Putra, mahasiswa Departemen Farmasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam UI 2008*

Kepemimpinan Lokal Mengurangi Kepanikan ⁷

Oleh: Siti Zahara Triani Putri *)



Pada tahun 2010, bencana di Indonesia terjadi sekitar 644 kejadian. Jumlah orang meninggal mencapai 1.711 jiwa. Menderita dan hilang sekitar 1.398.923 orang. Rumah rusak berat 14.639 unit, rusak sedang 2.830 unit, dan rusak ringan 25.030 unit.

Pembangunan kembali dilakukan dan konseling diberikan untuk mengurangi trauma. Tapi, kedua hal itu contoh penyelesaian secara kuratif yang baru bisa dilakukan setelah bencana selesai. Apa yang bisa kita lakukan untuk mengurangi dampak bencana sebagai satu sikap preventif untuk mengurangi kerugian-kerugian yang timbul setelah bencana terjadi? Kepanikan adalah suatu kondisi kecemasan yang sangat berat yang disertai dorongan untuk lari atau bersembunyi sewaktu menghadapi suatu kondisi yang dirasakan berbahaya atau mengancam.

Rasa takut yang muncul tiba-tiba ini dapat menghilangkan kemampuan berpikir dan memengaruhi kelompok atau individu manusia atau hewan yang awalnya cenderung untuk menyebabkan sikap diam tak bisa berbuat apa-apa. Pengendalian kondisi kepanikan di tengah bencana tersebut menjadi satu kata kunci penentu apakah dampak yang timbul akibat bencana yang ditimbulkan cukup serius atukah bisa dikurangi. Kepanikan itu bersifat menular, begitu juga dengan pengendalian kepanikan itu sendiri.

Seseorang yang sebelumnya tidak terlalu panik bisa saja menjadi ikut panik saat melihat ada kepanikan orang-orang di sekitarnya. Sebaliknya, ketenangan atas pengendalian kepanikan itu juga menular, memiliki efek domino. Jika ada satu saja orang yang menenangkan situasi panik tersebut dan mampu meredakan kepanikan tersebut, orang-orang korban bencana di sekitarnya pun akan mengalami peredaan kepanikan yang mereka alami. Di situlah kunci dibutuhkannya seorang pemimpin untuk meredakan kepanikan yang ada.

⁷Tulisan dimuat di Harian Seputar Indonesia kolom Suara Mahasiswa, 17 Maret 2011.

Meredakan kepanikan yang ada adalah salah satu kemampuan yang harus dimiliki setiap pribadi, namun harus ada satu orang yang berjiwa kepemimpinan yang kuat untuk mengawalinya. Optimalisasi kepemimpinan lokal berarti memaksimalkan potensi kepemimpinan yang ada di setiap lini daerah rawan bencana yakni yang sering dilanda bencana maupun yang diprediksi akan terjadi bencana.

Sebagai contoh misalnya, kita bisa melihat bagaimana masyarakat sekitar Merapi begitu tenang menghadapi bencana yang diprediksi akan melanda karena ada satu keyakinan terhadap seorang Mbah Marijan untuk menaklukkan Merapi. Walau belakangan Mbah Marijan akhirnya "menyerah", ketenangannya membuat masyarakat juga tenang.

Konsep yang sama pun bisa diterapkan di daerah-daerah lain untuk mengurangi dampak kerugian yang timbul akibat bencana. Adanya penyuluhan khusus untuk penanggulangan bencana ini memiliki sasaran para pemimpin lokal yang terbiasa bersentuhan langsung dengan masyarakat sekitarnya.

**) Peserta PPSDMS Angkatan V Regional 1 Jakarta Putri, mahasiswa Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi UI 2008*

Politik Kampus: Belajar Demokrasi Santai Tapi Serius ⁸

Oleh: Haniva Az Zahra *)



*"A government afraid of its citizens is a Democracy.
Citizens afraid of government is tyranny!" (Thomas Jefferson)*

Begitulah Thomas Jefferson menggambarkan demokrasi. Dalam demokrasi, rakyatlah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, pemerintah "sadar posisi" bahwa mereka hanyalah representasi. Kepada rakyat pulalah mereka wajib bertanggung jawab. Rakyat berhak menegur, memberikan "sanksi", bahkan mengganti wakil rakyat yang gagal jadi penyambung lidah aspirasi. Pemerintah di bawah kontrol rakyat, segala kebutuhan dan aspirasi rakyat mendapatkan perhatian utama. Sungguh, apabila seperti ini, pekerjaan sebagai wakil rakyat menjadi sangat berat, penuh pengorbanan dan pengabdian, tetapi berjasa.

Demokrasi mampu jadi solusi kebangkitan bangsa. Meskipun Indonesia belum seideal itu menerapkan demokrasi, tetapi kita sedang berjalan ke arah sana. Dari dunia kampus kita mulai belajar penerapan sistem demokrasi, dari dunia ini kita paham betapa dengan demokrasi hak setiap komponen masyarakat mampu disuarakan. Hubungan antara demokrasi dan politik adalah hubungan erat yang saling memengaruhi. Perkembangan demokrasi sangat ditentukan oleh budaya politik yang ada dalam suatu daerah. Maka untuk kesinergisan, budaya politik yang dianut harus juga sesuai dengan prinsip demokrasi.

Dalam dunia kampus, kita menerapkan asas demokrasi untuk kehidupan politik kampus. Memang, ada yang bilang politik itu kejam. Kejam tapi penting. Layaknya obat yang pahit tetapi menyembuhkan, politik kampus terlihat terlalu dini tetapi mendewasakan. Politik kampus adalah miniatur politik pada lingkup yang lebih besar lagi. Kehidupan mahasiswa di kampus punya sistem sendiri yang dianggap paling baik untuk mendapatkan pemimpin lembaga kemahasiswaan yang representatif. Hampir seluruh perguruan tinggi yang memiliki lembaga kemahasiswaan yang aktif, menggunakan sistem demokrasi untuk pemilihan pemimpin. Inilah

⁸ Tulisan dimuat di Detik.com kolom Opini, 4 November 2011.

yang membantu mahasiswa mempersiapkan dirinya untuk terjun dalam sistem demokrasi yang melibatkan lebih banyak kepentingan serta konstituen.

Hal yang menyedihkan adalah ketika mahasiswa lupa bahwa tujuannya aktif berpartisipasi dalam politik kampus adalah untuk mempersiapkan dirinya terjun dalam setting kehidupan nyata berbangsa bernegara. Seringkali mahasiswa lupa dan tengelam dalam kenikmatan popularitas, pada akhirnya berusaha mencari pembenaran dan bukan membela kebenaran. Menjunjung tinggi kepentingan kelompok dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekuasaan. Itulah mahasiswa dalam kehidupan politik kampus. Demokrasi dijadikan alat untuk memuaskan kebutuhan dan memajukan kepentingan. Kemudian setelah mendapatkan kekuasaan, seringkali terlena dan lupa bahwa tugasnya hanyalah menjalankan aspirasi orang-orang yang sudah memilihnya. Pemimpin lembaga kemahasiswaan lupa dan tidak peduli tentang harapan yang banyak mahasiswa lain titipkan padanya.

Jika sudah seperti ini, mahasiswa bukan lagi belajar tentang demokrasi dan politik yang sehat. Justru mahasiswa sebagai harapan bangsa belajar dari role model yang salah, mereka berkaca dan mengidentifikasi pada wakil rakyat Indonesia. Mahasiswa bukan melakukan fungsi evaluasi dan menginternalisasi dalam diri mereka nilai yang seharusnya.

Politik kampus harusnya disikapi santai tetapi tetap serius. Kita harus serius dalam menjalankan sistem demokrasi yang berlaku di dalamnya. Profesional, sesuai kaidah, dan mendekati ideal. Tetapi tetap santai apabila bukan kelompok kita yang berkesempatan memimpin. Tidak perlu



EKONOMI



Indonesia Masih “Takut” Hadapi CAFTA⁹

Oleh: Aldian Farabi *)



Tidak mustahil lagi bagi Cina untuk menggulingkan kedigdayaan Amerika Serikat dari pelbagai sektor. Hal ini didukung penuh oleh potensi dan aset terbesar yang dimiliki oleh Cina yakni jumlah penduduknya. Hampir dapat dipastikan, penduduk Cina tersebar di seluruh pelosok dunia. Ini peluang sekaligus strategi yang dimainkan oleh Cina dalam membangun kedaulatan bangsanya. Alhasil, negeri tirai bambu ini semakin diperhitungkan, terutama oleh berbagai negara-negara maju lainnya.

Sebut saja Jepang, Amerika, dan negara-negara di Uni Eropa kini mulai memandang Cina sebagai saingan baru yang “mengancam”. Kecerdikan Cina dalam memainkan seni berumah tangga dan berhubungan dengan negara lainnya sangat mendorong peradaban Cina. Ditambah lagi kelihaian Cina dalam mengeksploitasi peluang-peluang yang tercipta. Ringkasnya, Cina lagi-lagi mampu melihat dan memprediksikan peluang baru lagi. Kali ini target operasinya adalah negara anggota ASEAN, termasuk Indonesia.

Sejak disetujuinya perjanjian dagang Cina Asean Free Trade Area (CAFTA), 10 tahun silam, Indonesia masih canggung memainkan catur perdagangannya. Kemelut perjanjian dagang bebas antar negara ASEAN sangat menuai pro dan kontra. Peralpnya, sebagian besar masyarakat Indonesia masih bernaung di bawah paradigma bahwa CAFTA merupakan ancaman terbesar, terutama bagi roda perindustrian Indonesia. Industri rakyat seakan tergerus, sedangkan pasar terus dibanjiri produk Cina. Inilah yang akhirnya memancing suara sumbang rakyat dalam penolakan diberlakukannya Free Trade Area (FTA).

Tidak lama berjalan, CAFTA telah merenggut lapangan pekerjaan masyarakat Indonesia. Angka pertumbuhan industri di Indonesia kian tahun mengalami penurunan. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (2010), sejak tahun 2001 jumlah total industri menurut subsektornya berada pada angka 21.396 turun menjadi 20.729 pada tahun 2006. Meskipun angka ini melonjak lagi sejak

⁹Tulisan dimuat di Okezone.com kolom Opini Kampus, 23 Desember 2010

tahun 2007, yakni 20.729, namun diprediksikan akan terus menurun. Fakta tersebut mengindikasikan ketidakmapanaan Indonesia dalam menghadapi arus pasar persaingan bebas.

Akar permasalahan ini sebenarnya hanya berotasi pada kesiapan masyarakatnya dalam bersaing. Peranan industri-industri Indonesia -baik yang besar maupun yang kecil- mengambil andil yang sangat penting. Dengan diberlakukannya CAFTA seharusnya pangsa pasar Indonesia akan semakin meluas. Namun, tidak demikian halnya. Bahkan industri-industri milik Indonesia masih belum mampu menguasai pasar di negaranya sendiri.

Hal ini sama halnya dengan menanam padi di ladang yang lebih luas, namun tidak menambahkan bibit, pupuk, perbaikan sarana, dan penanganan lainnya. Artinya, peranan CAFTA hanyalah sia-sia. Jika dianalisis lebih mendalam, hal ini ditengarai oleh banyak hal yang berakar dan kompleks. Indonesia seakan takut dalam membuat ataupun memperbaiki sistem perdagangan yang baru. Indonesia masih asyik bernaung di bawah zona kenyamanannya. Sehingga tidak menyadari masih ada ancaman-ancaman lain yang siap menghancurkan perekonomian negaranya.

Sudah bukan zamannya lagi, jika Indonesia bernaung dibawah "belas kasihan" negara lain. Sudah saatnya, Indonesia mendongakkan kepala merenggut kemandirian bangsanya. Selamanya CAFTA akan bernilai negatif jika paradigma yang dibangun hanya memposisikan CAFTA sebagai ancaman. Sebaliknya, CAFTA akan bernilai positif jika dianggap sebagai peluang untuk keluar dari keterpurukan perekonomian bangsa ini. Sudah seharusnya industri-industri yang ada di Indonesia merancang kembali "onderdil-onderdil" produktifitasnya. Memperbaiki sistem pemasaran yang lebih lekat dengan konsumen.

Jika Cina saja mampu menguasai pasar dengan kuantitas barang dan harga yang jauh lebih murah. Maka Indonesia menunjukkan kualitas barang dengan harga yang tidak kalah bersaing. Inilah yang dimaksudkan sebagai kejelian dalam membaca pangsa pasar. Karakteristik masyarakat Indonesia yang lebih menyukai harga murah ketimbang kualitas belum tentu dimiliki oleh masyarakat di negara lainnya. Artinya, melalui CAFTA industri-industri yang ada di Indonesia berkesempatan melakukan ekspansi untuk mendapatkan pasar dengan karakteristik yang dibutuhkan: Kualitatif dengan harga kompetitif.

Tidak terlepas dari hal itu semua, masih banyak pihak yang harus menyokong kelancaran arus produksi dan pemasaran ini. Lembaga pemerintahan dan swasta diharapkan mampu mendongkrak, baik dengan kebijakan sektor ketiga maupun sektor privat. Pemerintah melalui kementerian perindustriannya harus selalu senantiasa membina, mengayomi, serta menjamin tersedianya modal bagi industri-industri di Indonesia, terutama industri level menengah ke

bawah. Pihak swasta dengan kebijakan privat sektornya, bersinergi dengan pemerintah dalam menggali devisa negara dari negara lain. Akhirnya, kemapanan industri-industri Indonesia akan menjadi tonggak terciptanya kemandirian bangsa. CAFTA bukanlah hal yang perlu ditakuti, tetapi justru dimanfaatkan tanpa menghilangkan rasa kewaspadaan. Hidup Indonesia!!!

**) Peserta PPSDMS Angkatan V Regional 5 Bogor, mahasiswa Departemen Teknologi Industri Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian IPB 2008*

Melestarikan Pasar Tradisional¹⁰

Oleh: Miftahul Husni*)



Dari hari ke hari tampaknya keberadaan pasar tradisional semakin mengkhawatirkan. Bagaimana tidak, saat ini telah banyak berdiri pasar-pasar modern di berbagai tempat dalam bentuk minimarket dan pasar swalayan.

Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) DKI Jakarta Hasan Basri, H. Harry Mulyono lalu menyebutkan bahwa 2.000 minimarket kini sudah menyesaki ibukota. Jumlah tersebut belum termasuk jumlah pasar swalayan yang tersebar di berbagai pusat perbelanjaan.

Padahal, keberadaan pasar tradisional harus dipertahankan. Data dari Komisi Pengurus Persaingan Usaha (KPPU) tahun 2010 menunjukkan bahwa pasar tradisional di Indonesia hanya berjumlah 13.450 pasar dengan jumlah pedagang sekitar 12.625.000 orang. Dibanding dengan pasar-pasar modern yang lebih sedikit dengan jumlah tenaga kerja yang jauh lebih kecil, dampak matinya pasar tradisional akan sangat besar mengingat banyaknya masyarakat yang menggantungkan hidup sebagai pedagang di pasar. Tak lupa tenaga kerja pendukung lain seperti tenaga kebersihan, keamanan, buruh angkut barang dan lain-lain.

Menghadapi kondisi seperti ini, perlu dilakukan berbagai langkah untuk meningkatkan daya saing pasar tradisional. Pasar tradisional hendaknya terus mempertahankan dan menonjolkan keunggulan-keunggulannya seperti kualitas barang yang dijual dan adanya proses tawar-menawar harga. Selain itu, para pedagang harus dapat berstrategi seperti layaknya pasar modern.

Hambatan yang terjadi dalam penerapan langkah-langkah di atas adalah pendidikan kebanyakan pedagang yang berasal dari kalangan menengah ke bawah. Di sinilah peran pemerintah dituntut. Pemerintah hendaknya dapat membantu pedagang tradisional

¹⁰ Tulisan dimuat di MediaIndonesia.com kolom Citizen Journalism, 13 Februari 2011

menerapkan strategi-strategi dalam rangka modernisasi pasar. Strategi yang dapat diterapkan adalah pengadaan pasar-pasar khusus (specialty market).

Pasar khusus adalah pasar yang secara khusus hanya menjual satu jenis barang tertentu seperti barang elektronik, tekstil dan lain-lain. Pasar-pasar seperti ini terbukti tidak sepi oleh pengunjung. Sebagai contoh, pasar Tanah Abang yang menjual berbagai jenis produk tekstil.

Pasar Tanah Abang dikenal sebagai pusat tekstil terbesar di Asia Tenggara dengan lebih dari seribu kios. Pasar ini dipadati sekitar 60 ribu pengunjung per hari menjelang Natal tahun lalu. Jumlah ini masih lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pengunjung saat lebaran yang mencapai 100 ribu pengunjung per harinya.

Ramainya pengunjung ini tidak lain karena banyaknya pilihan barang yang tersedia, harga yang murah dan kualitas barang yang baik tekstil hanyalah satu dari sekian banyak potensi Indonesia. Masih banyak potensi-potensi lain, terlebih di bidang pariwisata yang sampai saat ini belum digarap pemerintah secara maksimal.

Kekayaan potensi bangsa hendaknya tidak menjadi sesuatu yang sia-sia. Keberadaan pasar khusus hendaknya menjadi sebuah keunggulan Indonesia mengingat Indonesia adalah negara yang kaya akan potensi dan keunikan di setiap daerahnya. Pemerintah bersama masyarakat diharapkan dapat secara kreatif menggali kekayaan bangsa tersebut dan mengangkatnya sebagai komoditi yang menghasilkan keuntungan demi kesejahteraan rakyat Indonesia.

**) Peserta PPSDMS Angkatan V Regional 1 Jakarta Putr1, mahasiswa Departemen Ilmu Komputer Fakultas Ilmu Komputer UI 2008*

Penanganan Ekonomi Melupakan Etika¹¹

Oleh: Jiwo Damar Anarkie *)



Unik, Indonesia kaya tapi sengsara. Rakyat menjerit pemerintah asik-asik. Harga cabai sampai Rp 100 ribu per kilo, beras juga naik. Ada apa ini? Di tengah euforia kemeriahan pasca Piala AFF kita langsung dipukul dengan kenaikan harga pangan yang begitu tidak manusiawi.

Dari sudut pandang seorang liberalis, mungkin ini tak jadi masalah. Yang kita ketahui bahwa seorang liberalis selalu mementingkan dirinya sendiri, modal pribadi, bahkan tidak peduli kondisi orang lain apalagi bangsa ini. Berbeda dengan ketika kita memakai pandangan seorang sosialis yang pada nyatanya menjunjung akan kebersamaan hak dalam bertindak. Tentu, tidak dapat dinafikan kedua pandangan ini mempengaruhi pola pikir para pemimpin negeri kaya ini.

Mengkajinya lebih jauh, secara Undang Undang Dasar, kembali pada pasal 33 bahwa kekayaan negeri ini dikuasai oleh negara dan dipergunakan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat. Namun sayang, pandangan fakta selalu berbanding terbalik dengan realita itu terjadi, Indonesia cenderung terpengaruhi Barat dengan sistem liberal dengan pandangan ekonomi kapital. Mengapa ini terjadi? mungkin bisa ditanyakan pada mereka yang "katanya" menjadi pemimpin negara ini.

Maksud tulisan ini sebenarnya tak ingin menyajikan dialektika antara pro-kontra. Hal ini sebenarnya tak jadi masalah, mau memakai pandangan seorang liberalis atau seorang sosialis. Ada poin penting di sini. Adalah etika yang mempengaruhi pandangan mereka dalam tindak-tanduknya. Harga pangan, mungkin secara hukum permintaan-penawaran dalam ekonomi, maupun hukum lainnya, merupakan sebuah konsekuensi logis dari diterapkannya hukum itu.

¹¹ Tulisan dimuat di Harian Media Indonesia kolom Opini, 17 Januari 2011.

Tetapi hukum akan tentu akan dikalahkan oleh sebuah makna kata dari etika. Etika selalu dekat dengan hati nurani, apakah tindakan "a" atau "b" benar atau salah. Ketika etika diterapkan oleh bukan hanya pemerintah, namun juga seluruh *stakeholders* yang ada, mungkin harga cabai, beras dan pangan lainnya tak semelambung dan semelejit ini. Seperti halnya etika selalu dekat dengan hati nurani, seluruh *stakeholders* akan pula bertanya, apakah tindakan menaikkan-merasakan melejitnya harga pangan adalah sebuah tindakan yang benar. Seorang yang kembali pada etika, tentu menjawab hal ini menjadi sebuah kesalahan. Hal ini berlaku untuk seluruh *stakeholders* mulai dari pengampu kebijakan sampai buruh tani. Seperti halnya sebuah hubungan kausalitas, saran saya, kembali pada etika, tentu etika yang baik dan benar.

**) Peserta PPSDMS Angkatan V Regional 1 Jakarta Putra, mahasiswa Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UI 2009.*

Leadership Mahasiswa dalam *Socioagropreneur*¹²

Oleh: Rinaldy Ardana Harahap*)



Salah satu metode yang harus dilakukan Indonesia untuk mengatasi kemiskinan dan sekaligus mengejar ketertinggalan dari negara lain adalah membangun gerakan budaya kewirausahaan yang dilakukan bersama-sama antara pemerintah, akademisi, dan tokoh sosial. Tindakan penumbuhan koperasi, usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah (UMKM) sebagai penopang utama perekonomian Indonesia merupakan tindakan utama yang harus dilakukan dalam gerakan budaya kewirausahaan.

Pelaku UMKM yang mencapai 99 persen dari total 52,769 juta pelaku usaha di Indonesia inilah yang berhasil mengeluarkan Indonesia yang terus mendera sejak 1998. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, secara umum jumlah angkatan kerja di Indonesia pada Agustus 2010 mencapai 116,5 juta orang atau bertambah sekitar 530 ribu orang dibanding Februari 2010 sebesar 116,0 juta orang. Tentu saja perbaikan ini tidak terlepas dari peran pelaku UMKM.

Namun, sarjana -diharapkan menjadi calon pemimpin bangsa di masa depan— yang menganggur di Indonesia sedikitnya tercatat 626.000 orang (BPS 2010). Hanya kemampuan wirasaha yang bisa mempercepat bangsa ini menyelesaikan kemiskinan dan pengangguran yang semakin meningkat, terlebih kewirausahaan sosial dalam bidang pertanian (*socioagropreneur*).

Untuk mendorong keinginan pemerintah meningkatkan perekonomian nasional, mengurangi pengangguran, dan menyelesaikan masalah kemiskinan, jumlah wirasaha ditargetkan minimal dua persen dari total penduduk Indonesia. Peran mahasiswa pertanian sebagai calon pemimpin bangsa di masa mendatang sangat besar, salah satunya upaya pengentasan kemiskinan melalui kerjasama budidaya ikan nila dengan petani ikan yang mengalami kesulitan modal.

¹² Tulisan ini telah mendapat penghargaan Juara ke-3 Lomba Artikel Kewirausahaan UKM CSR FE UI, Desember 2010

Peluang budidaya ikan nila sangat besar. Data menunjukkan pada tahun 2005, tingkat konsumsi ikan masyarakat di Indonesia mengalami kenaikan yakni dari 25,03 kg per kapita per tahun pada tahun 2006 menjadi 25,8 kg per kapita per tahun pada tahun 2007. Angka ini masih dibawah standar kecukupan pangan untuk ikan yaitu sebesar 26,55 kg per kapita per tahun. Sedangkan untuk pasar ekspor, salah satu pasar yang paling potensial adalah AS dengan rata-rata ekspor 8.000 ton ikan nila per tahun (Agrina, 5 April 2007).

Lantas, bagaimana keadaan para petani ikan nila sehingga perlu melaksanakan program sosioagropreneur kepada mereka? Penjelasan Hartyo (2010) tentang keadaan petani ikan di Bogor tentu bisa menjadi pertimbangan. Dia menjelaskan masih banyak keluarga petani ikan –dalam hal ini petani nila– yang mengalami defisit pendapatan. Rata-rata pendapatan per kapita per bulan pada kelompok keluarga pembudidaya ikan hanya Rp 498.649,60. Sedangkan, pengeluaran per kapita per bulannya sebesar Rp 419.639,30 – Rp 510.700,10.

Hal ini mengindikasikan masih banyak keluarga yang angka kesejahteraannya belum layak. Permasalahan ini tentu saja menyulitkan mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari apalagi memperluas usahanya.

Socioagropreneur budidaya nila bertujuan menghasilkan karya yang dapat merubah Indonesia, terutama di kalangan petani ikan nila yang kekurangan modal dan tidak memiliki daya jual tinggi serta kalangan mahasiswa sebagai akademisi dan calon pemimpin bangsa. Program kerja sama antara mahasiswa sebagai pemasok bibit beserta pakan dan petani ikan sebagai pemilik kolam yang memiliki pengalaman di lapangan diharapkan mampu mengenali adanya kemandegan dalam kehidupan petani nila.

Hal ini dilakukan dengan menemukan disfungsi sistem, kemudian menyelesaikannya dengan merubah sistem tersebut dan sejalur dengan menumbuhkan kepercayaan diri petani dalam mengembangkan usahanya. Selain itu, program ini efektif dalam mendorong mahasiswa untuk berwirausaha dan memimpin di tengah kesibukannya sebagai seorang akademisi.

**) Peserta PPSDMS Angkatan V Regional 5 Bogor, mahasiswa Departemen Biokimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam IPB 2009*

Membangun Kompetisi Lewat Kewirausahaan¹³

Oleh: Muhammad Irfan Hasan*)



Dalam membangun daya saing perekonomian Indonesia, tentunya bangsa ini memerlukan individu-individu yang dapat menjalankan kewirausahaan secara mandiri. Dari 238 juta orang penduduk versi sementara BPS, dengan penduduk usia kerja 169,33 juta tercatat memiliki wirausaha sebanyak 564.240 unit atau 0,24 persen dari jumlah penduduk. Berdasarkan teori, Indonesia membutuhkan minimal 2 persen dari jumlah penduduknya sebagai wirausaha untuk membangun pertumbuhan perekonomian secara optimal.

Sebagai contoh, jumlah wirausaha di Amerika Serikat sudah mencapai 11,5 hingga 12 persen dari seluruh jumlah penduduk, di Singapura 7 persen, China dan Jepang 10 persen, India 7 persen, dan Malaysia 3 persen.

Dengan fakta angka pengangguran yang terus meningkat di Tanah Air, Indonesia memerlukan perjuangan dan kerja keras untuk mengejar angka ideal jumlah wirausaha. Jika peningkatan jumlah wirausaha di Indonesia sukses dilakukan, pertumbuhan ekonomi sekaligus peningkatan kekompakan perekonomian akan terbangun.

Namun perlu kita ketahui bahwa untuk menjadi wirausaha yang baik diperlukan teori-teori yang mendukung kewirausahaan tersebut dan pengalaman selama proses menjalaninya. Oleh karena itu, kurikulum di Indonesia terutama untuk perguruan tinggi sudah semestinya menyisipkan ilmu kewirausahaan pada semua jurusan yang ada.

Mengapa kurikulum tersebut bukan hanya untuk jurusan yang berhubungan dengan ekonomi? Sebab semua orang dengan latar belakang apapun pada dasarnya dapat berwirausaha. Sebagai contoh, mahasiswa yang berkuliah di kedokteran dapat diberikan ilmu mengenai

¹³ Tulisan dimuat di MedialIndonesia.com kolom Citizen Journalism, 28 Agustus 2010.

kewirausahaan membangun tempat praktek sendiri dan hal-hal apa saja yang harus diperhatikan untuk mengembangkan tempat praktek tersebut.

Sama halnya dengan mahasiswa yang berkuliah di jurusan farmasi diberi pengetahuan tentang kewirausahaan dan dapat mengangkat topik apotek atau praktek herbal sebagai salah satu contoh aplikasi kewirausahaannya, begitu pula dengan fakultas teknik, ilmu sosial, keperawatan, dan lain sebagainya.

Dengan adanya kurikulum tersebut, masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang siap untuk terjun di dunia usaha, kreatif, dan memiliki kekompakan yang tinggi. Seiring dengan itu, perekonomian Indonesia pun akan semakin maju.

Hal lain yang harus diperhatikan adalah mencoba latihan berwirausaha sebelum benar-benar masuk ke dunia nyata. Latihan tersebut dapat dilakukan sesuai dengan kurikulum yang disampaikan sebelumnya, melakukan studi ke tempat praktek wirausaha yang telah sukses, atau dengan lomba-lomba yang diadakan oleh kampus.

Dengan begitu, mahasiswa Indonesia akan mendapat pengalaman lebih awal dari 'latihan-latihan' yang telah mereka geluti sebelumnya. Di samping itu, semangat kewirausahaan juga harus dimunculkan dari mahasiswa sendiri dengan mengumpulkan massa seefektif mungkin untuk berwirausaha, sambil terus meningkatkan kreativitas berwirausaha demi kemajuan perekonomian Indonesia.

**) Peserta PPSDMS Angkatan V Regional 1 Jakarta Putra, mahasiswa Departemen Farmasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam UI 2008.*

'Brownlish' Brownies *Mini Stylish* Berbasis Tepung Bekatul Padi¹⁴

Oleh: Ahmadun*)



Dewasa ini, penyakit degeneratif telah menjadi perhatian masyarakat di dunia, termasuk di Indonesia. Penyakit-penyakit degeneratif seperti kardiovaskular, hipertensi, dan diabetes mellitus menjadi penyebab utama kematian di negara maju dan berkembang (Hadipernata 2007). Penyakit penyakit tersebut sangat terkait dengan pola perilaku, termasuk pola makan yang tidak seimbang dan aktivitas fisik yang rendah.

Seiring dengan kesadaran masyarakat akan kesehatan dan mahalnnya harga obat-obatan, maka tindakan pencegahan terhadap penyakit menjadi sangat penting. Salah satu upaya pencegahannya adalah melalui pemilihan makanan yang tepat. Makanan yang tepat tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar tubuh saja, tetapi lebih jauh lagi mempunyai sifat fungsional yang akan memberikan dampak positif bagi kesehatan, yang dikenal dengan sebutan pangan fungsional (Apriyantono et.al 1989).

Salah satu bahan pangan yang berpotensi sebagai pangan fungsional adalah bekatul. Sejalan dengan kenaikan produksi beras yang terus meningkat maka meningkat pula hasil sampingnya (limbah) .Di antara limbah yang banyak ditemukan adalah bekatul (sekitar 10% berat gabah kering giling). Biasa bekatul hanya digunakan sebagai pakan ternak, padahal untuk kebutuhan konsumsi manusia sebenarnya masih dimungkinkan, karena kandungan zat gizinya yang tinggi bahkan jauh lebih tinggi dari beras yang notabene merupakan produk utama industri penggilingan gabah (Widowati 2001).

¹⁴ Tulisan ini terpilih sebagai Top Ten the best Business Plan Proposal pada Anderson Tanoto Bisnisplan Competition 2011, 7 Februari 2011.

Bekatul merupakan sumber serat pangan (*dietary fiber*) dan juga mengandung protein, mineral dan vitamin dalam jumlah yang tinggi. Serat pangan dapat mencegah penyakit degeneratif, antara lain kelebihan kolesterol, penyakit jantung, obesitas dan diabetes. Dengan pengolahan yang tepat bekatul dapat dimanfaatkan menjadi bahan pangan yang sangat berguna bagi kesehatan. Protein konsentrat bekatul sangat cocok untuk jenis makanan padatan. Substitusi sampai 50% berbagai jenis bekatul pada tepung dalam pembuatan makanan panggang dan kukus hanya berpengaruh sedikit terhadap mutu produk tersebut. Sebagai bahan pangan, bekatul memang masih rentan mengalami kerusakan. Sebagian besar kerusakan yang timbul antara lain timbulnya bau tengik dan apek yang dihasilkan karena aktivitas enzim lipase dan oksidasi asam lemak bebas yang terkandung didalam bekatul itu sendiri. Kerusakan ini dapat dicegah dengan usaha stabilisasi bekatul, yaitu mencegah pemecahan lemak dan mengontrol pertumbuhan organisme yang tidak diinginkan. Saat ini telah berhasil dilakukan penstabilan tepung bekatul melalui metode *extrude* atau pemanasan rak. Daya tahan tepung terstabilisasi ini mencapai sekitar 6 bulan, meningkat tajam dari sebelum distabilisasi yakni sekitar 2 sampai 3 hari (Syarif et al 1993).

Pangan kesehatan (*health foods*) dapat diartikan sebagai suatu jenis pangan yang karena kandungan zat gizinya selain berfungsi sebagai sumber energi juga berfungsi menjaga atau membantu memulihkan kesehatan tubuh manusia. Dengan melihat zat yang terkandung didalam bekatul terutama *dietary fiber*, bekatul dapat dimanfaatkan sebagai *ingredient* atau bahkan bahan baku utama pembuatan suatu makanan kesehatan ini, terutama bagi penderita obesitas (Winarno 2002).

Hal itulah yang mendorong kami untuk berwirausaha sejak dini. Adapun usaha yang akan kami kembangkan adalah usaha berbasis makanan yaitu brownies mini berbasis tepung bekatul padi aneka rasa. Permintaan pasar yang masih tinggi terhadap dunia makanan yang instan dan fungsional mengarahkan kami untuk memilih bisnis ini dan terus mengembangkannya. Makanan adalah bagian tidak terpisahkan dari kehidupan dan merupakan kebutuhan primer manusia. Namun, ternyata tidak hanya faktor kebutuhan semata yang dilirik oleh konsumen dalam memilih suatu produk pangan. Beberapa yang masih dipertimbangkan oleh konsumen dalam membeli sebuah produk adalah penampilan, efisiensi, dan nilai fungsional dari produk tersebut. Oleh karena itu, kami memunculkan inovasi baru dalam pengembangan produk berbasis brownies ini.

BrownLish, adalah inovasi produk yang kami hadirkan. Tingginya minat konsumen terhadap brownies yang beraneka rasa dan dengan harga yang relatif murah membuat kami berinovasi dengan memproduksi brownies mini. Brownies mini ini berukuran sekitar 10 x 6.5 cm dengan aneka macam topping, rasa, dan style. Brownies yang banyak dijual sekarang ini masih dalam

bentuk ukuran yang relatif besar dengan harga yang kurang terjangkau oleh semua kalangan terutama menengah ke bawah selain itu variasi rasanya juga sangat sedikit atau bahkan hanya satu rasa, sehingga jika konsumen ingin menikmati brownies yang beraneka rasa diperlukan biaya lagi yang cukup besar. Dengan hadirnya brownies mini ini harapannya dapat meminimalisasi masalah tersebut. Sehingga konsumen dengan budget terbatas dapat tetap menikmati brownies dengan berbagai macam pilihan sesuai selera.

BrownLish, brownies dengan substitusi 50% bekatul padi (*polish bran*) ini memiliki keunggulan tersendiri baik secara fungsional maupun secara ekonomis yang tidak dimiliki oleh brownies-brownies yang ada di pasaran. Secara fungsional brownies dengan substitusi tepung bekatul memiliki kandungan serat dan protein yang relatif lebih tinggi bila dibandingkan dengan brownies sejenis. Selain itu, secara ekonomis brownies ini berhasil memanfaatkan limbah industri penggilingan padi rakyat yaitu bekatul padi menjadi bahan dasar pembuatan brownies yang bernilai ekonomis tinggi. Tentu hal ini juga yang menjadi pemicu kami untuk terus berinovasi karena selain belajar mandiri dalam hidup, juga bisa membantu meningkatkan perekonomian rakyat dan yang sama pentingnya, kita mengolah limbah sehingga bisa meminimalisir degradasi lingkungan.

**) Peserta PPSDMS Angkatan V Regional 5 Bogor, mahasiswa Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan Fakultas Teknologi Pertanian IPB 2008.*

*Student Today Entrepreneur Also: Sebuah Paradigma Pemuda Globalisasi Tingkat Ketiga*¹⁵

Oleh: Ibnu Abdul Aziz*)



P emuda adalah pilar sebuah bangsa yang menyanggah setiap sendi-sendi strategisnya. Sebagai pilar, diharapkan dapat menjadi pilar yang kuat dan kokoh, niscaya bangsa itu akan bertahan berdiri di antara dinamika kehidupan dunia. Mahasiswa adalah salah satu representasi dari pemuda, dan merupakan golongan yang memiliki akses besar meningkatkan intelektualitas. Sebagai konsekuensinya, seharusnya menjadi agent of change atau bahkan director of change, maju sebagai garda depan pembangunan bangsa.

Realita saat ini adalah idealita produk pendidikan, yaitu mahasiswa itu sendiri, sebagian besar mahasiswa di Indonesia belum lepas dari budaya zaman industri, terdoktrin oleh dua kata yang ditanamkan orang tua, guru, dan masyarakat, yaitu pencari kerja; menjadi orang gajian setelah lulus kuliah. Bahkan ada yang mengatakan, mahasiswa yang memiliki indeks prestasi kumulatif (IPK) di atas 3,51 cocok sebagai dosen dan guru besar, mahasiswa dengan indeks prestasi 2,75 hingga 3,40 lebih cocok sebagai tenaga profesional. Lalu bagaimana sisanya, akibat tidak mendapat pekerjaan karena IPK-nya di bawah 2,75, mereka rela mengambil resiko lebih dengan membuka bisnis, mau tidak mau menjadi entrepreneur. Konsekuensinya ada dua, yaitu positif dan negatif.

Segi positifnya, jikalau bisnisnya berhasil; memiliki banyak cabang, memiliki sistem *franchise* dan maju, mungkin dia akan menjadi "bos" orang-orang atau teman-temannya yang memiliki kecerdasan di atasnya (IPK >3,00). Konsekuensi negatifnya adalah dia gagal, bukan hanya menganggur membuang banyak waktu dan juga modal, tetapi secara psikologis dia akan iri melihat kawan-kawannya yang mendapatkan uang dari gaji/penghasilan atas pekerjaannya.

¹⁵ Tulisan ini meraih penghargaan Juara III Lomba Artikel Kewirausahaan UKM CSRFE UI, Desember 2010

Takut gagal ditambah dengan kondisi Indonesia seperti saat ini, minat entrepreneur sebagai jalan hidup masih menjadi alternatif ketiga, keempat, kelima dan seterusnya.

Kondisi saat ini, Indonesia memiliki tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada Februari 2010 mencapai 7,41 persen dari 116 juta angkatan kerja dan terjadi kenaikan angkatan kerja sebesar 2,17 juta orang. Hal itu belum menghitung kriteria-kriteria lain yang menyebabkan seseorang dikatakan menganggur seperti jam kerja, tingkat produktivitas dan kesesuaian dengan *background* pendidikan (pengangguran terselubung). Maka, angka pengangguran di Indonesia secara keseluruhan pada 2010 diperkirakan masih akan berada di kisaran 10 persen dari angkatan kerja Indonesia. Jumlah yang tidak sebanding antara jumlah angkatan kerja dengan lapangan kerja yang tersedia adalah penyebabnya. Lapangan kerja yang terbatas juga karena tidak seimbangnya jumlah entrepreneur kita yang hanya berkisar 0,18% (sekitar 400.000) di Indonesia. Artinya dibutuhkan 1,82 % atau sekitar 4 juta entrepreneur baru untuk menuju tingkat ideal dalam menggerakkan perekonomian dan membuka lapangan kerja baru.

Perubahan paradigma merupakan keniscayaan, dari pencari kerja menjadi pencipta pekerjaan. Hal ini didukung oleh Samuel P. Huntington dalam *The Third Way* (1991), globalisasi bukan lagi sekedar pergerakan negara dan *multinational corporation*, tetapi meliputi mobilitas individu yang sangat cepat. Anies Baswedan juga mengatakan bahwa tantangan terbesar masyarakat Indonesia saat ini bukan pada kompetisi domestik, tetapi kompetisi dengan masyarakat internasional dengan segala keunggulannya, yaitu kemajuan teknologi dan komunikasi, jaringan internasional yang sangat potensial, dan kemampuan bahasa internasional, membuat mereka lebih unggul dibanding kita. Secara lokal entrepreneur harus diciptakan dalam sebuah rekayasa sosial dan dalam persaingan internasional, entrepreneur lokal harus disediakan wadah yang memberinya peluang membuka pemahaman berpikir global, *think globally and act locally*.

Singapura memiliki 7,2% wirausaha dan entrepreneur di Amerika sebesar 11,5 % dan mereka *concern* sejak lama dalam membangun bibit-bibit entrepreneur mereka. Entrepreneur harus diciptakan yaitu melalui rekayasa sosial, dalam tesis ini penulis menganggap komunitas entrepreneur adalah rekayasa yang paling efektif.

Komunitas adalah superteam (Reza,2008:62). Entrepreneur sangat efektif dikembang melalui komunitas-komunitas karena di dalam komunitas entrepreneur terjadi proses penyediaan softskill yang dibutuhkan sebagai entrepreneur, yaitu *leadership, public speaking, well organize, marketing, financing, networking*, dan *business plan*. Sebuah tinjauan kasus dari *Central For Entrepreneur Development and Studies (CEDS)*. CEDS menjadi tempat berkumpul bagi mahasiswa yang interest pada bisnis, tempat mempertemukan "orang kreatif yang memiliki ide

bisnis, tapi tidak memiliki modal” dengan “orang yang memiliki kelebihan uang dan belum mengetahui cara memutarinya dalam *cashflow* yang lancar dalam sebuah bisnis,” secara garis besar itulah yang penulis temukan di CEDS.

Paradigma yang ditanamkan di CEDS adalah *Student Today, Entrepreneur Also*, mahasiswa juga bisa menjadi pengusaha kurang lebih seperti itu. Konsep ini terapkan dalam program Entrepreneur Development CEDS, didalamnya terdapat ELC (*Entrepreneur Learning Center*), KRIDA (Kajian Entrepreneur) perpekan, kunjungan bisnis, Business Challenge, dan *Business Plan Competition* yang bertujuan membangun mental entrepreneur, peka pada peluang bisnis, cerdas membuat dan mengembangkan sistem berbisnis. Kecerdasan mengelola dan membangun sistem sangat diperlukan terutama mengingat kendala yang dihadapi mahasiswa ketika memiliki usaha, yaitu kesulitan dalam membagi waktu antara belajar dan mengurus bisnis. Dalam hal ini manajemen waktu menjadi sangat penting, oleh sebab itu dibentuk sistem bisnis yang membuat nyaman. Ketika sang pemilik tidak ada; belajar kuliah, bisnis tetap berjalan.

Hal ini menyadari *entrepreneurial mindset* harus dibangun disertai lingkungan yang mendukungnya. Dalam CEDS, anggota tidak harus memiliki usaha, semuanya dipelajari bersama. Penanaman yang terpenting adalah *entrepreneurial mindset* dan berpikir strategis sehingga mahasiswa dapat bekerja sebagai PNS setelah kuliah tetapi tetap memiliki semangat seorang entrepreneur dalam menjalankan pekerjaannya, tidak terlalu bergantung pada gaji yang didapatkan karena memiliki usaha sampingan di luar pekerjaannya. Atau menjadi entrepreneur sejati peka terhadap peluang bisnis yang ada disekitarnya dan bermanfaat membuka lapangan pekerjaan di Indonesia.

Sejalan dengan pemikiran Anies Baswedan, tantangan dan lawan terbesar pemuda Indonesia adalah para SDM yang memiliki “fitur” lengkap sebagai produk dari pendidikan komprehensif barat. Seorang entrepreneur juga memerlukan jaringan internasional tersebut, terdapat akses menuju pemahaman kewirausahaan secara global bagi seorang mahasiswa, yaitu melalui Global Exchange Entrepreneur Program dan Konferensi Entrepreneur Internasional. Global Exchange Entrepreneur Program diperlukan sebagai wadah pertukaran wirausaha muda untuk belajar tentang iklim kewirausahaan dan inovasi di negara lain. Pastinya setiap negara memiliki iklim usaha dan investasi yang berbeda-beda, pengenalan dan pemahaman mengenai kondisi bisnis di negara lain diperlukan seorang entrepreneur untuk bertahan mengembangkan bisnisnya dan menghadapi kompetitor-kompetitornya untuk terus berinovasi.

Akses ini dapat digunakan untuk bertemu dengan pengusaha-pengusaha sukses dunia dan memperluas jaringan bagi perkembangan bisnis di Indonesia. Melalui pertukaran ini akan terbuka akses-akses Global Entrepreneurship Program, yaitu program yang bertujuan membantu akses permodalan yang berasal dari luar negeri, baik secara *government to government* (G2G), perusahaan asing, *non-government organization* (NGO), dan berbagai macam *International Business Plan Competition*.

Akses kedua yaitu Konferensi Entrepreneur Internasional. Event ini sangat dibutuhkan karena di sana merupakan tempat berkumpulnya entrepreneur-entrepreneur dari berbagai negara melakukan seminar, workshop dan pertukaran ilmu. Salah satunya adalah mengenai model kewirausahaan yang diterapkan di masing-masing negara. Melalui konferensi atau seminar ini biasanya terbuka peluang untuk menjalin kerjasama berupa e-mentoring yaitu memperoleh mentor bisnis melalui akses internet. Program *e-mentoring* inilah yang menjadi salah satu wacana Barack Obama dalam Entrepreneurship Summit bersama 22 social entrepreneur dari Indonesia.

Sebagai salah satu mahasiswa yang belajar di universitas yang bervisi sebagai *world class university*, penulis merasa peluang untuk menghadiri event-event seperti ini sangatlah jarang untuk diakses di UI, bahkan di CEDS sekalipun. Padahal CEDS merupakan unit kegiatan mahasiswa (UKM) entrepreneur satu-satunya di tingkat Universitas Indonesia, Sangat paradoksial sekali dengan akses-skses yang dimiliki universitas-universitas lain yang komunitas bisnisnya dapat mengakses event-event tersebut dengan mudah.

Universitas Indonesia dengan visi besarnya memerlukan kerjasama yang sinergis dan intensif di tingkat lembaga-lembaga di UI, di tingkat regional dalam AUN, dan internasional dalam membangun entrepreneur negeri kita yang tangguh dari kalangan mahasiswa. Informasi serta pembinaan harus dilakukan berkelanjutan, misalkan saja di FEUI terdapat UKM Center, Untuk meningkatkan iklim berbisnis di FEUI, UKM Center dapat melakukan insentif berupa kompetisi bisnis, workshop, dan akses pendanaan bagi usaha mahasiswa. Di FISIP UI misalnya, melalui SEC (Student Entrepreneurship Experiencing) dapat meningkatkan semangat berdirikan mahasiswa melalui training membuat business plan, kemudian mendapatkan tindak lanjut berupa kemudahan perolehan modal dan mentor bisnis. Proses rekayasa yang bekerja secara integrasi dan profesional akan mengundang link-link internasional untuk bekerja sama dengan Indonesia. Semua proses ini berujung pada tujuan akhir pencapaian kuantitas ideal demi pengkokohan pondasi rill perekonomian Indonesia menuju bangsa maju. Semoga.

**) Peserta PPSDMS Angkatan V Regional 1 Jakarta Putra, mahasiswa Departemen Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UI 2009.*

Menciptakan Surga Pariwisata dari Sabang hingga Merauke¹⁶

Oleh: Noviadri Nurlaili K.*)



Sepeuluh tahun yang lalu atau mungkin masa sebelumnya, mungkin kita akan biasa mendengar sebutan manis untuk bangsa kita, Indonesia, Zamrud Khatulistiwa. Entah bagaimana ceritanya dalam beberapa waktu terakhir sebutan itu rasanya hilang dari telinga kita.

Keberadaan Indonesia yang dilintasi oleh Garis Khatulistiwa mengakibatkan keberadaan Indonesia memiliki iklim hutan hujan tropis. Efek berantainya adalah Indonesia memiliki ragam fauna dan flora yang kaya dan unik. Belum lagi bentuk Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan yang mengindikasikan luasnya bibir pantai di garis wilayah Indonesia. Kondisi geografis Indonesia yang dilintasi oleh rangkaian gunung berapi pun mengakibatkan taburan gunung di penjuru Indonesia yang dikelilingi oleh lahan subur yang potensial untuk dikembangkan. Maka, zamrud macam apakah yang tidak tersedia di Indonesia? Keuntungan ini mampu memiliki nilai tambah untuk Indonesia dari segi potensi ekonomi, potensi pariwisata, dan juga potensi pengembangan masyarakatnya.

Khusus pada potensi pariwisata, Indonesia rasanya telah menciptakan surga pariwisata bagi manusia di dunia. Anda tidak perlu jauh pergi ke Afrika untuk trekking (berpetualang di alam bebas) lalu bergegas ke Hawaii untuk menikmati lautan. Atau naik ke Himalaya untuk menikmati salju di puncak gunung lalu menyelam di Australia untuk melihat biota laut. Semuanya ada, hanya di satu tempat bernama Indonesia. Gugusan kepulauan di Indonesia menyediakan wisata laut yang banyak dan variatif. Kekayaan bawah laut pun merupakan obyek wisata yang menarik dan potensial.

¹⁶ Tulisan dimuat di Harian Seputar Indonesia kolom Suara Mahasiswa 7 Januari 2011.

Sebutlah saja taman nasional Bunaken yang sudah terkenal dengan kecantikan biota lautnya. Pantai-pantai Indah pun bertaburan sepanjang Indonesia, baik di Sumatra (misal Belitung), Jawa, Bali, atau lainnya. Banyak pula gunung yang tersebar hampir merata di seluruh pulau besar di Indonesia. Kita pun bisa menikmati salju di puncak Jaya, Irian Jaya. Beragam taman nasional pun menghiasi penjuru Indonesia dan bisa dinikmati baik untuk wisata maupun berolahraga. Maka, tidakkah Indonesia akan selalu menjadi zamrud khatulistiwa?

Permasalahan utama yang mendera sektor pariwisata Indonesia adalah promosi terhadap objek wisata itu sendiri. Objek wisata yang sudah terkenal di penjuru dunia adalah Pulau Bali. Bali telah berhasil mengundang pengunjungnya sendiri berkat panorama indah dan ombak yang menantang untuk berselancar. Namun, tumpukan wisatawan ke Bali rupanya mengakibatkan dampak negatif. Bali kini mengalami kekurangan air bersih akibat penyedotan yang berlebihan untuk lapangan golf dan kolam renang mewah yang menjamur seiring dengan pertumbuhan wisatawan di Bali. Inilah tantangan pariwisata Indonesia di tahun 2011, menjaga keseimbangan alam sekaligus menciptakan primadona baru untuk pariwisata di Indonesia.

Beranjak dari pernyataan sebelumnya tentang Indonesia sebagai zamrud khatulistiwa, sebenarnya bukan perkara sulit bagi Indonesia untuk menciptakan primadona baru bagi pariwisata dan menyebar "titik ramai" wisatawan di penjuru Indonesia. Setiap daerah memiliki keunikan masing-masing untuk melengkapi potensi alam yang baik. Sebutlah Kepulauan Belitung di Sumatera. Bahkan pantai dan biota lautnya lebih cantik daripada apa yang tersisa di Bali saat ini. Selain itu, keunikan adat dan khasnya kopi di sana dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan. Infrastruktur jalan pun sudah sangat baik tersedia. Penerbangan langsung sudah disediakan oleh beberapa penyedia jasa penerbangan. Lalu apa yang kurang? Sekali lagi promosi terhadap daerah-daerah potensial wisata ini.

Sebenarnya tanggung jawab atas media promosi ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Pekerja industri kreatif misalnya telah berhasil melambungkan nama Belitung melalui film *Laskar Pelangi*. Atau ingatkah kita tentang bagaimana tertariknya kita untuk mengunjungi Boscha setelah menonton film *Petualangan Sherina*? Maka apabila kita mencoba untuk memulai "mengalihkan" wisatawan lokal ke tempat-tempat potensial wisata ini, kerja sama antara pemerintah dan setiap elemen masyarakat memang mutlak dibutuhkan. Pemerintah melaksanakan tanggung jawabnya dalam upaya perbaikan infrastruktur dan media promosi resmi di portal atau kedutaannya, maka elemen lain di masyarakat dapat mengambil ruang kontribusinya masing-masing.

Maka sekali lagi, ketika tantangan Indonesia di tahun 2011 adalah menciptakan surga wisata di penjuru Indonesia, upaya pencegahan kerusakan seperti kasus yang kini Bali alami harus dipersiapkan. Pemanfaatan potensi alam bukan berarti sebuah pengrusakan. Maka ketika memulai upaya promosi wisata ini, pemerintah juga sekaligus harus menciptakan mekanisme dan aturan main bagi para investor di industri pariwisata ini dalam menjaga keseimbangan dan ekosistem alam. Upaya ini mutlak dilakukan untuk menjaga Indonesia, mutlak dari Sabang hingga ke Merauke, untuk tetap menjadi zamrud khatulistiwa.

**) Peserta PPSDMS Angkatan V Regional 1 Jakarta Putri, mahasiswa Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi UI 2008*



SOSIAL BUDAYA



Membangun Kerukunan Antarumat Beragama¹⁷

Oleh: Abdullah Kholifah *)



Tahun 2010 baru saja meninggalkan kita dengan banyaknya catatan kelam akan kerukunan hidup antarumat beragama. Pada tahun 2010 kerukunan antarumat beragama di negeri ini benar-benar diuji oleh begitu banyaknya kekerasan yang mengatasnamakan agama.

Tercatat kekerasan berlatar belakang agama pada tahun 2010 meningkat secara signifikan dibandingkan pada tahun 2009. Berdasarkan temuan Aliansi Kebangsaan untuk Kerukunan Beragama (AKUR), untuk daerah Jawa Barat saja terdapat lebih dari 117 kasus kekerasan yang bermotifkan agama, ini belum termasuk kasus HKBP di Ciketing dan pembakaran masjid Ahmadiyah di Ciampea, Bogor. Tentunya ini sangat memperhatikan dan harus bersama-sama kita cari jalan keluarnya.

Masalah kekerasan yang mengatasnamakan agama sebenarnya bukan merupakan hal yang baru bagi bangsa kita, sudah bertahun-tahun bangsa kita mengalami konflik yang mengatasnamakan agama, namun tampaknya bangsa ini khususnya pemerintah tidak pernah mengambil pelajaran dari pengalaman pahit yang datang bertubi-tubi tersebut. Selalu saja konflik yang datang silih berganti tersebut dianggap sebagai konflik biasa yang selalu saja tidak mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah.

Kalau kita lihat dari sumber datangnya konflik antarumat beragama di Indonesia, sebenarnya konflik tersebut hanya diawali oleh permasalahan sepele yang mungkin jika pemerintah tanggap dan cepat untuk mengatasinya, permasalahan tersebut tidak akan sampai pada persoalan yang berujung pada kekerasan antar umat beragama.

Selain itu, maraknya kekerasan yang mengganggu kerukunan antarumat beragama juga banyak disebabkan oleh ketidaktegasan para penegak hukum dalam menindak kasus-kasus yang dapat

¹⁷ Tulisan dimuat di MediaIndonesia.com kolom Citizen Journalism 19 Januari 2011.

menjadi sumber konflik antarumat beragama. Banyak kasus yang seharusnya mendapatkan perhatian serius berhenti di tengah jalan tanpa ada kejelasan akan penyelesaiannya, hal ini tentunya menjadi batu ganjalan yang harus menjadi perhatian kita semua, khususnya pemerintah agar tegas untuk mengambil keputusan hukum tanpa pandang bulu, agar kepastian hukum dapat ditegakkan seadil-adilnya bagi semua masyarakat Indonesia. Sehingga ditahun 2011 ini permasalahan antar umat beragama dapat diminimalisasi.

Peran tokoh agama juga sangat sentral dalam permasalahan ini. Selama ini peran dan fungsi dari tokoh agama dapat dibilang sangat kurang, terlihat dari semakin meningkatnya konflik antarumat beragama dari tahun ke tahun. Idealnya tokoh agama dapat membuka wawasan kebangsaan masyarakat untuk sadar bahwa mereka hidup dalam keberagaman agama dan budaya. Lebih daripada itu, tokoh agama dalam kaitan ini juga dapat berfungsi sebagai penyeimbang guna memberikan pelurusan akan pemahaman agama yang parsial serta memberikan koreksi-koreksi terhadap beberapa opini yang menyudutkan kelompok-kelompok tertentu yang berpotensi untuk menimbulkan konflik antarumat beragama.

Forum kerukunan umat beragama juga dapat dibilang kurang maksimal dalam menjalankan perannya. Selama ini forum tersebut hanya sebagai legalitas formal yang tidak jelas fungsi dan tujuannya. Forum yang seharusnya dapat menjadi tempat untuk berdialog dan mencari titik temu antarumat beragama, tidak jarang digunakan untuk beradu argumentasi tentang siapa yang benar dan siapa yang salah. Ini juga merupakan persoalan serius yang harus kita cari solusinya.

Mimpi menggapai kerukunan antarumat beragama di Indonesia bukan mustahil untuk dapat dicapai, namun juga bukan berarti mudah untuk mencapainya. Sejatinnya kerukunan hidup antarumat beragama merupakan potensi yang sudah tertanam di kehidupan sosial masyarakat bangsa Indonesia. Hal tersebut didasari pada nilai-nilai kemasyarakatan yang sudah ada sejak dulu kala, seperti sikap gotong royong yang sudah tumbuh subur di tengah masyarakat kita.

Akan tetapi, kenyataan yang terjadi adalah sebaliknya, rasa kebersamaan dan kekeluargaan yang menjadi ciri masyarakat Indonesia semakin tergerus oleh perkembangan zaman. Semakin lama kerukunan yang selama ini kita idam-idamkan semakin jauh saja dari kenyataan, sebaliknya konflik antarumat beragama semakin menjadi-jadi akhir-akhir ini, hampir setiap bulan pasti ada saja kekerasan yang mengatasnamakan agama di berbagai daerah di Indonesia. Di sinilah pentingnya mengembalikan rasa kebersamaan dan kekeluargaan yang selama ini hilang dengan cara saling toleransi, saling mengerti dan saling memahami antar seluruh umat beragama.

Tentunya hal tersebut dapat terlaksana jika ada kemauan dari kita untuk melakukannya secara sadar dan penuh kerelaan, serta dilakukan bersama-sama oleh segenap komponen bangsa, baik itu pemerintah, umat beragama dan juga para tokoh agama.

Akhirnya, di awal tahun baru ini, kita semua berharap agar kekerasan yang mengatas namakan agama dapat benar-benar segera hilang dari Indonesia dan pada akhirnya kerukunan umat beragama bukan lagi barang mahal yang sulit untuk kita temukan.

**) Peserta PPSDMS Angkatan V Regional 2 Bandung, mahasiswa Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi UNPAD 2009.*

Pancasila Education In The Nation's Diversity¹⁸

Oleh: Asep Sarifudin*)



Diversity is something to be thankful for giving color and dynamic life. The attitude of respect for diversity can be implemented when every individual is able to understand that this world is filled with billions of people who each have a unique character and bring different cultures. Such an attitude is commonly referred to as a moderate stance. Moderate is an attitude that puts the individual's tolerance of diversity based on the principles and beliefs that he held.

Diversity is not a differentiator but a unifying and comparator that provides the opportunity for us to choose the beauty of this life. If each individual has to understand this, conflict caused by diversity can not happen. The formation of a society that has a tolerance in accommodating a variety of ethnic, religious, racial, cultural, and groups that each have the right to practice and develop traditional cultures and beliefs in the frame of the harmonization of civilization is no longer a dream.

However, in reality many individuals and communities who do not understand this. Many of those who impose their version of truth in the opinion of causing unrest in the society as a whole. In truth, religion is among us to create peace and harmony of truth in this life. In the Islamic concept, the mutual respect of differences be explained by Allah in Q.S. Al-Maidah verse 48 which provides instructions that if Allah wills, He can make all of humanity is one race of a uniform but rather Allah determines otherwise. The point is diversity in all aspects of life are the laws that we must be grateful. Mutual respect and respect among religious believers must always be fostered in order to create a harmony. The harmony here that does not mean a fusion of theology but aim for mutual understanding of each course for rationality to respect

¹⁸ Tulisan ini lolos untuk dipresentasikan dalam even "Education Without Borders 2011" yang diselenggarakan oleh Abu Dhabi Women's Colleges (Higher Colleges of Technology) pada 27-31 Maret 2011 di Abu Dhabi.

differences in their respective perceptions about the faith and the actualization (Yamadhipati, 2008).

In Indonesia alone there are many ethnic groups, religions, customs, and language areas that have characteristics that differ from one another. The attitude of flexibility and able to adapt in all circumstances Indonesian cultural diversity will make us more tolerant, although there are certain restrictions based on the principles and beliefs that we hold. Such an attitude is commonly referred to as a moderate stance. Literally moderate means mediocre, middle way, and not excessive.

Based on the above definition, I argue that a moderate is an individual attitudes that promote tolerance of diversity based on the principles and beliefs that he held. In resolving a conflict, people who have a moderate attitude is not going to side with one side but to find the root of the problem so it can find the best solution to resolve the conflict based on principles of justice.

Constitution of Indonesia based on Pancasila with the state symbol Eagle moderation increasingly clear that the soul needs to be grown. The diversity of Indonesia is painted through the words "Unity in Diversity" as long as we believe to be the identity and personality of the Indonesian nation that respects our diversity can be realized in the life of the country.

Awareness of state life embodied in every aspect of life be it economic, political, beliefs, and other fields to realize the unity of Indonesia as a whole. To achieve this, a lot of ways we can do as a generation heir to the civilization of the nation. The initial steps we have to do is grow the spirit of nationalism and a sense of ownership of this nation. We must realize that this nation needs the best contributions from all elements of society for this nation can rise from adversity. During this time, we are too busy to question the small differences between us and do not realize that there are great similarities, which is a noble goal to make Indonesia a better and dignified. This goal should be the basis for us to achieve national unity. other than that need a real act of us together to solve various problems facing this nation together.

There are several examples of the problems to be solved jointly by promoting a sense of kinship. First, the crisis of morality and ethics in various levels of life that looks pretty much like the spread of culture of corruption, collusion, lack of maintaining dignity and lack of discipline. Second, the escalation of conflict is a conflict amongst which are still emerging. Achieve even higher escalation so that less support harmony and threaten social integration. Third, the stigma of the fall of Indonesia which weaken the bargaining position, both at regional forums and international. Fourth, the weakening of national identity, passion and political commitment to maintain national unity in the sense of relaxation of social and cultural experience, even lead to

cracks. There are still many things that need to be addressed, such as corruption and abuse of power, poverty and unemployment and ignorance, crime and social insecurity, conflict and violence and national fractures and the threat of national disintegration, dependency on foreign domination, destruction and cultural ethics and leadership weaknesses.

Soul moderation built here aims to make structural and cultural transformation process, starting with building a new paradigm of national and state life that puts morality and law enforcement, political politeness ethical, maturity and wisdom of democracy, and economic independence, in addition to efforts that really was to build common ground, togetherness, unity and synergy among the various components of the nation. moderation in all aspects of life of the nation based on values and norms will make this nation stronger and can rival international.

Diversity should we have wisely because it is a very large capital for this nation can continue to get better. When we are here just busy maintaining his own opinion and each group dropped to one another, are out there that other nations continue to develop very rapidly. For that we must realize that the conflict between the members will only cause harm to this nation. Instead we are just busy questioning the diversity and differences of opinion, it is wonderful for us together to do breakthrough thinking intellect and creativity to develop a variety of renewal and discovery technologies and new ways that can support life and provide benefits to humanity. Technology is the result of human thought and creativity that is real and can be directly utilized for the benefit of mankind.

The three things that must be controlled by the Indonesian people for to efficiently utilize the abundant natural resources wisely to Indonesia a better and dignified. In addition, we must deepen ties between our nations in order to form a strong networking. Networking is the result of individual interaction with the environment that form a pattern of relationships and closeness between each party. This is what we need to do in order to realize the Indonesian people who appreciate and respect diversity and uphold the unity and integrity.

**) Peserta PPSDMS Angkatan V Regional 5 Bogor, mahasiswa Departemen Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam IPB 2009*

Pemuda dalam Persaingan Global¹⁹

Oleh: Dewa Mahendra*)



Berlakunya *ASEAN China Free Trade Area* (ACFTA) telah menjadi catatan penting, karena Indonesia menjadi bagian dari hal ini. Penerapan ACFTA akan membuka peluang serta akses ke pasar ekspor anggota ASEAN ke China, sekaligus menarik investasi. Artinya, perjanjian ini akan memacu pertumbuhan perekonomian antar negara di ASEAN. Namun, dalam implementasinya, ada tiga tantangan besar yang dihadapi Indonesia, yakni upaya untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia dan perlindungan konsumen serta bagaimana peluang usaha? Persaingan produk secara global memang merupakan keniscayaan bagi masyarakat Indonesia.

Bagaimana dengan kelompok usaha menengah di Indonesia? Sudah saatnya produsen Indonesia tidak lagi menjadi kompetitor yang kalah sebelum berperang. Seperti yang dilakukan masyarakat produsen pada saat pasca berlakunya ACFTA. Ibarat nasi sudah menjadi bubur, kompetisi dalam dunia usaha harus dihadapi, bukan untuk disesali. Dengan keberagaman budaya, adat, dan kekayaan alam adalah modal yang luar biasa dari kita untuk mengalahkan produk asing. Tinggal bagaimana kita mengelola dan memberdayakan SDA itu agar optimal, sesuatu yang mustahil dilakukan jika SDA yang baik tapi tidak dikelola oleh SDM inovatif.

SDM Pemuda sebagai modal utama bangsa untuk menjadikan suatu bangsa maju. Kecerdasan, kritis, inovatif, serta lingkungan matang dan berkelanjutan untuk memberi keuntungan kepada masyarakat dengan tekanan kepada kelompok marjinal dan miskin merupakan kebutuhan SDM Indonesia. Hokenstad dan Midgley (1997), mengatakan "*think globally and act locally*". SDM Pemuda Indonesia hendaknya mampu berpikir global namun bertindak berdasarkan kearifan lokal. Perubahan *mindset* dari nasional ke internasional ini merupakan cara menjawab tantangan global.

¹⁹Tulisan di muat di MediaIndonesia.com kolom Citizen Journalism 31 Agustus 2010.

Peluang dunia usaha di era globalisasi seperti sekarang sangat terbuka. Sektor privat akan menjadi pilihan orang ketika proses globalisasi telah mengakar ke masyarakat. Ke depan, Sikap individualisme seorang dan keinginan mendapatkan sesuatu akan serba cepat dan praktis. Fenomena ini sebenarnya menjadi peluang bagi masyarakat Indonesia sebagai negara berkembang untuk menjadikan masyarakat maju. Membanjinnya produk dari negara-negara ASEAN plus China sebetulnya memberi keuntungan bagi konsumen, karena memiliki banyak pilihan. Beredarnya produk dari China sendiri bukanlah hal baru bagi konsumen Indonesia, Kita telah menikmati produk China, baik yang masuk ke Indonesia secara legal maupun yang ilegal dengan indikasi harga yang murah.

Tapi, konsumen harus waspada, tidak jarang barang murah justru mengancam keamanan, keselamatan, dan kesehatan konsumen. Masih segar dalam ingatan kita, barang-barang murah, terutama yang berasal dari China (seperti mainan anak, kosmetika dan pangan, peralatan rumah tangga, dan baja), mengandung bahan berbahaya serta tidak memenuhi ketentuan standar yang dipersyaratkan. Khusus terhadap produk pangan, jelas menjadi permasalahan tersendiri. Secara sosiologis, Indonesia adalah negara yang berpenduduk Muslim terbesar di dunia. Jadi hal seperti ini semestinya harus dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mengambil alih produksi yang aman sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan bangsa kita.

**) Peserta PPSDMS Angkatan V Regional 3 Yogyakarta, mahasiswa Departemen Ilmu Hukum Fakultas Hukum UGM 2009*

Jurnalisme Kemanusiaan sebagai Pengatur Pola Pikir Bangsa²⁰

Oleh: Gugi Yogaswara *)



"Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara; terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran; dan untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi"

Demikian bunyi ayat 1, 2, dan 3 pada Pasal 4 Bab II Undang-undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers. Undang-undang ini mencerminkan suatu sistem dimana pers memiliki kebebasan dalam menjalankan fungsinya. Yakni mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya. Kendati demikian, kebebasan pers bukanlah sesuatu yang absolut dan dapat dilakukan secara liberal, melainkan sesuatu yang harus disertai dengan kesadaran akan pentingnya penegakan norma etika, profesionalisme, dan supremasi hukum. (Wibowo, 2009).

Opini masyarakat dalam kesehariannya sangatlah bergantung pada sesuatu yang mencuat di media. Baik atau buruknya dapat memiliki ketergantungan terhadap aspek 'sesuatu' tersebut. Dalam kasus ini, peran pers dalam profesinya yakni merangkum seluruh peristiwa yang ada sangatlah besar. Contoh sederhananya, apabila masyarakat melihat atlet bulutangkis, Susi Susanti menjuarai Olimpiade Barcelona pada 1992, maka bisa dipastikan semangat nasionalisme bangsa Indonesia kala itu tengah membara karena mereka mendapati seorang putri bangsa telah mengharumkan negerinya di dunia. Tetapi, sangat jauh berbeda dampak yang ditimbulkan apabila yang terlihat adalah kalahnya timnas Indonesia oleh timnas Uruguay dalam pertandingan persahabatan dengan skor 1-7. Kekecewaan, sikap apatis, dan tidak puas kerap terjadi bagi masyarakat yang menyaksikan.

Sekelumit Dunia Jurnalistik Indonesia

Secara langsung atau tidak langsung pola pikir masyarakat dapat 'diatur' oleh fenomena-fenomena yang terjadi dan mencuat di media. Dengan kemudahan mengakses informasi, opini-opini publik dapat terbentuk begitu saja bahkan tanpa terencana oleh 'si pembuat opini'

²⁰ Tulisan ini mendapat penghargaan Juara I pada kompetisi menulis "Jour4thlistic Fair" yang diselenggarakan oleh BEM Keluarga Mahasiswa IPB November 2010.

itu sendiri. Ini merupakan dilema bagi dunia jurnalistik Indonesia dalam perannya sebagai mediator informasi publik. Idiom *bad news is good news* saat ini banyak dianut oleh kebanyakan jurnalis dalam meliput peristiwa yang ada. Betapa tidak, 1.078 kasus perkara korupsi pada 2000-2004 diborong oleh berbagai media dan menyajikannya pada halaman utama. Data statistik kemiskinan yang mencapai 14,3 persen dari keseluruhan penduduk Indonesia memberikan pandangan menyedihkan pada halaman depan mayoritas media cetak harian untuk menggambarkan kemerosotan ekonomi bangsa.

Sulit mencari media yang menjadikan prestasi Indonesia sebagai headline dalam liputan periodiknya. Berita seperti Budi Soehardi yang menjadi nominasi CNN Heroes karena mengasuh 47 anak di panti asuhannya atau seperti berita Adrienne T Sulisty dan Vici RTedja yang meraih medali perak Olimpiade Proyek Lingkungan di Azerbaijan. Berita-berita itu kalah booming dibanding hebohnya kasus *bailout* Bank Century senilai Rp 6,7 triliun yang tak kunjung usai.

Ironi inilah yang secara tidak langsung mengerdilkan opini masyarakat Indonesia terhadap bangsanya sendiri. Banyaknya profil koruptor yang diliput di media membuat masyarakat resisten terhadap problema berbau politik dan pemerintahan. Terbukti dari angka golput yang mencapai 34% pada Pemilu 2009 dan manjadi angka golput tertinggi sepanjang sejarah (zonapikir.wordpress.com). Atau lebih parah lagi, akibat dari sajian-sajian sisi negatif bangsa, perlahan membuat legitimasi bahwa itu semua sah untuk dilakukan.

Mengapa bisa begini?

Jika pada masa Orde Baru pers kita lebih disibukkan dengan usaha menjamin eksistensi diri di tengah tekanan pemerintah yang otoriter, maka pers kita saat ini tengah disibukkan dengan usaha memaknai dan memanfaatkan dengan sebaik-baiknya arti 'kebebasan pers' yang termaktub dalam UU No 40 tahun 1999 di atas. Kebebasan pers merupakan penopang dari kehidupan pers itu sendiri. Telah kita rasakan bagaimana pahitnya media yang dibungkam selama orde baru. Masyarakat dicekoki oleh asupan-asupan manipulasi fakta.

Seiring dengan berjalannya waktu, ternyata konsep kebebasan pers ini telah melenakan kita. Lukas Luwarso, mantan Direktur Eksekutif Dewan Pers menjelaskan, bahwa kebebasan pers yang sangat longgar saat ini tidak hanya menumbuhkan ratusan penerbit baru. Akan tetapi, juga menimbulkan kebebasan pers yang anarkis. Kebebasan pers telah menghadirkan secara telanjang segala keruwetan dan kekacauan. Publik bisa menjadi leluasa membaca dan menyaksikan pola tingkah figur publik. Serta, hampir tidak ada lagi rahasia atau privasi. Tabloid-tabloid yang sangat sarat berita dan foto pornografi sangat marak. Judul-judulnya pun sensasional, menakutkan dan bahkan menggemparkan (*scare headline*).

Bahkan, bukan hanya pers dalam dunia jurnalistik, konsumsi publik lain -seperti film dan iklan- pun seringkali mengutamakan substansi 'menjual'-nya dari pada sisi manfaatnya bagi masyarakat. Dampak yang ditimbulkan dapat dilihat mulai dari lifestyle anak muda yang berubah-ubah sesuai trend yang berlaku sampai pembunuhan tidak terencana oleh anak dibawah umur terhadap temannya setelah menonton tayangan *Smack Down* yang disiarkan oleh salah satu stasiun televisi.

Jurnalisme Kemanusiaan sebagai Solusinya

Jika ditelisik lebih lanjut, kebebasan pers bukanlah sesuatu yang absolut dan dapat dilakukan secara liberal, melainkan sesuatu yang harus disertai dengan kesadaran akan pentingnya penegakkan norma etika, profesionalisme, dan supremasi hukum. (Wibowo, 2009). Hal ini dipertegas dalam Bab II Pasal 2 undang-undang No. 40 tahun 1999: "Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum".

Konsep jurnalisme kemanusiaan merupakan rekomendasi terkuat atas permasalahan dan ironi diatas. Mengacu kepada pengertian kemanusiaan itu sendiri yakni, sebuah gerakan yang tujuannya adalah mempromosikan harkat, martabat, dan nilai manusia. kemanusiaan menekankan harkat, peranan, dan tanggung jawab manusia. Menurut paham kemanusiaan, manusia adalah makhluk yang mempunyai kedudukan istimewa dan berkemampuan lebih dari makhluk-makhluk lain di dunia karena bersifat rohani. (Mangunhardjana, 1997). Maka, Jurnalisme kemanusiaan yang kiranya suitable untuk ironi ini adalah kegiatan jurnalisme yang menjunjung tinggi harkat dan peranan serta keinginan rakyat Indonesia yang ingin keluar dari segala keterpurukan dan problema yang melanda. Membantu membentuk pola pikir masyarakat dengan mencoba untuk selalu mempertimbangkan fakta yang diliput secara adil, seimbang dan memperhatikan dampak yang ditimbulkannya.

Terlalu banyak artikel keburukan Indonesia akan menjerumuskan masyarakat pada paradigma pesimisme kolektif terhadap bangsanya sendiri. Harus diseimbangkan dengan membuat prestasi dan keunggulan bangsa menjadi main topic dalam setiap media. Memanusiakan manusia dengan mengapresiasi segala bentuk prestasi merupakan salah satu cara yang ampuh untuk dapat memancing semangat nasionalis masyarakat yang mulai memudar. Memunculkan sisi kemanusiaan dapat menjadi obat bagi golongan penderita alergi media yang menganggap isinya hanya keterpurukan bangsa belaka.

Mengutamakan berita positif bukan berarti mengada-ngada dan menutup fakta-fakta negatif yang terjadi. Bukan pula berarti memangkas berita kontroversial yang perlu dilihat publik

sebagai sarana antisipasi masyarakat. Hal yang perlu diperhatikan adalah selalu memerhatikan proporsi antara keduanya, dan mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan.

Kesimpulan dari premis-premis peliknya masalah Indonesia dapat diambil berdasarkan fakta yang terjadi. Apakah kesimpulan itu buruk atau baik? Menginspirasi atau membuat depresi? Itu semua tergantung dari apa yang mencuat dalam ranah publik. Sesuatu yang masyarakat lihat, sesuatu yang masyarakat dengar, dan sesuatu yang masyarakat rasakan. Dan sesuatu itu menjadi tanggung jawab pers sepenuhnya. Bentuk dari tanggung jawab itu dapat diwujudkan dengan jurnalisme kemanusiaan. Memanusiakan manusia Indonesia yang ingin keluar dari konstelasi keterpurukan negeri menuju suasana penuh semangat dan optimistis Indonesia akan lebih baik lagi.

**) Peserta PPSDMS Angkatan V Regional 5 Bogor, mahasiswa Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan Fakultas Teknologi Pertanian IPB 2009.*

Masihkah Ada Toleransi Beragama di Negeri Ini?²¹

Oleh: Novan Anugrah Prasetyo*)



Kasus penyerangan jemaah Ahmadiyah oleh 1000 warga Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, di Desa Umbulan pada hari Minggu (6/2/2011) adalah salah satu bukti nyata toleransi antarumat beragama masih menjadi hal yang harus diperjuangkan di negeri ini. Penyerangan yang diperkirakan dipicu oleh kedatangan para jemaah Ahmadiyah dari berbagai daerah ke desa tersebut telah memakan 3 korban tewas yang semuanya adalah jemaah Ahmadiyah. Sebuah ironi bagi bangsa yang mendengungkan Bhinneka Tunggal Ika.

Masih teringat dalam memori masyarakat akan konflik bergama yang terjadi di Poso dan Maluku beberapa tahun silam telah memakan banyak korban dari pihak yang bertikai. Tidak lama kemudian terjadi pengeboman terhadap beberapa gereja pada saat malam Natal tahun 2000 silam. Ditambah lagi kejadian terbaru yaitu penikaman terhadap pendeta di Bekasi ketika sedang berjalan menuju gereja.

Fakta-fakta tersebut menunjukkan masih sangat tingginya arogansi dan sentimen antarumat beragama di Republik ini. Konon bangsa ini adalah bangsa yang mengagungkan keluhuran. Mengusung tinggi adat ketimuran. Dimana masyarakatnya saling membantu jika ada kesulitan dan ramah terhadap orang lain. Namun semua itu hanyalah retorika. Masyarakat bangsa ini masih sangat mudah diprovokasi jika terkait isu agama. Sangat mudah menumpahkan darah orang lain yang dianggap kafir.

Para leluhur bangsa ini telah mencontohkan bagaimana menghormati antarumat beragama. Mulai dari zaman Hindu-Budha hingga Islam menjadi mayoritas di bangsa ini. Namun semuanya menjadi pudar begitu saja setelah bangsa ini merdeka dari genggaman kolonial Belanda. Sejak zaman Soekarno hingga SBY telah terjadi banyak sekali konflik antarumat

²¹ Tulisan dimuat di Okezone.com kolom Opini Kampus 9 Februari 2011.

beragama. Semua hal tersebut terjadi tak lepas dari sistem pendidikan agama yang diajarkan pada masyarakat ini.

Sejak kecil masyarakat selalu ditekankan akan ritual beribadah yang benar. Islam diajarkan bagaimana membaca Al-Quran yang benar, shalat yang benar, wudhu yang benar, dan ajaran fikih lainnya. Agama kristen diajarkan bagaimana cara misa yang benar, bernyanyi, dan tata cara ibadah lainnya. Demikian ajaran agama yang lain. Begitu pengajaran yang fokus pada ritual ibadah, maka masyarakat hanya beranggapan sempit dalam beragama. Sangat penting mengajari masyarakat untuk memahami kebebasan masyarakat untuk memeluk agama lain.

Anak kecil di TPA atau di sekolah minggu atau sekolah agama lain perlu mendapat pengertian akan menghormati pemeluk agama lain. Sudah saatnya guru-guru di sekolah tersebut menanamkan nilai toleransi pada murid-muridnya. Nilai-nilai toleransi sebenarnya tidak perlu dikurikulumkan. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu dan semakin pudarnya nilai toleransi antarumat beragama di Indonesia maka akan menjadi sangat penting untuk ditanamkan. Karena nilai-nilai agama sangatlah luas. Tidak hanya terpaku pada ritual beribadah.

Kini sudah saatnya untuk kembali mensinergikan nilai Bhinneka Tunggal Ika pada seluruh jiwa masyarakat Indonesia. Sudah saatnya perbedaan menjadi kekuatan untuk menjadi satu kesatuan demi terwujudnya Indonesia yang harmonis. Sudah lama Garuda menangis melihat anak-anaknya bertikai karena perbedaan. Perbedaan bukanlah menjadi masalah. Indonesia merdeka dari belenggu penjajahan karena kesadaran akan persatuan dari banyak perbedaan. Kini Indonesia harus merdeka dari segala konflik antarumat beragama dengan cara menghargai perbedaan bukan menghakimi mana yang benar dan salah.

**) Peserta PPSDMS Angkatan V Regional 4 Surabaya, mahasiswa Departemen Teknik Kelautan, Fakultas Teknik Kelautan ITS 2008*

BlackBerry dan Anak Muda Indonesia ²²

Oleh: Haniva Az Zahra*)



"Our technology forces us to live mythically" (Marshall McLuhan)

Masih teringat pemberitaan media yang sempat ramai belakangan tentang pencabutan izin RIM di Indonesia. Banyak orang yang protes atau juga setuju dengan keputusan ini dan mengungkapkannya melalui social network, misalnya saja, Twitter. Berpendapat ini dan itu dengan tak lupa me-*mention* @tifsembiring agar pendapat mereka bisa dibaca langsung oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia pada Kabinet Indonesia Bersatu jilid II, Tifatul Sembiring. Hal ini menarik, karena sebagian besar orang yang berpendapat adalah orang yang paham tentang kedudukan RIM di Indonesia, memahami tuntutan yang diajukan pak Menteri, bahkan juga sampai pendapat dari pengguna smartphone BlackBerry yang tidak begitu paham duduk perkaranya.

Kali ini bukan tentang pendapat penulis terhadap kasus RIM tersebut, tetapi lebih tertarik pada komentar pengguna smartphone ini yang ternyata tidak semuanya sama smart dengan gadget yang mereka miliki. Di Twitter misalnya, menurut pengalaman pribadi penulis, banyak sekali pengguna BlackBerry yang merupakan anak muda Indonesia. Pengguna smartphone ini sekarang di Indonesia berjumlah 300-400 ribu pelanggan dan di antaranya adalah anak muda Indonesia. Saat kasus RIM mencuat, banyak diantara remaja negeri kita yang "sembarangan" berkomentar tentang kasus ini tanpa mereka tahu dan menganalisis secara mendalam tentang tuntutan yang diajukan. Intinya mereka kebanyakan tidak setuju dengan Menkominfo karena mereka tidak siap menghadapi dampaknya, dampaknya bagi mereka jika izin RIM dicabut, maka BlackBerry mereka akan "mati" tidak bisa digunakan. Mereka mencemooh, berkata kasar, dan mengeluarkan pendapat negatif, padahal sekali lagi mereka mungkin hanya memahami 10% dari keseluruhan tuntutan.

Mirisnya, inilah wajah anak muda Indonesia. Kita seringkali terlalu banyak bicara, terlalu mudah terhasut, dan mudah tergoda untuk sesuatu yang baru dan terlihat mengagumkan. Sekarang banyak anak usia SD yang sudah mengantongi smartphone ini, padahal mereka pun tidak

²² Tulisan dimuat di Okezone.com kolom Opini, 27 Januari 2011.

mengerti keunggulan BlackBerry dalam layanan push emailnya. Atau mereka juga belum membutuhkan akses informasi internet yang tersedia dalam 24 jam. Mungkin BlackBerry mereka tidak melakukan banyak tugas, selain hanya sms dan telepon (ditambah lagi fitur BBM). Rasanya terlalu mahal ongkos yang dikeluarkan untuk membeli smartphone ini, karena tidak seimbang dalam pengoptimalan penggunaannya.

Kemudian juga remaja kita, anak usia SMP, SMA, dan beberapa mahasiswa tingkat awal yang menggunakan BlackBerry karena mengikuti trend atau ikut dengan teman sebaya. "*Karena teman saya pake BlackBerry, masa saya nggak! Malu dong*" atau alasan sejenis yang pada akhirnya membuat smartphone ini tidak bekerja secara optimal di tangan mereka. Paling hanya untuk mengakses *social network* layaknya Facebook dan Twitter juga layanan BBM yang memungkinkan mereka *ngobrol* dengan sesama pengguna smartphone ini.

Desember 2004, pengguna smartphone ini dinilai eksklusif, karena jumlah pemakainya masih sangat sedikit. BlackBerry baru masuk ke Indonesia pada tahun ini, dan hingga sekarang tahun 2011 harganya semakin mudah untuk dijangkau. "Pengguna BlackBerry terbanyak dunia saat ini ada di Amerika Serikat (AS) dan Kanada. Di AS sendiri penggunaannya berkisar satu juta orang. Saya rasa Indonesia tak lama lagi akan melampaui angka itu," kata Chief Marketing Officer Indosat, Guntur Siboro, di Jakarta, Jumat (31/7/2009). BlackBerry menjadi handphone sejuta umat, sana sini orang sibuk *BBMan* atau meng-*update new tweets* atau juga status Facebook.

Penulis sendiri merasa luar biasa terbantu dengan adanya smartphone ini. Karena apabila mampu digunakan secara bijak dan optimal tak ragu BlackBerry memberikan banyak keuntungan. Tetapi bagi anak muda Indonesia yang masih belum siap dan labil sehingga belum mempunyai prinsip dalam melakukan segala sesuatu, kecanggihan teknologi yang ditawarkan seakan membuat kita tinggal dalam dunia mistis, atau seringkali pengguna BlackBerry dibilang sebagai orang autis yang sangat asik dengan dunia nya sendiri.

Inilah pengingat untuk seluruh anak muda Indonesia, dari kasus RIM dan BlackBerry di Indonesia, kita masih harus banyak berbenah diri untuk belajar memiliki sikap berprinsip dan tidak cepat berbicara sebelum kita memahami betul konteks bahan pembicaraan keseluruhan. Jangan tong kosong nyaring bunyinya, jangan menjadi air di daun talas.

*) *Peserta PPSDMS Angkatan V Regional 1 Jakarta Putri, mahasiswa Fakultas Psikologi UI 2009.*

Minimalisir Dampak Bencana ²³

Oleh: Citra Amaliyah*)



Beberapa waktu lalu, kita sempat dikejutkan dengan terjadinya gempa serta tsunami yang terjadi di Jepang. Padahal masih lekat dalam ingatan kita bagaimana tsunami mampu memporak-porandakan bumi Aceh pada 26 Desember tahun 2004.

Tak hanya itu, tak terhitung berapa jumlah bencana yang terjadi di dunia ini hingga mampu menimbulkan banyak kerugian dan merenggut nyawa ratusan orang. Di Indonesia sendiri, sepanjang 2010, ada begitu banyak bencana yang melanda negeri ini, bahkan dua di antaranya tak luput dari kacamata dunia antara lain, gempa berkekuatan 7,7 SR di Mentawai dan meletusnya Gunung Merapi.

Dalam ilmu keselamatan dan kesehatan kerja, perilaku manusia (*human behavior*) memang menjadi aspek terpenting terjadinya sebuah kecelakaan atau bencana. Hal ini didukung pula oleh Heinrich yang pada tahun 1928 melakukan kajian terhadap data kompensasi kecelakaan kerja. Dari kajian tersebut diperoleh kesimpulan bahwa kecelakaan yang terjadi 80 persen disebabkan oleh *unsafe condition*, 18 persen akibat *unsafe act* dan dua persen penyebab yang tidak diperkirakan (*act of God*).

Menurut teori tersebut, meski perilaku menjadi sumber utama bencana akan tetapi tetap tidak dapat dipungkiri ada dua persen bencana yang terjadi tanpa penyebab yang dapat diperkirakan.

Sebagai negara yang rentan akan terjadinya bencana, Indonesia harus memiliki pedoman yang jelas dalam tanggap darurat bencana atau yang dalam ilmu keselamatan dan kesehatan kerja disebut *Emergency Response Plan (ERP)* atau Rencana Tanggap Darurat. *Emergency Response Plan* merupakan upaya yang dilakukan untuk meminimalisir dampak yang diakibatkan oleh bencana yang terjadi.

²³ Tulisan dimuat di Okezone.com kolom Suara Mahasiswa, 16 Maret 2011

Pedoman untuk *ERP* ini tak cukup hanya jika dibuat dengan baik, akan tetapi yang terpenting adalah bagaimana Emergency Response Plan ini bisa disosialisasikan kepada seluruh masyarakat. Sehingga ketika terjadi bencana, masyarakat tidak panik dan mengetahui hal apa yang pertama kali harus mereka lakukan.

Sejauh ini, *ERP* hanya digunakan dalam industri-industri besar untuk meminimalisir bencana yang mungkin terjadi akibat proses produksi. *ERP* meliputi evaluasi ulang struktur bangunan, memperhatikan tata letak lift dan emergency exit serta tempat-tempat yang sekiranya aman dari bencana, pencatatan nomor-nomor penting terkait bencana, memperhatikan tata letak barang (misalnya meletakkan barang yang lebih berat di bawah), dan yang terpenting tentunya adalah penyediaan alat-alat untuk penanggulangan bencana, misalnya seperti alat pemadam api ringan (APAR) jika terjadi kebakaran dan kotak P3K.

Salah satu bagian lain dari *ERP* adalah *safety induction*. *Safety induction* merupakan upaya sosialisasi kepada objek yang mungkin mengalami bencana untuk melakukan *ERP*. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena tanpa sosialisasi tentunya *ERP* tidak dapat dilaksanakan. *Safety induction* dapat berupa penjelasan langsung maupun video. Upaya lain yang dapat dilakukan untuk mensosialisasikan *ERP* adalah dengan simulasi bencana dan keadaan darurat.

Sayangnya Indonesia sendiri belum memiliki pedoman atau prosedur yang jelas mengenai *ERP*. Padahal seharusnya bencana yang selama ini terjadi membuat kita mulai berkaca dan berpikir untuk merancang sebuah proses atau prosedur dalam upaya tanggap darurat bencana alam serta menyiapkan sarana untuk evakuasi seperti ambulans yang memadai, infrastruktur komunikasi yang baik dan *survival equipment*. Dan yang tak kalah penting adalah upaya sosialisasi tanggap darurat itu sendiri terhadap masyarakat. Meski menghabiskan biaya yang relatif banyak, akan tetapi tentunya itu dapat meminimalisir meluasnya dampak kerusakan akibat bencana serta mengurangi jumlah korban bencana itu sendiri..

**) Peserta PPSDMS Angkatan V Regional 1 Jakarta Putri, mahasiswa Departemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja Fakultas Kesehatan Masyarakat UI 2008.*

Mahasiswa Apatis Tidak Semuanya Apatis²⁴

Oleh: Wahyu Awaludin *)



Dalam dunia kemahasiswaan, kita mengenal adanya istilah “mahasiswa apatis”. Memang belum ada definisi yang jelas, ketat, dan menyeluruh tentang siapa yang pantas disebut “mahasiswa apatis” ini, tapi dari berbagai tulisan teman-teman mahasiswa, untuk sementara kita bisa menyebut bahwa “mahasiswa apatis” adalah orang yang tidak mengikuti organisasi -khususnya organisasi politik. Lebih luas lagi, “mahasiswa apatis” adalah orang yang tidak mau bersinggungan dengan politik kampus.

Benarkah mahasiswa apatis itu benar-benar “apatis”? Apakah mahasiswa apatis itu benar-benar sebegitu buruknya?

Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang sedari dulu menggelayut di kepala saya. Saya belum mampu menemukan jawaban yang memuaskan dari pertanyaan itu. Pertama, karena definisi dari mahasiswa apatis itu sendiri belum jelas. Definisi di atas pun saya tentukan secara subyektif. Kedua, karena mahasiswa yang biasa kita sebut dengan istilah “apatis” itu pun belum banyak yang berbicara tentang alasan “keapatisan” mereka (ini jika kita memakai definisi “mahasiswa apatis” adalah mahasiswa yang tidak bersinggungan dengan organisasi kampus). Di artikel ini, saya akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas.

Menurut saya, ada beberapa alasan mengapa seseorang menjadi apatis.

Pertama, ekonomi. Saya mempunyai seorang teman. Dia datang seorang diri dari rumahnya di Surabaya. Di UI ini, dia kuliah dengan biayanya sendiri, bekerja membanting tulang. “Rasanya gue pengen deh ikut organisasi, tapi gak punya waktu nih masalahnya,” ungkapnya beberapa kali pada saya. Dia ingin, tetapi tidak bisa. Dan dia memutuskan untuk menjadi apatis karena keadaan ekonomi.

²⁴Tulisan dimuat di AnakUI.com 17 Desember 2010.

Kedua, cara berjuang yang berbeda. Para mahasiswa organisatoris selalu mengatakan bahwa mereka berjuang demi rakyat, atau setidaknya mencoba berkontribusi. Sejatinya, begitu pula lah niat beberapa mahasiswa apatis yang lain. Mereka mencoba berkontribusi, tetapi bukan dengan jalan masuk BEM atau organisasi lainnya. Mereka mempunyai pemikiran sendiri tentang kontribusi itu. Mereka meyakini dan menjalaninya. Saya akan menyebutkan beberapa bidang:

- a. Entrepreneurship. Ada seorang teman saya di salah satu fakultas di UI mengeluh. Katanya, dia disindir sebagai orang yang apatis. Padahal, teman saya ini selalu bilang kepada saya bahwa di jalan entrepreneurship lah dia mengabdikan kepada bangsa ini. Dengan bangga dia mengatakan pada saya bahwa dia telah mempekerjakan beberapa orang. Lalu, dia bertanya, "Apa yang gue lakukan ini konkret untuk mengatasi pengangguran. Lalu, hal konkret apa yang sudah dilakukan mereka yang mengaku tidak apatis?".
- b. Organisasi ekstra kampus. Seorang teman mengatakan bahwa salah satu alasannya apatis (di kampus) dan memilih organisasi ekstra kampus adalah karena dia memang tidak tertarik ke arah internal kampus. Eksternal kampus menjanjikan hal yang lebih banyak, katanya. Jaringan, pembelajaran yang lebih konkret, profesionalisme, kesimpulan, dan banyak hal lain.
- c. Kepenulisan. Bisa jadi ada mahasiswa yang memilih jalur murni kepenulisan dan apatis terhadap hal lain. Dia memilih menginspirasi orang lewat tulisannya dan dengan sadar ia memilih apatis. "Gue cuma pengen fokus aja di bidang gue", katanya.
- d. Entertainment. Teman saya ada yang meniti karirnya di dunia hiburan dari sekarang (saat kuliah) dan memilih apatis dari hal lainnya. Di lain sisi, dia sangat bersemangat mengejar mimpinya di dunia hiburan. Dia ikut les musik ini-itu, manggung di sana-sini, dan hal lain yang berhubungan dengan bidangnya.

Ketiga, karena tidak tahu. Seringkali kita tidak mau melakukan sesuatu karena tidak tahu manfaatnya. Kita apatis karena kita tidak tahu apa manfaatnya kalau kita menjadi aktivis. Kita menganggap itu perbuatan yang sia-sia, karena itulah kita memilih menjadi apatis. Untuk orang yang satu ini, kita hanya perlu mendidik mereka dan berdialog saja.

Keempat, malas. Ketiga poin alasan di atas saya masukkan kategori masih lumayan baik. Namun, untuk alasan yang keempat ini, saya berpendapat berbeda. Malas, egois, tidak peduli, semau gue, apa urusannya sama gue, yang penting gue senang, dan sederet alasan lain itu adalah virus mematikan bagi kemanusiaan dan daya kritis mahasiswa.

Jadi, menurut saya, kepatisan dari seorang mahasiswa janganlah langsung divonis buruk begitu saja. Saya yakin ada alasan-alasan yang melatarbelakanginya mengambil keputusan itu. Latar belakang itulah yang harus kita cari dan selesaikan.

**) Peserta PPSDMS Angkatan V Regional 1 Jakarta Putra, mahasiswa Departemen Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya UI 2008*



PEREMPUAN



Bagai Sang Surya, Ibu Menerangi Dunia²⁵

Oleh: Aisyah Bidara*)



*Kasih ibu kepada beta
tak terhingga sepanjang masa..”*

Hati mana yang tidak tergetar ketika nama ibu disebut. Wanita baik hati yang penuh kasih sayang dan kehangatan telah merawat dan membesarkan kita dari kecil hingga dewasa. Seorang sosok mulia yang bahkan lebih dari seorang pahlawan tanpa tanda jasa. Berjuang tanpa henti demi kebahagiaan anaknya. Sosok ibu begitu lekat dengan kehangatan dan kelembutan, bahkan lebih itu, sosok ibu melukiskan sebuah keikhlasan dan ketulusan.

Ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya, karena melalui ibu-lah semua pelajaran hidup pertama kali diajarkan. Segala tingkah laku, sikap dan sifat seorang ibu akan menjadi teladan yang langsung dipraktekkan sang anak tanpa harus ditanyakan esensinya. Perkataannya mengandung kebijaksanaan dan menjadi kata-kata yang menentramkan hati manakala gundah hadir dalam kehidupan kita. Maka sudah sepatutnya-lah anak berbakti kepada orang tuanya, membahagiakannya dan membuatnya tersenyum bangga dan tidak menyesal karena telah melahirkan kita.

Tidak heran jika banyak orang mencari cara untuk berterima kasih pada ibu, salah satunya dengan membuat peringatan hari Ibu setiap tanggal 22 Desember. Namun jika kita membuka lembaran sejarah, kita akan menemukan peristiwa yang melatari sejarah Hari Ibu di Indonesia. Sejarah Hari Ibu mengambil semangat dari Kongres Perempuan Indonesia I yang diselenggarakan di Yogyakarta pada tanggal 22-25 Desember 1928. Kongres ini bisa dikatakan merupakan imbas dari peristiwa Sumpah Pemuda kepada kalangan perempuan, terjadi hanya sekira 2 bulan setelahnya.

Ada semacam semangat dan tanggung jawab untuk menyamakan derap agar dapat berkontribusi untuk bangsa dan negara. Terdapat sekira 30 organisasi perempuan dari 12 kota di Jawa dan Sumatera yang hadir dalam kongres tersebut.

²⁵ Dimuat di Okezone.com kolom Suara Mahasiswa 21 Desember 2010.

Jika dilihat dari esensinya, tampak sekali terlihat bahwa peran ibu dan sejarah lahirnya hari ibu tidak memiliki keterkaitan ataupun korelasi antara satu dengan yang lainnya. Peran seorang ibu begitu kompleks. Ia menjalani beberapa pekerjaan dalam waktu yang bersamaan serta menciptakan kondisi yang nyaman dalam keluarganya.

Jika kita ingin memberikan suatu hadiah, maka tidak perlu menunggu hingga datangnya hari ibu, karena kasih ibu sepanjang masa. Hadiah yang hanya kita berikan satu tahun sekali itu tidak setara dengan semua yang telah ibu berikan pada kita.

Seorang ibu tidak pernah mengharapkan balasan dari anaknya karena baginya, kebahagiaan anak adalah kebahagiaan dirinya. Namun sebagai anak yang berbakti sudah sewajarnya kita menunjukkan rasa kasih sayang dan cinta kita pada ibu dengan memberikannya perhatian lebih, kecupan di pipi, salam manis mencium tangannya. Perhatian-perhatian kecil itulah yang akan menjadikannya bahagia, bukan perhatian dalam satu tahun sekali, sedangkan tidak acuh di waktu lainnya.

Terlalu banyak pengorbanan yang telah ibu berikan pada kita. Kasihnya yang luar biasa dahsyat akan menjadi spirit dan semangat bagi kita untuk terus berjuang melanjutkan hidup. Maka cintailah ibu kita, karena ia hanya satu dan tak akan pernah terganti oleh apapun. Bagai sang surya, ibu menerangi dunia; duniamu, duniaku dan dunia kita semua!

**) Peserta PPSDMS Angkatan V Regional 1 Putri Jakarta, mahasiswa Departemen Geografi Fakultas MIPA Universitas Indonesia 2009.*

Refleksi Hari Ibu: Titik Tolak Menuju Indonesia Bermartabat²⁶

Oleh: Neti Triwinanti*)



Berbicara tentang ibu memang tak akan pernah ada habisnya. Ia adalah sosok yang bersahaja namun selalu mempesona. Bagaimana tidak? Seorang ibu selalu mempunyai telinga yang cukup lebar untuk mendengarkan setiap rajukan dan keluh kesah anaknya, tak peduli kapan ataupun dimana. Ya, ia memang pendengar terbaik bagi anak-anaknya.

Sentuhan ibu mampu meredam amarah yang bergejolak dan emosi yang memuncak. Usapan lembutnya mampu mengafirmasi kesembuhan setiap luka dan kesedihan. Entah dengan apa, yang jelas kehadiran ibu selalu menghasilkan ketentraman di hati anak-anaknya. Begitu istimewa. Ia mampu merekatkan hati yang patah, mendekatkan yang jauh, merajut kedamaian, dan melerai perselisihan. Tak heran ia menjadi sosok teladan sekaligus teman yang menyenangkan.

Maka sangat wajar ketika akhirnya terciptalah hari istimewa untuk sosok yang istimewa, hari ibu. Sudah seharusnya momentum langka yang hanya terjadi 24 jam dalam satu tahun ini tidak hanya diisi oleh ungkapan-ungkapan terima kasih saja, tetapi juga disertai langkah nyata demi kemajuan kaum ibu dan juga pertiwi, Indonesia. Langkah nyata ini tidak bisa berjalan jika hanya berasal dari satu pihak. Perlu koordinasi dan sinergisitas antara lembaga, pemerintah, kaum ibu, dan masyarakat Indonesia pada umumnya untuk memajukan wanita, khususnya ibu di Indonesia. Inilah bentuk penghargaan yang sesungguhnya.

Hal utama yang harus dibenahi di Indonesia terkait dengan ibu adalah masalah kesehatan, terutama kesehatan pada masa reproduksi. Menurut data WHO, Indonesia berada pada peringkat teratas angka kematian Ibu pada saat kehamilan dan persalinan se – ASEAN. Setiap tahunnya terdapat sekitar 4.500.000 wanita melahirkan di Indonesia dan 15.000 hingga 18.000 di

²⁶ Tulisan dimuat di Okezone.com kolom Suara Mahasiswa 23 Desember 2010.

antaranya mengalami komplikasi yang menyebabkan kematian. Hal ini mencerminkan bahwa di Indonesia, kesejahteraan kaum wanita belum diperhatikan secara penuh. Bukankah mereka juga seorang ibu yang berhak merasakan penghargaan?

Sayangnya ternyata hingga hari ini momentum hari ibu belum cukup kuat untuk menginspirasi munculnya pergerakan massif demi kemajuan para ibu di Indonesia. Kalaupun ada, pergerakan ini masih bersifat kecil dan terkotak-kotak, arah vektornya pun berbeda sehingga menghasilkan resultan yang tidak terlalu berpengaruh bagi bangsa. Momentum hari ibu ternyata masih sebatas kultural keluarga yang mungkin tidak semua ibu di Indonesia dapat merasakannya: merasakan kebanggaan menjadi seorang ibu.

Hal kedua yang perlu untuk diperhatikan dan dibenahi adalah masalah pendidikan. Seorang ibu merupakan sekolah pertama bagi anak-anaknya, tempat belajar pertama yang dikenal oleh generasi penerusnya. Maka sudah seharusnya setiap calon ibu di Indonesia mempunyai akses yang mudah untuk mendapatkan pendidikan. Realitas yang ada membuktikan bahwa kualitas seorang ibu, bergantung dengan pengetahuan, informasi, dan keterampilan yang dimilikinya. Dalam meraih kesuksesan dengan multi fungsi dan peran yang diembannya, seorang ibu tidak hanya sekedar dituntut untuk bekerja keras, namun juga bekerja cerdas. Maka, pendidikan adalah suatu keharusan. Sudah saatnya Indonesia mencetak generasi-generasi yang lebih baik melalui kaum ibu yang cerdas dan hebat.

Dua poin utama tersebut –kesehatan dan pendidikan bagi ibu dan calon ibu- merupakan PR utama yang harus segera diselesaikan. Ketika akhirnya dihasilkan sinergisitas dan titik temu untuk permasalahan-permasalahan tersebut, dapat dipastikan bahwa menjadi bangsa yang bermartabat bagi Indonesia adalah suatu keniscayaan. Semoga.

**) Peserta PPSDMS Angkatan V Regional 1 Jakarta Putri, mahasiswa Departemen Farmasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia 2008.*

Kontradiksi Antara Peran dan Kesehatan Ibu²⁷

Oleh: Citra Amaliyah *)



Kemajuan sebuah bangsa bisa dicapai lewat tangan-tangan hebat sang ibu yang mendidik dan membesarkan anaknya. Itulah mengapa ibu sering kali disebut arsitek peradaban. Begitu pula derajat kesehatan sebuah bangsa. Kesehatan ibu menjadi representasi bagi kesehatan anaknya kelak ketika ia lahir. Oleh karena itu, kesehatan ibu dan calon-calon ibu harusnya menjadi fokus masalah yang mendapat penanganan utama.

Menurut departemen kesehatan, meski angka kematian ibu telah mengalami penurunan dari 307 per 100.000 kh pada tahun 2003 menjadi 228 per 100.000 kh pada tahun 2007 tetapi penurunan angka tersebut masih dinilai lamban. Angka kematian ibu di Indonesia masih menempati posisi teratas di Asia Tenggara. Bahkan Thailand yang merupakan negara yang secara ekonomi tidak berbeda jauh dengan Indonesia, mampu menurunkan angka kematian ibu dari 400 per 100.000 kh menjadi 80 per 100.000 kh dalam kurun waktu 24 tahun. Sebuah tantangan besar bagi Indonesia untuk mengatasi masalah KIA tersebut. Apalagi penurunan angka kematian ibu yang merupakan salah satu target *Millenium Development Goals* diproyeksikan akan terwujud pada tahun 2015.

Ternyata, salah satu penyebab tingginya angka kematian ibu adalah anemia. Anemia memang lebih banyak menyerang kaum perempuan karena siklus alamiah yang dialaminya, seperti haid atau melahirkan. Tapi jangan pernah mengira bahwa anemia merupakan penyakit yang tidak berbahaya. Ketika dalam kondisi hamil, anemia dapat menyebabkan abortus, perdarahan pasca melahirkan, infeksi dan sebagainya. Tidak cukup sampai di situ, penyakit anemia ini juga sifatnya siklik, maksudnya ketika sang ibu mengalami anemia, maka anaknya pun cenderung anemia. Padahal anemia ini bisa dicegah apabila sang ibu memiliki kesadaran untuk melakukan pola hidup sehat.

²⁷ Tulisan dimuat di Okezone.com kolom Suara Mahasiswa 20 Desember 2010.

Peran strategis seorang ibu ternyata belum cukup membuatnya menjadi perhatian. Hal ini terlihat dengan keberadaannya yang selalu menjadi kaum nomor dua. Sering kali, perempuan tak memiliki kesempatan yang sama dalam mengenyam pendidikan. Hal tersebut terjadi karena anggapan bahwa perempuan hanya akan bekerja mengurus rumah tangga. Padahal bukankah akan lahir generasi-generasi hebat lewat ibu yang cerdas? Bagaimana seorang ibu dapat mendidik anaknya dengan baik jika tidak cukup memiliki pengetahuan yang memadai. Tingkat pendidikan yang rendah pada perempuan ini pula yang menjadi penyebab rendahnya awareness mereka terhadap kesehatan dirinya maupun sang calon anak.

Seperti yang dikembangkan oleh Godfrey, Hochbaum, Irwin dan Rosentock, para ahli psikologi yang berkecimpung dalam dunia kesehatan, dalam teori *Health Belief Model*. Mereka mengemukakan bahwa untuk berperilaku sehat, seseorang akan dipengaruhi oleh persepsi dan keyakinannya akan manfaat dari perilaku sehat tersebut. Dan persepsi serta keyakinan tersebut dipengaruhi oleh pengetahuan yang memadai.

Selama perempuan masih menjadi kaum nomor dua dan tidak mendapatkan perhatian utama maka sampai kapanpun penurunan angka kematian ibu dan anak hanya akan menjadi wacana.

**) Peserta PPSDMS Angkatan V Regional 1 Jakarta Putri, mahasiswa Departemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia.*

Era Digital Membuat Perempuan Berani “Bicara”²⁸

Oleh: Haniva Az Zahra *)



Banyak perempuan sebelum Kartini yang juga hebat dan menginspirasi, layaknya Cut Nyak Dien yang menggantikan suaminya memimpin Perang Aceh, Indonesia memiliki perempuan tangguh yang tidak lemah juga tidak terbatas perannya dalam dapur, kasur, dan sumur. Mereka berjuang lalu membuktikan bahwa perempuan itu setara, memang melengkapi laki-laki, tetapi bukan hanya sebatas itu. Perempuan bisa menjadi pemimpin dan apa yang dikatakan pun bukan pepesan kosong tak bernyawa.

Sayangnya Cut Nyak Dien kalah terkenal dibandingkan Kartini. Kartini menjadi tokoh kebangkitan perempuan pribumi karena ia menulis, sedang Cut Nyak Dien tidak. Maka pelajaran besar dari peristiwa itu, bahwa menulis membuat kita dikenal lebih banyak orang, dikenang, dan dipercaya bahwa perempuan pun punya kemampuan. Cut Nyak Dien tidak sempat menulis, ini bukan berarti dia bodoh, tetapi Kartini yang sempat menulis membuat ia dianggap sebagai wanita modern. Wanita modern adalah wanita yang berani memperjuangkan haknya dan mampu bersikap mandiri.

Pemikiran Kartini menjadi pola pikir bagi masyarakat luas, bahwa perempuan punya hak yang sama dalam pendidikan. Perempuan pun berhak cerdas, penuh pengetahuan, kemudian “berbicara” dan berbagi untuk saling membuat hebat satu sama lain. Makhluk ini persis seperti keramik dari tanah liat, terlihat rapuh dari luar, tetapi begitu kuat karena tahan banting. Seperti itu, dimana perempuan terlihat tak berdaya, sesungguhnya begitu banyak daya.

Menulis, menjadi sesuatu yang amat penting. Karena hanya dengan itu, pemikiran perempuan dapat dikenang. Apalagi dalam era digital seperti ini, dimana arus keterbukaan informasi informasi deras. Perempuan mampu berpartisipasi menyampaikan gagasan. Sehingga teriakan emansipasi bukan hanya dengan omong kosong biasa, era digital ini membuat perempuan

²⁸ Tulisan ini terpilih menjadi 20 tulisan yang dibukukan oleh Hasfa Publishing dengan judul Buku “Peran Perempuan di Era Digital, Mei 2011

lebih berani "bicara". Jelas, perempuan punya peran. Perempuan ikut menentukan apa saja informasi yang beredar dan membentuk pemikiran masyarakat.

"You educate a man; you educate a man. You educate a woman; you educate a generation." (Brigham Young). Memberikan pendidikan kepada perempuan melalui kebebasan untuk berekspresi dan mengambil informasi dari dunia digital seperti era inilah pendidikan modern bagi perempuan. Maka, benar apa yang Brigham Young katakan, pendidikan yang diberikan kepada perempuan turut berarti pendidikan pada satu generasi. Akan ada banyak generasi yang tumbuh dengan wawasan yang luas serta kemampuan bersikap kritis sebagai akibat dari sebab keterbukaan akses informasi terhadap perempuan.

Jika perempuan pegang kunci tentang informasi, itu tidaklah semata untuk dirinya sendiri. Itulah perempuan, yang menjadi malaikat bagi setiap bayi yang lahir, juga sebagai ibu yang mengayomi dan memenuhi kebutuhan di masa perkembangan awal. Perempuan adalah pendidik generasi dengan pemikiran-pemikiran yang abadi dalam tulisan. Pemikiran Kartini menjadi fenomena yang diagungkan, maka pemikiran baik kita setidaknya mampu menggerakkan masa agar mau berlatih dan memperjuangkan sambil menunggu.

Era digital tidak membuat perempuan makin terkekang dan dirugikan, tetapi perempuan dianggap belum siap untuk menghadapi informasi yang harus dipilah. Era digital memfasilitasi mana informasi yang penting dan tidak penting. Serta mana yang harus dibagi pada semua perempuan yang bekerja dan berkarya dibidangnya masing-masing. Perempuan menjadi semakin berani, tidak lagi takut ditertawakan karena salah, atau juga hanya menahan perasaan diri melihat ketidakberesan.

Tetapi era ini juga tidak bermanfaat apabila perempuan hanya konsumen, mengambil banyak informasi kemudian stuck disana. Padahal ada harapan bahwa komunikasi timbal balik menjadi sesuatu yang lebih matang lagi. Maka kesempatan berbagi akan pemikiran-pemikiran baru menggeser posisi perempuan menjadi lebih tinggi lagi.

Tak cukuplah kita berteriak atas nama paham feminisme. Tetapi tulisan yang kita hadirkan adalah bukti nyata bahwa perempuan memang setara, mampu berdiri sama tegak, bisa menjadi pihak yang memberikan solusi untuk permasalahan. Jadi, bukan lagi penting membicarakan hal melalui diskusi berkali-kali. Tulislah, kemudian kirimkan ke media masa. Biarkan seluruh orang membacanya, menyelami cara pikir serta sudut pandang, dan upaya membuat cerdas perempuan.

Era digital membantu perempuan untuk kemajuan bangsa dan negara. Perempuan terhadap laki-laki tidak menjadi masalah besar, tidak juga jadi permasalahan berat. Hal paling penting adalah perempuan mampu bijak dalam menulis, memilah informasi, karena dia tahu bahwa permainan inilah salah satu faktor yang membuat anak rileks dan seolah mengerti bahwa bundanya sedang mendidik generasi Indonesia yang lebih baik dan bermartabat.

**) Peserta PPSDMS Angkatan V Regional 1 Jakarta Putri, mahasiswa Fakultas Psikologi UI 2009.*

Kisah Inspiratif 'Ibu Pertiwi'²⁹

Oleh: Nisa Yulianti Suprahman *)



// Ibu pertiwi", sebuah personifikasi nasional Indonesia. Penggunaan kata "Ibu" dalam hal ini merefleksikan betapa Bangsa Indonesia memandang seorang Ibu sebagai sosok yang memiliki peran strategis dalam perkembangan sebuah Bangsa. Betapa seorang ibu begitu menginspirasi, hingga melalui diksi "Ibu Pertiwi", bangsa Indonesia mengungkapkan harapannya bahwa kedekatan antara Bumi Khatulistiwa dengan bangsanya bagaikan kedekatan seorang ibu dengan anaknya.

Ya, betapa ibu adalah sosok yang sangat inspiratif. Ia tidak hanya menginspirasi segelintir orang, tapi juga sebuah bangsa. Ibu sebagai sosok pengambil keputusan yang handal, ibu sebagai sosok yang setegar karang, dan ibu sebagai embun yang menyejukkan di tengah panas terik dunia.

Seorang ibu, begitu kerap berada di persimpangan jalan. Ia dituntut untuk mengambil keputusan strategis bagi hidupnya, yang akan memberikan pengaruh besar bagi keluarganya. Pilihan mengenai profesi saat berumah tangga adalah satu dari banyaknya contoh. Ibu seringkali harus memutuskan peran yang akan digeluti selama berkeluarga. Untuk menjadi wanita karier, ibu rumah tangga, atau bahkan mengambil kedua peran. Tak ada nilai sempurna untuk salah satu pilihan, dan tak ada nilai fatal untuk ketiganya. Hal ini adalah situasi yang biasanya memberikan dampak kebimbangan, kecemasan dan ketakutan. Namun dengan naluri seorang ibu, ia berhasil memiliki kekuatan yang sangat dahsyat dalam memutuskan dan menghadapi segala konsekuensinya, serta mengubah setiap keadaan menjadi peluang.

Tak ada yang dapat memungkiri betapa ibu menjalani perjuangan yang berat sejak menjalankan tugas pertamanya. Ia berada dalam keadaan payah yang kian bertambah selama 9 bulan. Kemudian ia mempertaruhkan nyawa ketika melahirkan. Dan ia menggadaikan pikiran, hati dan raganya selama membesarkan generasi masa depan. Tak mudah memang untuk

²⁹ Tulisan dimuat di Okezone.com kolom Suara Mahasiswa 15 Desember 2010.

menjadi setegar karang, terutama ketika berbagai ombak ujian kehidupan datang. Lagi dan lagi, ibu melewati berbagai macam tantangan demi keluarganya. Ia tetap tegar meski lututnya telah lelah tegak berdiri dan tetap tersenyum meski lisannya ingin sekali mengeluh.

Kekuatannya ini membuat seisi keluarga menjadikannya sebagai tempat bercerita, berkeluh kesah, menangis dan meminta nasihat. Ibu tak hanya kuat, tapi juga menguatkan. Begitu menguatkan, hingga Michael Jordan mengungkapkannya, *"My mother is my root, my foundation. She planted the seed that I base my life on, and that is the belief that the ability to achieve starts in your mind"*.

Ibu memang setegar karang, tapi ia tak pernah kehilangan kemampuannya untuk menjadi embun yang menyejukkan. Dengan atau tanpa kata-kata cinta, kelembutan seorang ibu selalu menyejukkan keluarganya. Ia begitu hangat, meski tanpa secangkir teh yang disajikannya di pagi hari. Ia menjadi oase ketika keluarganya lelah akan perjuangan kehidupan. Ia selalu dapat memaafkan anaknya yang kerap melakukan kesalahan. Ia tak pernah bosan membimbing anaknya. Ia selalu bisa melembutkan kembali hatinya ketika kerasnya ombak selalu berusaha memberi ia kekebalan.

Tak dipungkiri lagi, begitu banyak sumbangan inspirasi yang diberikan ibu melalui dunianya. Sudah saatnya kita tidak hanya mengagumi, tapi juga meneladani. Karena sebuah karya nyata adalah bingkisan yang sangat istimewa bagi seorang ibu yang telah dan akan selalu berjuang bagi buah hatinya. Jalan perjuangan yang ditempuhnya harus segera kita jawab dengan mewujudkan harapan-harapannya. Segala kekhawatirannya harus segera kita hapus dengan sebuah pembuktian mengenai karakter mengagumkan yang berhasil ia tanamkan. Ini saatnya untuk kita membalas. Sudah saatnya kita menguatkan, setelah begitu teguh ia memberi kekuatan. Dan sudah saatnya kita menenangkan, setelah begitu ikhlas ia memberikan ketenangan.

**) Peserta PPSDMS Angkatan V Regional 1 Jakarta Putri, mahasiswa Departemen Farmasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia 2008.*

Gerakan Baru Pemberdayaan Perempuan³⁰

Oleh: Noviandri Nurlaili K. *)



Profesor Sri Edi Swasono sekali waktu pernah berujar dalam mata kuliah Sistem Ekonomi, “Perempuan itu adalah asst bangsa yang akan terus menjadi beban selama tidak terberdayakan”.

Kenyataannya, Selama periode 2001-2004, jumlah TKW mencapai 1.047.130 orang atau sebesar 77,1% dari total TKI di luar negeri yang mencapai 1.357.703 orang. Padahal, sumbangan devisa negara yang berasal dari Tenaga Kerja Indonesia (TKI) masih menduduki urutan kedua terbesar setelah sektor minyak dan gas. Data Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi sampai September 2004 menunjukkan bahwa sumbangan devisa tenaga kerja Indonesia mencapai US\$170,87 juta. Sebagian besar dari devisa tersebut berasal dari TKW, khususnya dari sektor informal. Devisa TKI menyumbang kontribusi sebesar 0,7% terhadap PDB dan mencapai 50% dari investasi asing langsung (FDI), serta hampir mencapai 75% aliran modal resmi masuk ke dalam negeri (*official capital inflows*).

Hal ini membuktikan satu hal bahwa memang perempuan memanglah memiliki kontribusi penting dalam kehidupan berbangsa dan bertanah air, khususnya dalam kasus di atas adalah dalam sektor ekonomi. Kasus TKW di atas hanyalah satu bentuk kecil kontribusi seorang perempuan dari hal yang paling minimalis, yaitu tenaga kasarnya.

Bentuk kontribusi lain yang bisa kita banggakan dari seorang perempuan adalah apa yang diperjuangkan oleh seorang perempuan hebat yang sederhana, Ibu Tri Mumpuni. Beliau mencoba untuk memberdayakan desa melalui penghidupan sumber tenaga listrik alternatif. Satu hal yang penulis ingat dari motivasi beliau adalah “Kita mencoba memberdayakan bangsa melalui desa. Namun selama ketergantungan terhadap listrik dari pusat masih tinggi, maka semua perubahan itu akan terasa sangat sulit.”. Sebuah kepedulian yang merupakan naluri dasar seorang wanita yang disertai dengan inisiatif pembaharu perubahan.

³⁰ Tulisan dimuat di Okezone.com kolom Suara Mahasiswa 19 Desember 2010.

Maka pemberdayaan perempuan saat ini seharusnya bukanlah sebuah gerakan yang terbatas pada perlindungan atas hak-hak perempuan dan isu kesetaraan gender. Gerakan baru pemberdayaan perempuan adalah sebuah gerakan entitas yang melindungi, mengedukasi, dan mengembangkan potensi penuh seorang perempuan. Seorang perempuan sebagai seorang warga negara dengan hak dan kewajiban yang dilindungi negara, seorang perempuan sebagai potensi penggerak kemajuan bangsa, dan seorang perempuan sebagai Ibu yang akan melahirkan anak-anak pemimpin bangsa.

Bentuk gerakan pemberdayaan perempuan saat ini kebanyakan terbatas pada konteks perlindungan perempuan. Hal ini dapat berbentuk advokasi perempuan dalam keikutsertaan dalam kegiatan publik, perlindungan terhadap kekerasan di rumah tangga, dan sejenisnya. Sebuah model gerakan lama dalam pemberdayaan perempuan, PKK, tampak redup dalam beberapa tahun terakhir. Padahal model pemberdayaan perempuan ini justru yang penulis rasa paling efektif dalam upaya pencapaian sasaran perlindungan hak perempuan. Mengapa demikian?

Hal ini dikarenakan karena kadang bentuk pemberdayaan perempuan yang menuntut perlindungan terhadap hak seseorang melupakan satu hal yang paling esensial, yaitu pembuktian. Perempuan, seperti layaknya setiap orang termasuk laki-laki pasti ingin diakui keberadaannya di tengah masyarakat. Maka setiap orang berlomba untuk melakukan sesuatu, mencari bentuk kontribusi yang bisa mengangkat namanya.

Para lelaki banyak memilih jalur politik sebagai jalan eksistensi ini. Namun perempuan keterlibatannya dalam parlemen pun tidak sampai hingga 10% meskipun jatah yang telah disediakan hingga 30%. Padahal sebagaimana masyarakat menghargai seorang politisi berdasarkan kontribusi yang telah diberikan kepada masyarakat, maka pengakuan keberadaan seseorang mutlak didasarkan pada apa yang telah dilaksanakannya.

Alasan hak seorang perempuan sering terabaikan adalah karena tidak ada dorongan dan ruang yang memadai untuk ikut serta dalam ruang publik. Kalaupun ada, maka kemampuan dari para perempuan inilah yang belum siap. Maka sebuah gerakan baru untuk pemberdayaan perempuan adalah soal bagaimana melindungi, mengedukasi, dan mengembangkan potensi seorang perempuan agar mampu tampil di hadapan publik dan menjadi agen yang menggerakkan kemajuan bangsa. Kelak dengan segala pembuktian yang dilakukan, keberadaan perempuan akan dengan sendirinya akan dianggap sama kompetitifnya dengan kaum Adam.

Maka merefleksikan pada kata-kata Prof Sri Edi yang dikutip di awal tulisan ini, selama pemberdayaan perempuan tidak dapat benar-benar memberdayakan perempuan dalam konteks seharusnya, seorang anak gadis, remaja perempuan, dan ibu-ibu bangsa hanya akan terus menjadi beban bangsa yang direnggut haknya.

Selamat hari Ibu, Selamat menjadi Perempuan Penggerak Bangsa!

**) Peserta PPSDMS Angkatan V Regional 1 Jakarta Putri, mahasiswa Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia 2008.*

Satu Lagi Potensi Perempuan³¹

Oleh: Haniva Az Zahra *)



*"Women are like teabags;
you never know how strong they are until they're put in hot water."*

(Eleanor Roosevelt)

Masih tentang perempuan, sosok yang begitu luar biasa. Layak diberikan kesempatan untuk membuktikan bahwa memang perubahan besar di dunia dimulai dari tangan mereka. Merekalah penggerak, merekalah yang memulai, dan juga merekalah yang terakhir berhenti. Bahwasanya mereka selalu ada dan berperan walau seringkali kita tidak memperhatikan.

Salah satu kisah yang paling terkenal adalah tentang kebangkitan Bangladesh yang dimulai dari kaum perempuannya. Di negara ini terdapat banyak janda yang dibatasi akses kehidupannya oleh negara, mereka hidup sangat miskin, mereka sangat sulit memperoleh pekerjaan yang layak agar mampu mendapatkan kehidupan yang normal. Mereka dianggap "sampah" karena tidak lagi berguna dan menjadi layaknya "barang bekas". Kemudian, tersebutlah seorang bijak bernama Muhammad Yunus, beliau begitu peka karena menyadari bahwa keberadaan perempuan bisa mendobrak perekonomian menjadi lebih baik. Betapa ternyata perempuan begitu rela berkorban, mereka menjadi tulang pulang keluarga setelah ditinggal pergi suaminya. Apapun dilakukan agar bisa mengepulkan dapur memberi makan kepada anak-anaknya. Mereka mengirik gabah dari batangnya, pekerjaan yang melelahkan tetapi sedikit menghasilkan. Tapi apa daya? Itulah yang bisa mereka kerjakan. Atau mereka meminjam uang kepada rentenir sebagai modal sebesar 5 taka (22 sen dollar) untuk membuat bangku dari anyaman bambu, kemudian menjualnya lagi kepada rentenir sebesar 5 taka 50 poysha. Keuntungannya hanya 50 poysha dan itu hanya setara dengan 2 sen dollar. Betapa berat kerja mereka.

Kemudian Yunus hadir memberikan solusi, utang mereka dibayar lunas serta diberikan pinjaman uang untuk modal usaha. Karena perempuan memang seorang pekerja keras, mereka pahami betul bahwa pinjaman adalah kesempatan untuk merubah kehidupan menjadi lebih baik dan tidak membayar pinjaman tepat pada waktunya adalah tanda tidak boleh meminjam

³¹ Tulisan dimuat di Okezone.com kolom Suara Mahasiswa 22 Desember 2010.

lagi. Inilah jaminan yang sesungguhnya dan mereka tak terlambat membayar pinjaman. Pinjaman ini diberikan kepada 7 juta orang miskin di 73.000 desa di Bangladesh, 97 persen dari peminjam nya adalah perempuan. Dan sistem ini berhasil mengeluarkan begitu banyak orang dari lingkaran setan kemiskinan.

Hal ini membuktikan bahwa perempuan memiliki manajemen waktu serta manajemen uang yang baik. Mereka cenderung lebih dapat dipercaya untuk diberikan pinjaman, serta relatif dapat bertanggung jawab dan menepati janji mereka. Perempuan tak pernah mau menyerah dan berputus asa, kemudian menunggu uluran tangan, tetapi aktif berusaha mencari semaksimal mungkin menjadi pilihan hidup yang diambil. Perempuan belajar bagaimana memajemen dirinya dengan baik sejak kecil. Mereka mempelajarinya melalui keluarga. Melalui banyak aktivitas seperti manajemen rumah tangga dengan merapihkan rumah, memasak makanan, menjaga kebersihan, memncuci baju kotor, membuat kopi untuk bapak, dan juga aktivitas rumah lainnya yang tidak pernah mempunyai waktu istirahat. Juga membantu menjaga adik sebagai bekal perempuan untuk mengurus anaknya sendiri. Pada akhirnya sangat logis apabila perempuan dewasa pada umur yang lebih cepat serta memiliki kontrol diri yang baik.

Misra dan Mc Kean (2000) menuliskan bahwa perempuan cenderung memiliki *time management* yang lebih baik daripada laki laki dikarenakan mereka memiliki pengalaman tingkat stress yang lebih tinggi daripada laki-laki. Perempuan lebih cepat stres, tetapi juga cepat pulih dan menguasai keadaan. Justru pengalamannya berada dalam tumpukan masalah membuatnya semakin kuat dan mampu menciptakan keadaan yang lebih baik. Satu yang dibutuhkan oleh kaum perempuan, yaitu kepercayaan. Karena jika perempuan sudah dipercaya, mereka akan sekuat tenaga tidak akan pernah mengecewakan. Perempuan siap memberikan performa terbaik, siap unjuk gigi, siap juga bersaing di barisan terdepan. Berteriak akan kesempatan untuk emansipasi, untuk juga maju mengikuti perkembangan zaman, tetapi bukan untuk melupakan fitrahnya sebagai perempuan melainkan untuk membuktikan kepada dunia bahwa kaum perempuan adalah kaum yang kuat. Bertambah kuat apabila berada dalam air panas, bertambah kokoh jika diterpa badai yang kencang.

*) Peserta PPSDMS Angkatan V Regional 1 Jakarta Putri, mahasiswa Fakultas Psikologi UI 2009.

Setiap Hari adalah Hari Ibu³²

Oleh: Ridwan Kharis *)



*"Bila kau sayang pada kekasih,
lebih sayanglah pada ibumu.
Bila kau patuh pada rajamu,
lebih patuhlah pada ibumu."*

Beginilah pesan Bang Haji Rhoma Irama dalam lagunya Keramat. Lagu yang mengingatkan pada kita agar tidak lupa pada manusia spesial, ibu kita. Agar kita lebih sayang dan patuh pada ibu, melebihi kekasih bahkan raja. Saking begitu mulianya sosok ibu.

Selain Rhoma Irama, Iwan Fals juga menciptakan lagu tentang ibu. "Seperti udara, kasih yang engkau berikan. Tak mampu ku membalas, Ibu...". Iwan Fals menggambarkan perjuangan seorang ibu yang berjalan ribuan kilo melewati banyak rintangan hingga kakinya berdarah demi anaknya. Sepertinya Iwan Fals tidak berlebihan dalam menghiperbolakan perjuangan ibu, karena sesungguhnya perjuangan ibu bisa jadi lebih dahsyat daripada yang diumpamakan oleh Iwan Fals.

Tentunya kita tidak asing dengan lagu berjudul Bunda, karya Melly Goeslaw. Kita sering mendengarnya di acara renungan tentang ibu. Tak jarang yang menitikkan air mata ketika mendengar lagu ini. Melalui lagu ini kita diajak kembali ke memori ketika kita masih kecil dengan belaian kasih sayang ibu kita. "Oh bunda ada dan tiada dirimu, kan slalu ada di dalam hatiku"

Ungu, band papan atas negeri ini tidak mau ketinggalan. Lagu berjudul Doa untuk Ibu pun tercipta. Melalui lagu ini, Ungu ingin mengucapkan terima kasih untuk ibu dan juga doa semoga Tuhan memberi kedamaian kepada ibu. Begitu pula Opick feat Amanda. Lagu Satu Rindu yang mereka bawakan membuat pendengar merindukan masa-masa indah bersama ibu.

Rhoma Irama, Iwan Fals, Melly Goeslaw, Ungu, dan Opick hanyalah sedikit dari sekian banyak penyayi yang menciptakan lagu tentang ibu. Tidak akan ada habisnya ketika kita menceritakan perjuangan dan kasih sayang ibu, sejak kita dalam kandungan, melahirkan, menyusui, mengajari berjalan, membaca, mengaji, mendidik dan membesarkan kita hingga saat ini.

³² Tulisan dimuat di Okezone.com kolom Suara Mahasiswa 19 Desember 2010.

Pantaslah jika Baginda Nabi menyebut ibu tiga kali, baru kemudian ayah. Bahkan surga yang begitu indah dikatakan berada di telapak ibu. Begitu mulianya ibu kita dan kewajiban kita untuk memuliakannya. Meski kita tak akan pernah sanggup membalas semua yang telah diberikannya kepada kita. "Hanya memberi, tak harap kembali. Bagai sang surya menyinari dunia".

Hari Ibu di Indonesia dirayakan pada tanggal 22 Desember, sedang di Amerika dan Kanada Mother's Day jatuh pada hari Minggu di minggu kedua bulan Mei. Namun bagiku keduanya tidak berlaku. Aku tak peduli. Karena bagiku, setiap hari adalah hari ibu. Hari untuk mengungkapkan cinta pada ibu. Wahai ibu, izinkan aku mengatakan *"I love you*, aku mencintaimu".

**) Peserta PPSDMS Angkatan V Regional 3 Yogyakarta, mahasiswa Departemen Teknik Mesin dan Industri Fakultas Teknik UGM 2008*



PENDIDIKAN



Mimpi Ki Hajar Dewantara³³

Oleh: Afra Afifah*)



*"Ing ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, Tut Wuri Handayani...
"Di depan memberi teladan, di tengah memberi bimbingan,
di belakang memberi dorongan"*

S embongan yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara tersebut merupakan representasi akan mimpinya tentang pendidikan bangsa. Ironisnya, semboyan yang telah dicetuskan kurang lebih 89 tahun lalu nampaknya tidak kunjung terealisasi dengan baik. Masih banyak pekerjaan rumah dunia pendidikan Indonesia. Ada harapan yang menyertai saat Ki Hajar Dewantara, alias Raden Mas Suwardi Suryaningrat, mendirikan Taman Siswa pada 3 Juli 1922. Berharap akan lahir kaum intelektual yang memiliki kecintaan dan keinginan berjuang memerdekakan bangsanya.

Jika dilihat dari konteks masa kini, semboyan tersebut menggambarkan bagaimana seharusnya pendidikan berperan dalam kehidupan. *Ing ngarso tulodo* yang berarti di depan memberi teladan mengisyaratkan bahwa pendidikan akan membentuk seseorang menjadi sosok teladan. Orang yang berpendidikan laiknya padi yang berisi dan siap memberi manfaat. Sayangnya, dunia pendidikan kita hari lebih banyak melahirkan orang berpendidikan, tetapi sangat jauh dari nilai keteladanan. Berapa banyak pejabat yang bergelar paralel di belakang namanya, namun mencuri uang negara dan rakyat. Berapa banyak guru yang notabene berperan sebagai pendidik, justru memberikan contoh yang tidak baik bagi anak didiknya.

Ing madyo mangun karso yang berarti di tengah memberi bimbingan mengisyaratkan bahwa pendidikan menuntun seseorang menuju kebaikan dan kesuksesan. Mendidik berarti membantu seseorang mencapai apa yang dicitakannya. Dalam implementasinya, pendidikan di Indonesia memiliki dilema yang tidak sedikit. Mendidik, tetapi membiarkan murid menyontek; mendidik, tetapi melakukan kekerasan terhadap murid; mendidik, tetapi jarang masuk kelas untuk mengajar; dan sejumlah 'tetapi' lainnya yang kerap terjadi.

³³ Tulisan dimuat di MedialIndonesia.com kolom Citizen Journalism, 2 Mei 2011.

Tut wuri handayani yang berarti di belakang memberi dorongan mengisyaratkan bahwa pendidikan memberikan motivasi bagi seseorang untuk terus maju. Motivasi merupakan sesuatu yang menggerakkan untuk berbuat. Kenyataan hari ini justru mengisahkan bahwa sejumlah anak melakukan upaya bunuh diri karena tidak mampu membayar uang sekolah, tidak tahan dengan ejekan teman di sekolah, dan alasan lainnya yang bersinggungan dengan dunia pendidikan.

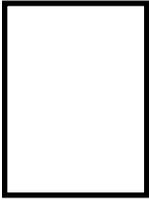
Gambaran wajah pendidikan Indonesia masih jauh dari mimpi Ki Hajar Dewantara puluhan tahun lalu. Di tengah euforia kemenangan Indonesia dalam olimpiade matematika dan fisika, masih ada jutaan anak bangsa kesulitan mengakses pendidikan dan tidak mendapat fasilitas pendidikan yang memadai. Tercatat dalam data indeks pembangunan pendidikan untuk semua jenjang tahun 2011, Indonesia mengalami penurunan peringkat yang disebabkan oleh tingginya angka putus sekolah di jenjang sekolah dasar. Pasalnya, sebanyak 527.850 anak atau 1,7 persen dari 31,05 juta anak SD putus sekolah setiap tahunnya. Tentu ini merupakan penurunan prestasi yang patut menjadi cambuk untuk menata langkah yang lebih baik.

Tidak ada gegap gempita untuk hari pendidikan nasional kita seperti layaknya tahun baru. Tidak juga ada perayaan khusus seperti hari-hari besar agama. Sebab memang tak cukup hari ini dimaknai dengan simbol, apalagi sekedar penghias dalam kalender tahunan. Ia harus disertai dengan perenungan akan tugas panjang yang menanti untuk segera diselesaikan. Bukan hanya bagi pemerintah, tetapi juga bagi seluruh elemen masyarakat. Jangan sampai mimpi Bapak Pendidikan Nasional bangsa besar ini hanya sekedar mimpi tanpa sempat terealisasi.

**) Peserta PPSDMS Angkatan V Regional 1 Jakarta Putri, mahasiswa Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UI 2008*

Hitam Putih UN³⁴

Oleh: Fuad Mushthafa B.*)



Ujian Nasional (UN) merupakan ujian akhir sekolah yang menjadi syarat kelulusan seorang siswa untuk mengakhiri masa studinya. Euforia yang dirasakan dalam menghadapi ujian menjadi tantangan tersendiri bagi tiap siswa menghadapi tekanan yang ada. Tekanan yang dirasakan siswa ini menimbulkan berbagai respons berbeda, ada yang menilai bahwa UN sangat penting untuk menguji seberapa pantas mereka untuk lulus. Namun banyak juga yang menilai bahwa UN hanya membuat siswa tertekan.

Tujuan UN yang dicanangkan oleh pemerintah adalah untuk mengukur kualitas pendidikan Indonesia. Hanya saja, pada kenyataannya malah berakibat lain untuk psikologis siswa karena hasilnya sering tidak memuaskan. Banyak siswa yang tidak lulus dengan standar yang merata di setiap daerah. Padahal, kualitas pendidikan di daerah belum merata, ini mengakibatkan adanya ketidakadilan dalam pelaksanaan UN. Seharusnya pemerintah menyamakan terlebih dahulu kualitas pendidikan tiap daerah baru melaksanakan suatu ujian yang serempak secara nasional dengan standar kelulusan yang sama

UN yang dilaksanakan beberapa tahun belakangan ini memiliki citra yang kurang baik, karena banyak pendapat bahwa UN merupakan sebuah syarat formalitas yang harus dilalui siswa. UN tidak bisa dijadikan parameter dalam menilai suatu kualitas pendidikan bangsa. UN dalam pelaksanaannya tidak bisa dijadikan tolok ukur kualitas seorang siswa, karena kenyataannya banyak terjadi kecurangan baik oleh siswa maupun oleh guru. Ini karena bukan hanya siswa yang takut dalam menghadapi UN, tetapi juga para para guru.

Lulus atau tidak seorang siswa dalam menempuh studinya hanya pihak sekolahlah yang tahu, bukan berdasarkan ujian akhir yang dirasa memberikan tekanan psikologis bagi siswa. Pihak sekolah punya hak penuh dalam menetapkan dan menentukan kelulusan siswanya, karena

³⁴Tulisan dimuat di Okezone.com kolom Opini Kampus, 19 April 2011.

merekalah yang mengetahui kualitas anak didiknya. Untuk itu perlu ada sistem UN yang baru sesuai dengan kondisi pendidikan di Indonesia setiap daerahnya.

Jika pemerintah mau mengetahui tingkat kualitas pendidikan seharusnya dilakukan survei terhadap pengetahuan siswa dalam belajar di setiap daerah dan para pengajar. Dari survei tersebut akan terlihat kualitas pendidikan suatu bangsa berdasarkan daerahnya, karena tingkat pemahaman siswa di seluruh Indonesia pastinya berbeda.

Banyak hal tersamarkan dalam praktik pelaksanaan UN. Kondisi ini menggambarkan keadaan hitam putih UN yang dicanangkan pemerintah.

**) Peserta PPSDMS Angkatan V Regional 5 Bogor, mahasiswa Departemen Teknologi Industri Pertanian Fakultas Teknologi IPB 2009*

Menggugah Budaya Pendidikan Indonesia³⁵

Oleh: Giovanni F. van Empel*)



63 TAHUN silam, Tan Malaka menuliskan *Materialisme, Dialektika, Logika (Madilog)*. Madilog bukan berbicara gagasan politik kenegaraan, ataupun gerakan buruh, akan tetapi Madilog berbicara tentang cara pikir masyarakat Indonesia.

Rupanya buah revolusi pikiran Tan masih relevan jika kita sedikit melihat pada konteks budaya pendidikan di Indonesia. 350 tahun lebih Indonesia dijajah secara fisik dan mental. Warisan bangunan kolonial masih kokoh, lebih kokoh dari bangunan Indonesia sendiri. Terlebih, warisan mentalnya, masih kental dan pekat mengakar-mengurat di dalam nalar manusia-manusia Indonesia.

Lupakan sejenak absurdnya sistem dan kebijakan pendidikan, mari bicarakan kultur dan tradisi berpikir. Logika mistika, begitu kata Tan, mempercayai budaya takhayul, mistis, dan irasional. Cara berpikir yang tidak positifis, empiris, dan rasional inilah yang menyebabkan penjajahan mental jauh lebih lama daripada penjajahan secara fisik.

Inferiority Complex, suatu kondisi persepsi “terbelakang” yang diwariskan oleh kolonialisme dulu, masih mengakar kuat di dalam cara pikir masyarakat Indonesia. Pendidikan yang sifatnya searah, tidak menekankan dalam proses dialog, bergaya “guru selalu benar” melahirkan suasana kelas yang miskin pertanyaan, miskin diskusi, dan miskin interaksi.

Kita pun dapat melihat dalam pojok-pojok kelas, guru menjadi sosok yang menakutkan, sehingga murid tak berani bertanya. Padahal, Jacques Rolland mengatakan, “Bertanya adalah suatu proses latihan berpikir.” Pola pendidikan yang cenderung searah tidak mungkin melahirkan manusia-manusia Indonesia yang memiliki tradisi berpikir yang kuat.

Maka esensi pendidikan adalah bertanya. Tanpa bertanya, tak ada pencarian. Karena sejatinya berilmu adalah proses pencarian abadi tentang kebenaran. Tradisi keengganan bertanya harus

³⁵ Tulisan dimuat di Okezone.com kolom Opini Kampus, 12 Agustus 2010.

dihancurkan dan diganti dengan tradisi baru yang mendorong untuk bertanya. Mengubah kebijakan dan arah pengembangan pendidikan lebih mudah daripada mengubah manusia.

Ada satu model pendidikan yang menarik di Amerika Serikat yakni *Knowledge is Power Programme* (KIPP). Model pendidikan ini mengintegrasikan pada sekolah-sekolah di Amerika Serikat. Ada satu program yang menjadi aturan yang harus ditaati, "*Smile, Sit up, Listen, Ask question, Nod when being spoken to, and track with your eye*" (SSLANT/ senyum, duduk sigap, mendengarkan, ajukan pertanyaan, perhatikan ketika diajak berbicara, dan ikuti pandangan mata anda).

Output dari model seperti ini, 95 persen diterima di universitas top, padahal 70-75 persen peserta didiknya berasal dari kalangan kulit hitam dan berdarah hispanik yang notabene golongan ekonomi menengah ke bawah.

Ketika gerakan pengiriman tenaga mahasiswa digulirkan oleh Dewan Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) pada era 50an, sontak program ini mewujud menjadi pionir bagi organisasi kemahasiswaan, bahkan universitas itu sendiri. Mahasiswa yang dikirim ke desa terpencil merancang dan membangun komunitas berbasis pengetahuan lewat SMA, SMP, bahkan SD. Tidak jarang anak didik yang dihasilkan lewat program ini berhasil melanjutkan studinya ke tingkat universitas.

Pengiriman itu bukan tanpa makna. Makna pengiriman itu tidak sesempit memberikan "ikan". Tapi ada budaya yang direkonstruksi. Budaya lama yang mengakar dan mengekang tradisi berpikir.

Alangkah baiknya, jika hari ini dalam sekolah-sekolah yang dibina mahasiswa dalam rangka pengabdian terhadap masyarakat tidak hanya memberikan sesuatu secara normatif. Tapi ada budaya kritisisme baru yang terwujud dalam model pendidikan semacam KIPP di Amerika. Sehingga manusia-manusia Indonesia baru akan lahir.

Gugahlah kesadaran dasar para peserta didik tentang pentingnya berilmu. Ibarat penyakit, sebarankah secara masif dan gugahlah terus menerus. Pada akhirnya yakinlah bahwa kebangkitan Indonesia dimulai dari bertanya.

**) Peserta PPSDMS Angkatan V/Regional III Yogyakarta, mahasiswa Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran UGM 2008*

Meneropong Wajah Pendidikan Indonesia³⁶

Oleh: Muhammad Rifqi Abidin*)



Tahun ini tepat pertengahan masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Salah satu kebijakan yang dianggap berhasil adalah realisasi anggaran pendidikan. Untuk tahun 2011 ini, pemerintah telah menyediakan dana Rp 248 triliun atau 20,2% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan untuk anggaran fungsi pendidikan. Dana tersebut tentu bukanlah jumlah yang sedikit.

Pada jumpa pers akhir tahun lalu Menteri Pendidikan Nasional, Muhammad Nuh, mengatakan bahwa selama gaji guru negeri masih diambil dari dana pendidikan sebesar 20% dari APBN, biaya sekolah hingga kuliah pasti tetap mahal. Pernyataan tersebut menekankan bahwa peningkatan jumlah anggaran bukan merupakan solusi utama dalam memperbaiki dunia pendidikan di Indonesia. Optimalisasi biaya merupakan kunci yang dapat diberlakukan sebagai solusinya.

Berbicara tentang kebijakan pendidikan, tahun ini pemerintah akan memprioritaskan empat bidang pendidikan dalam kinerjanya. Prioritas tersebut berturut-turut adalah pendidikan dasar, pendidikan vokasi dan politeknik, percepatan doktor, dan pendidikan anak usia dini (PAUD). Penentuan prioritas ini bukan tanpa alasan. Karena itu, menjadi penting untuk mengetahui dan mempertanyakan alasan pemerintah.

Sungguh tepat rasanya jika pendidikan dasar ditempatkan pada prioritas urutan pertama. Namun ada satu tantangan yang sekiranya akan dihadapi pemerintah terkait pendidikan dasar, yakni pemerataan pendidikan. Sudah menjadi rahasia umum bahwa sentralisasi pembangunan pada zaman Orde Baru masih berbuntut panjang hingga saat ini. Begitu pula dengan pembangunan dalam bidang pendidikan.

³⁶ Tulisan dimuat di Harian Seputar Indonesia kolom Suara Mahasiswa, 10 Januari 2011.

Untuk pendidikan vokasi dan politeknik, pemerintah mengharapkan hal tersebut dapat menjawab masalah ketenagakerjaan. Akan tetapi, timbul permasalahan baru, jika tenaga kerja berlimpah, tentu harus ada lapangan kerja yang mencukupi untuk mereka. Hal tersebut tentu menjadi pekerjaan rumah untuk kita semua. Saat ini terdapat 23.000 dosen yang berlatar belakang pendidikan doktor (S-3), dari 270.000 dosen atau sekitar 8%-nya. Jumlah tersebut bisa dikatakan sedikit jika dibandingkan kebutuhan yang ada. Alhasil, program percepatan doktor ini perlu diberi perhatian khusus terkait kualitas keluarannya.

Uniknya, prioritas keempat pemerintah diberikan untuk PAUD. Selama ini PAUD masih terkesan eksklusif dan masih menyentuh sebagian kecil masyarakat. Padahal tahun-tahun pertama kehidupan anak merupakan kurun waktu yang sangat penting dan kritis dalam hal tumbuh kembang fisik, mental, dan psikososial, yang berjalan sedemikian cepatnya sehingga keberhasilan tahun-tahun pertama untuk sebagian besar menentukan hari depan anak. PAUD juga merupakan salah satu hasil kesepakatan dari pertemuan Forum Pendidikan Dunia di Dakar, Senegal, pada sepuluh tahun silam. Permasalahannya bagaimana respons masyarakat dalam menyikapi hal ini?

Tantangan terbesar yang dihadapi Indonesia dalam mengatasi berbagai tantangan kecil lainnya adalah komitmen. Dengan komitmen yang kuat, program yang diusung pemerintah tidak akan menjadi wacana belaka. Komitmen yang dimaksud pun harus digenggam erat baik oleh masyarakat, LSM, dan pemerintah.

**) Peserta PPSDMS Angkatan V Regional 2 Bandung, mahasiswa Departemen Psikologi, Fakultas MIPA ITB 2009*

Wajah Pendidikan Indonesia: Membeli Jendela Dunia³⁷

Oleh: Rima Febrina*)



Hari itu Arif tetap pergi ke sekolah. Semester baru menjelang Arif masih mengenakan seragam putih-merah yang sudah lusuh karena telah dipakainya selama tiga semester kemarin. Ketika teman-temannya bersemangat di tahun ajaran baru kali ini untuk bersiap menyambut ujian nasional dan kelulusan mereka, Arif memilih lebih banyak diam.

Matanya memandang kosong pada selembur surat dari sekolah yang ditujukan untuk orangtuanya perihal pengadaan buku paket dan LKS (Lembar Kerja Siswa). Arif tidak mengerti. Tidak juga benar-benar paham dengan besaran nominal yang tercantum dalam surat tersebut begitu pula dengan surat-surat sebelumnya. Satu hal yang ia tahu, bahwa orangtuanya tidak pernah mau memberikannya sejumlah uang seperti teman-temannya.

Kisah tersebut merupakan fragmen dari realita yang ada. Buku tidak lagi dapat dimaknai sebagai jendela dunia yang memberikan kemudahan pertukaran ilmu dan pengetahuan baru. Hal ini terkait dengan menurunnya aksesibilitas buku yang selaras dengan pola komersialisasi yang sudah tidak lagi semu dilakukan oleh berbagai institusi pendidikan dasar di Indonesia.

Mari kaji kembali gaung program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di mana salah satu aspek alokasi pendanaannya mencangkup penyediaan buku teks pelajaran.

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2005 tentang Buku Teks Pelajaran dalam pasal 8 ayat 4 dijelaskan bahwa untuk membantu peserta didik yang tidak mampu memiliki akses ke buku teks pelajaran, satuan pendidikan wajib menyediakan paling sedikit sepuluh eksemplar buku teks pelajaran untuk setiap mata pelajaran pada setiap kelas, untuk dijadikan koleksi perpustakaan.

³⁷Tulisan dimuat di Okezone.com kolom Opini Kampus 7 Januari 2011.

Akan tetapi, yang terjadi adalah ketika buku bantuan tersebut disediakan, sekolah akan mencari cara lain agar para siswa tetap membeli buku teks tertentu, edisi cetakan tertentu dari penerbit tertentu dengan harga tertentu pula. Para guru dipaksa menerapkan sistem nilai, materi pelajaran dan tugas-tugas yang hanya akan diperoleh siswa dari buku tersebut.

Dengan mekanisme seperti ini, maka antarsiswa tidak dapat saling pinjam. Lucunya, buku yang ditawarkan sebenarnya tidak berbeda dari segi bobot materi maupun standar kurikulum dengan buku teks sejenis dari pemerintah yang disediakan melalui dana BOS atau buku lungsuran tahun ajaran sebelumnya. Hanya sampul bukunya saja dicetak berbeda dan dicap dengan nomor edisi terbaru.

Persoalan lainnya yang membuat potret pendidikan di Indonesia semakin cacat adalah "hubungan khusus" yang terjalin antara penerbit dengan pihak sekolah. Hal ini sudah tidak tabu lagi untuk dibicarakan. Pihak sekolah mengakui secara terang-terangan sistem bagi hasil yang diterapkan penerbit. Mereka tidak malu mengungkapkannya dengan dalih gaji sebagai pengajar yang mereka terima tidak dapat memenuhi besaran kebutuhan hidup yang kian meroket, sehingga diperlukanlah 'suntikan' dana tambahan. Profesionalisme guru mulai tergadaikan. Tuntutan menjadi guru profesional memang tidak semudah membalikkan telapak tangan. Faktor internal seperti rendahnya gaji masih determinan karena menyangkut pemenuhan kesejahteraan.

Murid bingung. Mengapa diri mereka seperti dibatasi dalam mencari sebanyak-banyaknya pengetahuan? Mengapa mereka dikondisikan untuk berpedoman hanya dari satu jenis buku teks? Bukankah minat baca harus terus ditingkatkan dengan tidak membatasinya pada jenis buku tertentu dari penerbit tertentu.

Guru bingung. Di satu sisi guru dituntut untuk menerapkan sistem pembelajaran yang dapat mengkontekstualkan materi dengan kehidupan nyata sesuai kurikulum terbaru, sehingga yang diperoleh siswa tidak sebatas teori klasik belaka. Akan tetapi tentu hal tersebut membutuhkan sarana penunjang, salah satunya buku dan media sumber lain. Jika pihak sekolah menekan guru untuk menjadi 'agen distributor' buku teks cetakan penerbit A, maka guru akan kesulitan mengembangkan rasa ingin tahu dan daya eksplorasi siswanya.

Siswa enggan membaca buku lainnya karena merasa sudah terpuaskan dengan buku yang dianjurkan. Orangtua pun bingung. Sewaktu mereka bersekolah dulu, mereka cukup terfasilitasi dengan adanya perpustakaan. Sekarang dimasa anak mereka bersekolah, dimana peran dan fungsi perpustakaan? Selanjutnya, kemana turunnya dana hingga ratusan miliar rupiah untuk

buku gratis yang sering disiarkan berita nasional? Lalu bukankah pihak sekolah memiliki tanggung jawab dan tugas untuk mengelola secara bijaksana terhadap segala dana pendidikan yang dikucurkan pemerintah. Begitu mahalkah ilmu pengetahuan sekarang ini?

Bukankah pencairan BOS telah memiliki standar prosedur tertentu?

Salah satu SOP BOS menegaskan transparansi alokasi dana. Pihak sekolah wajib mengumumkan besar dana yang diterima dan dikelola di papan pengumuman sekolah yang ditandatangani kepala sekolah, bendahara dan ketua komite. Nyatanya, hal tersebut tidak diberlakukan atau memang tidak berlaku. Buku gratis dari pemerintah lebih sering menjadi tempat tidur empuk bagi kutu dan laba-laba, jumlahnya di perpustakaan sekolah juga tidak sesuai dengan total biaya pembelian di kwitansi.

Tidak adil sebenarnya jika terus menyudutkan pihak sekolah dan guru dalam memandang permasalahan ini karena sejatinya pemerintahlah yang memiliki andil besar untuk mencari jalan tengahnya.

Pendidikan merupakan hak dasar bagi warga negara, begitulah sekiranya makna yang tersirat dari pasal 31 ayat 1 UUD 1945. Kendala-kendala yang dihadapi beberapa siswa dari lapisan masyarakat ekonomi menengah maupun menengah kebawah telah dipaparkan.

Upaya pemerataan dan keterjangkauan dari pemerintah melalui program BOS sebenarnya sudah baik secara konsep, hanya saja pelaksanaannya masih membutuhkan monitoring, controlling dan koreksi tinggi. Partisipasi aktif dari masyarakat juga penting peranannya sebagai penjaga dan pengawas agar pemerintah tidak lalai dalam mengaplikasikan kebijakan-kebijakannya. Jika konsep program dijalankan dengan sebenar-benarnya harapan cerah untuk pendidikan yang lebih baik di Indonesia dapat terwujud.

**) Peserta PPSDMS Angkatan V Regional 1 Jakarta Putri, mahasiswa Departemen Kimia, Fakultas MIPA UI 2009*

Model Integrasi Pendidikan Pondok Pesantren dan Konsep Kepemimpinan Profetik³⁸

Oleh: Septian Suhandono*)



Sebanyak lebih dari 200 juta umat muslim Indonesia belakangan ini banyak dipaparkan informasi terkait sisi negatif dari umat muslim itu sendiri. Paparan informasi negatif ini ternyata secara otomatis menumbuhkan benih pesimisme pada pola pikir umat muslim. Sepanjang tahun 2010 telah terjadi pertumbuhan pesat di bidang industri informasi di berbagai media baik cetak maupun elektronik. Tercatat salah satu stasiun TV swasta meningkatkan jam tayang kategori berita sampai 3 kali lipat dibanding tahun sebelumnya. Sayangnya, sebagian besar media telah menjadikan informasi kategori berita sebagai sebuah komoditas beorientasi profit, sehingga konsep yang digunakan adalah "*bad news is a good news*". Menurut konsep dasar media yang demikian, berita berita yang bersifat negatif akan lebih menarik konsumen dibanding berita tentang keberhasilan sehingga berdampak pada peningkatan rating media yang pada akhirnya meningkatkan kuantitas profit yang diperoleh.

Hampir setiap hari media elektronik dan cetak bertameng kepada UU No 40 tahun 1999 tentang Kebebasan Pers, secara leluasa memberitakan berbagai macam sisi negatif umat Islam. Padahal sisi negatif ini hanyalah sebagian kecil dari potensi positif luar biasa yang dimiliki oleh umat Islam. Umat Islam Indonesia setiap hari hanya dijejali oleh pemberitaan korupsi, konflik, kegagalan pemerintah, bencana alam maupun sosial dan segala macam sisi negatif yang bersifat menggeneralisir keadaan menjadi serba negatif. Padahal sifat menggeneralisir negatif merupakan sifat yang sebaiknya dihindari karena dapat menimbulkan degradasi optimisme. Alasan utamanya tentu karena pengejaran rating media yang lebih tinggi yang sejajar dengan kuantitas profit yang dihasilkan.

Skenario pemberian informasi akan diatur sedemikian rupa oleh berbagai oknum oposisi kebangkitan Islam melalui berbagai jenis media sehingga profil keberhasilan yang sebenarnya

³⁸ Tulisan dimuat di Eramuslim.com kolom Pemuda dan Mahasiswa 5 Januari 2011.

sangat banyak-diminimalisir untuk ditampilkan. Metode ini menasar pada pola pikir sehingga sangat efektif untuk mendegradasi rasa optimisme menjadi rasa pesimisme di kalangan umat muslim. Akibatnya dengan sendirinya umat muslim akan menjadi umat yang cepat puas, etos kerja rendah berujung pada produktivitas yang rendah pula. Hal ini akan menimbulkan bencana sosial kolektif yakni degradasi mental umat muslim yang apabila tidak ditanggulangi akan sangat berbahaya.

Setiap manusia dikaruniai oleh Allah potensi individual yang bersifat unik. Potensi tersebut tidak dapat didapatkan di orang lain bahkan pada saudara kembarnya sekalipun. Potensi ini akan berkembang sejalan dengan pengaruh keluarga dan lingkungan. Pengaruh yang datang dari eksternal ini akan membentuk seseorang menjadi sesuatu di lingkungannya. Kenyataan yang terjadi pada sebagian besar orang kondisi eksternal sangat mempengaruhi optimalisasi potensi yang ada pada seseorang. Dalam kalkulasi kuantitas dapat dikatakan faktor eksternal memberikan pengaruh sebesar 80% pada pemberdayaan potensi yang ada pada seseorang. Akibatnya banyak manusia yang sebenarnya memiliki potensi luar biasa namun karena terkekang oleh faktor eksternal, potensi tersebut menjadi tidak berdampak apapun terhadap kualitas baik pemikiran maupun hal teknis seseorang.

Banyak diantara potensi salah satunya potensi untuk maju dan bersaing yang diberikan pada seseorang hanya tersia-siakan. Akibatnya kemampuan yang berkaitan dengan daya saing seseorang menjadi lemah. Seperti akibat berantai hal ini akan mengakibatkan seseorang menjadi terbelakang baik dalam aspek material dan aspek psikis. Lebih lanjut akumulasi dari degradasi kemampuan individual akan mengakibatkan degradasi kemampuan kolektif yang lebih berbahaya. Peningkatan tingkatan bahaya ini diakibatkan karena badan kolektif memiliki sisi strategis yang akan berdampak luas walau hanya terganggu sedikit pada unsur-unsur tertentu.

Tidak dapat dipungkiri, hal ini mudah ditemukan dalam kondisi real umat muslim di dunia, khususnya Indonesia. Padahal Allah sendiri telah menyatakan dalam surat Al Imran 3: 10 yang artinya kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Berpijak pada ayat tersebut umat muslim telah diberikan potensi untuk menjadi umat berdaya saing tinggi dan tidak kalah dengan umat yang saat ini (dianggap) menjadi pemegang kendali dunia-Yahudi. Penyadaran kepada umat muslim sendiri, bahwa dirinya merupakan yang terbaik merupakan solusi dasar yang harus dilakukan agar Islam kembali bangkit. Penyadaran individual ini dengan sendirinya akan mendorong kesadaran kolektif bahwa umat muslim merupakan umat dengan kualitas potensi untuk maju berkelas terbaik.

Optimalisasi potensi merupakan sebuah mekanisme pola pikir yang berusaha semaksimal mungkin-bahkan mencapai derajat 100%-untuk menggunakan semua potensi yang diberikan oleh Allah. Dengan menggunakan konsep ini,seseorang yang diberi potensi oleh Allah sebanyak 6 derajat lalu menggunakannya melalui ikhtiar keras. Melalui Ikhtiar kerasnya akhirnya orang tersebut mendapat award 6 derajat, menurut konsep ini ia akan diberi nilai A. Hal ini berbeda dengan orang yang sebenarnya sudah diberikan potensi 10 derajat, namun pengaruh eksternal membuatnya hanya melakukan ikhtiar seadanya sehingga hanya mendapatkan award sebanyak 6 derajat, menurut konsep ini ia hanya akan mendapatkan nilai C karena telah menyalakan apa yang telah diberikan kepadanya. Hal ini dikarenakan karena adanya faktor eksternal terutama media yang mengkotak potensi umat muslim di Indonesia. Dengan konsep demikian seseorang tidak akan berpatokan pada hasil yang dihasilkan tetapi lebih kepada usaha semaksimal mungkin.

Melalui konsep optimalisasi potensi maka secara tidak langsung kita telah menerapkan-tidak hanya mengucapkan-kesyukuran atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Optimalisasi potensi diri melalui media positif kita dituntut untuk berusaha semaksimal mungkin. Dari hari kehari kita dituntut untuk berpandangan optimis, ikhtiar semaksimal mungkin dan selalu memperbaiki diri. Termasuk dalam menyongsong tahun 2011 ke depan.

**) Peserta PPSDMS Angkatan V Regional 5 Bogor, mahasiswa Departemen Gizi Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia IPB 2009*

Guru dan Semangat Mendidik ³⁹

Oleh: Giovanni F. Van Empel*)



Ada satu ciri khas utama dari intelektual generasi pertama, yakni kesungguhannya dalam mendidik. Pada ciri ini, mendidik tidak disempitkan dalam makna memberi ikan untuk langsung dimasak. Akan tetapi, mendidik siartikan sebagai proses memanusiakan dengan mengajarkan, menuntun bagaimana menggunakan pancing dengan benar.

Kolonialisme kuno mewariskan mindset "*Inferiority Complex*", sebuah penyakit kronis bangsa ini yang menyebabkan terjadinya stagnansi. Proses pendidikan bergaya feodal dipelihara dengan subur hingga hari ini. Terlebih di daerah-daerah. Dogma "guru selalu benar" mengakibatkan kelas-kelas menjadi miskin diskusi, miskin pertanyaan, miskin budaya kritis. Pelajar, hanya dicekoki tanpa disediakan ruang yang luas untuk bertanya. Praktis, tidak heran kalau instrumen penilaian kita bertumpu pada kemampuan kognitif saja.

Padahal, Jacques Rolland mengatakan "bertanya adalah suatu proses latihan berpikir.". Pola pendidikan yang cenderung searah tidak mungkin melahirkan manusia-manusia Indonesia yang memiliki tradisi berpikir yang kuat. Maka esensi pendidikan adalah bertanya. Tanpa bertanya, tak ada pencarian. Karena sejatinya berilmu adalah proses pencarian abadi tentang kebenaran. Pendidikan, kata Hatta adalah kemampuan untuk membedakan kebenaran dan kebathilan.

Dewasa ini terjadi perubahan orientasi gaya belajar. Dari *teacher centered learning* bergeser ke arah *student centered learning*. Siswa hari ini dituntut untuk proaktif dalam proses belajar. Di titik inilah, penulis mengkhawatirkan terjadinya *culture shock* di kalangan pendidik dan yang dididik.

Budaya mendidik searah yang telah terpelihara lama, menjadikan murid tergantung kepada guru. Ketergantungan ini akan sulit dihilangkan apabila banyak ketidaksiapan negara dalam

³⁹Tulisan dimuat diwebsite KM UGM bulan Oktober 2010.

menyelenggarakan pendidikan, meninggalkan murid dengan kebingungan. Hari ini, guru senang karena siswa dituntut secara sistem untuk selalu aktif. Meninggalkan sang murid untuk asyik dengan buku-bukunya. Di poin ini, murid menjadi mandiri dan itu suatu kemajuan bagi pendidikan Indonesia.

Akan tetapi, kekhawatiran penulis berada pada peran guru yang akan terkikis sedikit demi sedikit sehingga tidak ada lagi perannya di sekolah. Hubungan guru dan murid yang tidak dogmatis sudah tepat. Ini sejalan dengan fondasi pendidikan modern yang kehadirannya adalah untuk menciptakan pendidikan yang lebih dinamis. Pada konteks kekinian, guru harus mereposisi perannya sebagai pendidik.

Kita dapat melihat bagaimana kiprah HOS Tjokroaminoto yang menjadi guru sekaligus pendidik bagi Soekarno, Kartosuwirjo, dan Semaun. Bagaimana diskusi antara Ali Syariati dengan Fanon dan Sartre. Bagaimana Ahmad Dahlan dan Hasyim Asy'ari telah melahirkan manusia-manusia hebat.

Hari ini kita mendambakan hadirnya guru-guru agung yang menjadikan kegiatan mendidik sebagai jiwa. Bukan sekedar profesi. Guru yang menjadi kawan dialektika murid-muridnya dan juga partner diskusinya. Guru, tidak mengelit secara struktural tetapi membumi secara kultural. Sebagaimana divisualisasikan secara menarik oleh Julian Balia, guru Ikal dalam novel Sang Pemimpi dimana guru menanam mimpi dan menyuburkannya dengan kata-kata utopis. Menggugah para murid untuk berani memiliki cita-cita setinggi langit.

Di titik inilah, guru akan menjadi centrum dari kebangkitan tradisi intelektual Indonesia. Jepang mengajarkan pada dunia arti penting seorang guru. Pada detik-detik setelah terjadinya peristiwa Hiroshima dan Nagasaki, Jepang segera mengumumkan pertanyaan luar biasa kepada rakyatnya, "Berapa banyak guru kita yang tewas?" Dalam kurun 65 tahun kita sama-sama tahu seperti apa Jepang sekarang.

Makna seorang pendidik dikatakan secara cantik oleh Socrates yang mengatakan, "Aku ini bukan bidan sekedar bidan. Bukan bidan yang hanya melahirkan bayi-bayi manusia. Tapi aku orang yang membidani lahirnya gagasan-gagasan brilian manusia.". Guru, tidak hanya mengajar, tapi juga menggugah kesadaran murid. Di tengah samudera skeptisisme massal, adalah guru yang menjadi ujung tombak pengembalian optimisme kebangsaan yang dulu pernah Indonesia miliki. Di titik ini, kita harus mengingatkan negara agar memanusiaikan guru terlebih dulu.

**) Peserta PPSDMS Angkatan V Regional III Yogyakarta, mahasiswa Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran UGM 2008*

Pendidikan Karakter untuk Calon Pemimpin ⁴⁰

Oleh: Haniva Az Zahra*)



Kita memiliki banyak sekali pemuda yang potensial dengan kemampuan kepemimpinan yang baik, tetapi seringkali kita pun melupakan hal mendasar tetapi penting bagi seorang pemimpin. Pemimpin yang baik haruslah memiliki karakter yang juga baik. Karakter yang baik inilah yang akan membentuk jati diri pemimpin, pada akhirnya karakter seorang pemimpin ini yang akan menentukan arah kepemimpinannya.

Banyak sekali pemimpin yang tidak memiliki karakter pemimpin yang baik, hal ini menyebabkan kesejahteraan rakyat tidak merata dan juga masalah-masalah dalam suatu negara tidak tuntas selesai. Maka dibutuhkanlah pendidikan karakter bagi para remaja dengan potensi kepemimpinan yang baik. Apa saja karakter yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin? Setidaknya ada empat hal penting yang harus menjadi karakter seorang pemimpin.

Pertama, seorang pemimpin haruslah seorang aktivis pergerakan. Ia adalah orang yang memikirkan tentang masa depan lingkungan, serta mampu bergerak dengan konkret dan bukan omong kosong belaka.

Kedua, pemimpin yang baik haruslah memiliki sikap religius. Karena apabila seorang pemimpin memiliki sikap religius yang tinggi akan membuatnya menjadi tidak sombong dan mengetahui bahwa selalu ada yang lebih baik dan lebih hebat daripada dirinya. Faktanya, pemimpin yang sombong dan menjadi seorang diktator adalah pemimpin yang akan segera diturunkan oleh rakyatnya atau tidak didengar konstituennya. Maka religiusitas membuat seorang pemimpin selalu ingat bahwa dirinya adalah manusia biasa yang memiliki kelebihan serta kekurangan tertentu.

⁴⁰ Tulisan lolos seleksi dalam even *International Youth Leadership Conference*, bertempat di Praha, 24-29 Juli 2011.

Selanjutnya yang ketiga dari karakter seorang pemimpin adalah kecakapan dan kecerdasan. Hal ini bisa dilihat dari kecakapan akademisnya. Mana mungkin kita membiarkan masa depan kita dipimpin oleh orang yang tidak bisa menyelesaikan soal permasalahan aljabar sederhana? Kecakapan dan kecerdasan menjadi hal penting yang akan membuat skor *face validity* menjadi lebih baik.

Terakhir dari karakter seorang pemimpin yang baik adalah masalah kebersamaan dan kekeluargaan atau kemampuan interpersonal yang baik. Pemimpin yang baik harus sadar bahwa dirinya tidak pernah sendiri. Pemimpin pun membutuhkan orang-orang yang berada di sekitarnya. Tetapi seringkali pemimpin lupa bahwa ia bisa bersandar dan berbagi cerita dengan orang sekelilingnya. Jangan menganggap bahwa pemimpin berada di dalam istana dan tidak perlu kehidupan lain di luar istana. Tidak seperti itu, pemimpin yang baik justru sadar bahwa ada banyak orang yang mendukungnya dan siap mengingatkannya apabila ia melakukan kesalahan.

Empat karakter inilah yang harus ditanamkan kepada para pemimpin muda. Karakter-karakter inilah yang harus diajarkan dalam pendidikan baik formal maupun lingkup nonformal. Apabila seseorang sudah mampu memenuhi keempatnya dalam waktu yang baik dan cepat itu akan menjadi hal yang luar biasa karena akan tercipta sosok pemimpin yang ideal.

**) Peserta PPSDMS Angkatan V Regional 1 Jakarta Putri, mahasiswa Fakultas Psikologi UI 2009.*



Ketika Rokok Menjadi Makanan Pokok⁴¹

Oleh: Agung Supriyadi*)



Apa yang Anda pikirkan ketika Anda sehari saja tidak memakan nasi? Anda pasti akan lemas dan tidak berenergi. Bagaimana jika suatu saat Anda mengganti nasi dengan rokok sebagai makanan pokok? Apakah Anda mau?

Pertanyaan menggelitik di atas bukanlah pertanyaan retorik belaka, tetapi pertanyaan terhadap kenyataan yang mungkin akan terjadi. Menurut data dari profil tembakau Indonesia tahun 2008, belanja rokok di Indonesia menduduki peringkat kedua (10,4%) di bawah makanan pokok (11,3%). Nilai belanja rokok ini jauh lebih besar dari pengeluaran untuk makanan sehat seperti daging, telur dan susu yang rata-rata besarnya hanya 2%. Nilai belanja rokok ini juga jauh meninggalkan kebutuhan akan fasilitas kesehatan yang layak dan pendidikan untuk anak-anak perokok.

Data di atas menggambarkan bahwa Penduduk Indonesia telah menjadikan rokok sebagai kebutuhan pokok mereka sehari-hari. Mereka lebih memilih membeli rokok daripada membeli makanan yang bergizi untuk dirinya dan anak-anaknya. Mereka memilih menukar pelayanan kesehatan yang lebih baik dengan rokok yang sudah jelas-jelas membahayakan bagi kesehatan mereka. Mereka juga mengesampingkan pendidikan yang lebih baik untuk anak-anaknya demi sepuasnya rokok.

Rokok vs Kesehatan Masyarakat

Rokok jelas telah menjadi musuh kesehatan masyarakat dengan menciptakan siklus kesakitan masyarakat pada rakyat Indonesia. Perokok akan membeli rokok jauh lebih banyak daripada makanan bergizi untuk dirinya dan untuk keluarganya. Hal ini akan mengakibatkan diri perokok akan kekurangan gizi dan mudah terserang penyakit sehingga sangat mungkin untuk membuat anaknya akan menjadi seorang yang kekurangan gizi dan mudah terserang penyakit juga.

⁴¹ Tulisan ini mendapat penghargaan Juara I Sayembara Artikel BEM FKM UI bulan April 2011.

Keadaan seperti ini bisa berulang di generasi selanjutnya sehingga akan menimbulkan siklus kesakitan masyarakat yang akan terus menerus terjadi.

Masyarakat tidak boleh disalahkan dalam pergaulan mereka dengan “musuh” kesehatan masyarakat ini (baca: rokok). Masyarakat hanyalah korban dari beberapa pihak yang tidak peduli kesehatan masyarakat. Produsen rokok tepat sebagai pihak yang paling layak disebut tidak peduli kesehatan masyarakat karena merekalah yang mempublikasikan rokok di media dan acara mereka. Pemerintah juga bisa disebut sebagai pihak yang tidak peduli kesehatan masyarakat karena pemerintah gagal untuk membuat counter dari iklan-iklan rokok serta pemerintah juga tidak mau menaikkan harga cukai agar masyarakat tidak mampu membeli rokok. Mahasiswa juga patut dimasukkan dalam pihak tersebut karena mahasiswa masih kurang optimal dalam menggarap isu rokok ini bahkan banyak dari mahasiswa yang justru hidup dalam siklus kesakitan masyarakat yang diciptakan oleh rokok.

Bergerak bersama

Kita memerlukan sebuah tindakan bersama untuk mencegah agar rokok tidak benar-benar menjadi makanan pokok bagi masyarakat. Pemerintah bisa mengambil langkah signifikan pencegahan rokok menjadi makanan pokok melalui menaikkan cukai rokok. Tarif cukai rokok saat ini adalah 37% dari harga jual, bandingkan saja dengan standar global yang mematok angka 70% dari harga jual. Menurut Lembaga Demografi FE UI, kenaikan tarif cukai sampai dengan standar baku global dapat mencegah antara 2,5 juta sampai 5,9 juta kematian yang berhubungan dengan rokok. Para pengusaha di bidang media yang banyak mempromosikan rokok semestinya harus sadar karena usaha mereka bisa menyengsarakan masyarakat dengan pandangan yang salah dari rokok melalui iklan-iklan yang dibuat di media. Mahasiswa juga harus sadar bahwa merekalah yang punya potensi paling besar untuk “meyadarkan dan menggerakkan” pemerintah, pengusaha dan masyarakat untuk bergerak mencegah rokok menjadi makanan pokok.

Kita semua pasti setuju bahwa kita tidak ingin rokok menjadi makanan rakyat Indonesia kelak. Maka, kita harus bergerak secara bersama untuk menciptakan kesehatan masyarakat bagi rakyat miskin dan juga seluruh rakyat Indonesia.

**) Peserta PPSDMS Angkatan V Regional 1 Jakarta Putra, mahasiswa Departemen K3 Fakultas Ekesehatan Masyarakat UI 2008.*

Motrafood (Modern Traditional Food) Penggalian dan Optimalisasi Pangan Lokal⁴²

Oleh: Ary Kristianto*)



Indonesia kaya dengan berbagai sumber pangan lokal yang sangat berpotensi untuk dikembangkan sebagai produk olahan pangan yang mempunyai nilai gizi tinggi. Tercatat dari hasil survey DEPTAN (2008) Indonesia memiliki kekayaan hayati terbesar kedua setelah Brasil. Tanah ini memiliki 33 jenis sumber karbohidrat diantaranya ubi kayu yang produktivitasnya mencapai 2 juta ton/tahun, disusul oleh ubi jalar, ganyong, talas dan sebagainya. Selain itu, Indonesia juga memiliki 66 jenis kacang-kacangan seperti komak, bengkok, kecipir, kedelai serta aneka ragam kacang *indigenous*. Belum lagi buah-buahan *indigenous* dan rempah-rempah yang telah lama menjadi primadona dunia. Akan tetapi potensi lokal ini masih belum tergalai dan pengembangannya masih belum sistematis dan cenderung tidak komperhensif, sehingga seringkali tidak tersentuh dan bahkan jika telah dibudidayakan, hasilnya seringkali tidak terpakai dan rusak dimakan waktu.

Di sisi lain, keadaan masyarakat Indonesia sangat riskan terhadap kekurangan gizi. Terbukti selama kurun waktu 2010 ini, tercatat sebanyak 56941 jiwa menjadi korban malnutrisi atau gizi buruk, dan sebanyak 10 propinsi di Indonesia terancam kelaparan (Kementrian Kesehatan, 2010). Kasus yang menyedihkan ini agaknya menyiratkan kebenaran sebuah idiom bahwa bangsa ini seperti ayam yang kelaparan di lumbung padi.

Jika ditarik sebuah garis lurus antara dua permasalahan yang terurai di awal, akan berujung pada satu titik temu yang dapat diupayakan terutama oleh generasi muda untuk memberikan solusi nyata dan konkrit terhadap permasalahan minimnya penggalian dan optimalisasi pangan lokal dengan rendahnya kecukupan gizi masyarakat Indonesia. Solusi yang lahir dari dua latar belakang yang antitesis ini ialah konsep *modern tradisonal food*. *Modern traditional food* atau

⁴² Tulisan ini mendapat penghargaan Juara Nasional Kompetisi Menulis The United Nation Worl Food Program (UNWFP) bekerjasama dengan Indonesian Future Leaders (IFL) bulan September 2010.

motrafood adalah pengalihan dan optimalisasi pangan lokal dengan mendayagunakan teknologi pengolahan pangan sehingga produk dapat diterima masyarakat luas.

Konsep motrafood ini terbukti telah membantu mencukupi kebutuhan gizi masyarakat. Beberapa contoh yang dapat diambil ialah berdirinya unit usaha Republik Telo yang menjual aneka produk olahan ketela pohon. Awalnya ketela pohon hanya dianggap sebagai makanan kelas bawah sehingga pemanfaatannya minim dan tidak dapat didistribusikan ke berbagai daerah, khususnya pelosok-pelosok. Padahal dari segi harga, ketela pohon sangat terjangkau, pun untuk golongan masyarakat marginal.

Selain Republik Telo, hal yang sama juga tengah dilakukan untuk mengangkat potensi lokal ubi jalar yang divariasikan produknya menjadi nasi ubi jalar, spaghetti, dan mie. Salah satu kepeloporan pemuda dalam mengentaskan kelaparan dengan basis optimalisasi pangan lokal adalah berdirinya unit usaha Steak Kampoeng Mucuna. Usaha ini cukup menarik karena mencoba mengangkat potensi lokal kara benguk yang awalnya hanya dijadikan tempe di daerah pedalaman Jawa timur dan jogja, kemudian didesain menjadi produk meat ekstender sehingga menjangkau pasar yang lebih luas dan menjadi pangan yang bergengsi di wilayah bogor.

Bukan menjadi suatu masalah letak suatu daerah, baik yang dekat maupun yang jauh dari pusat ibukota. Sebenarnya penentu kesejahteraan suatu daerah bukanlah semata-mata dinilai dari posisinya terhadap pusat kegiatan pemerintahan karena masing-masing daerah mempunyai keunikan termasuk dalam hal pangan lokal. Hanya saja masalahnya apakah sudah tergali dan sudah dioptimalkan potensi yang ada.

Berkaca dari pengalaman masa lalu, pemuda sebagai pelopor perubahan harus melihat permasalahan ini sebagai tantangan dan peluang lantas menindaklanjutinya dengan konsep yang tepat dan sistematis. Konsep Motrafood ini harus diyakini akan membawa perubahan yang fundamental terhadap mindset masyarakat Indonesia terhadap pangan lokal. Dari hal yang sederhana ini, apabila diimplementasikan secara kontinyu dan konsisten, maka akan membawa Indonesia lebih baik dan bermartabat. Akhirnya dalam kurun waktu yang terukur Indonesia akan mampu berdaulat pangan seperti pernyataan yang dilontarkan oleh WHO (2000) bahwa negara yang kuat adalah negara yang berdaulat atas pangannya, yaitu negara yang mampu menyuplai kebutuhan pangannya dari potensi lokal negeri sendiri.

Indonesia boleh merujuk kepada bangsa Jepang bagaimana dalam menjaga kultur budaya termasuk makanannya. Bangsa Jepang sangat menghargai pangan lokal tetapi juga sangat

kreatif dalam packaging sehingga terkesan modern, nikmat, dan sesuai dengan perkembangan zaman. Hal ini adalah salah satu tiang penyangga kecukupan gizi mereka. Apabila konsep ini dapat diimplementasikan di Indonesia secara menyeluruh, maka masing-masing individu di Indonesia akan berbangga dengan potensi pangan lokal sehingga nilai kebutuhan gizi akan tercukupi bahkan dapat membuka bisnis atau usaha yang akan mengurangi angka kemiskinan yang berarti juga mengurangi orang-orang yang terancam kelaparan di negeri ini.

**) Peserta PPSDMS Angkatan V Regional 5 Bogor, mahasiswa Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan Fakultas Teknologi Pertanian IPB 2008.*

Menyejahterakan Kesehatan Indonesia⁴³

Oleh: Giovanni F. Van Empel *)



Semua lapisan masyarakat menghendaki kesejahteraan dalam hidupnya. Sebagai warga dari suatu negara, tentu ada harapan dan kehendak masyarakat untuk dipenuhi hak-hak dasarnya. Dalam konteks Indonesia, mewujudkan kesejahteraan bagi setiap warganya bukan sekedar cita-cita kemerdekaan, tapi merupakan janji dari kemerdekaan. Sejak rezim orde baru yang mengedepankan paham pembangunan berakhir, Indonesia memasuki fase baru dalam sejarahnya. Reformasi digulirkan dengan harapan bahwa segenap ketimpangan sosial ekonomi pada masa orde baru dapat dientaskan pada babak baru ini.

Namun, nampaknya setelah 12 tahun reformasi bergulir, menciptakan kesejahteraan bagi segenap lapisan masyarakat masih sulit untuk diwujudkan. Hal ini dapat dengan mudah dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia pada tahun 2009 yang berada pada posisi 111 dari 182 negara. Merosot dari posisi 107 pada tahun 2007. IPM yang secara jelas mengukur derajat pendidikan, kemampuan ekonomi, dan tingkat kesehatan menjadi tolak ukur seberapa baik derajat kesejahteraan. Meskipun data BPS menunjukkan penurunan penduduk miskin sebesar 1,51 juta penduduk menjadi 31,02 juta penduduk pada Maret 2010, faktanya penurunan kemiskinan tidak disertai dengan kenaikan IPM yang dari tahun ke tahun semakin turun.

Kesehatan, yang menjadi syarat utama produktifitas seringkali dinomorduakan. Perbandingan alokasi dana APBN untuk tahun 2010 misalnya, meski ada peningkatan dari tahun ke tahun, alokasi untuk sektor kesehatan selalu jauh berada di bawah pendidikan. Meskipun demikian, sektor kesehatan memiliki segenap permasalahan yang menarik untuk ditelaah.

Pelaksanaan desentralisasi kesehatan dimulai ketika UU No.22 tahun 1999 dikeluarkan. Euforia reformasi yang pada waktu itu sangat tinggi, menimbulkan perubahan ekstrim dari sentralisasi ke desentralisasi total. Hal ini menimbulkan masalah, terjadi perbedaan anggaran untuk kesehatan di berbagai daerah. Belum lagi, kebijakan desentralisasi yang semestinya dapat

⁴³ Tulisan dimuat di BalairungPress.com kolom Opini Oktober 2010.

mewujudkan pelayanan kesehatan yang efisien dan merata bagi masyarakat tidak terwujud karena tidak didukung dengan kesiapan teknis seperti kurang koordinasi, kekurangan SDM, kegagalan sistem, dsb. Sehingga tidak mengherankan apabila kita melihat Angka Kematian Ibu (AKI) tahun 2009 masih 228 per 100 ribu, sangat tinggi dibandingkan dengan negara ASEAN lain. Belum lagi prevalensi kekurangan gizi sebesar 18,4 persen menjadikan sektor kesehatan penting untuk diprioritaskan.

Oleh karena itu, menurut penulis pemerintah perlu melakukan mengevaluasi secara terus menerus dan melakukan inovasi. Pertama, pemerintah wajib mewujudkan desentralisasi kesehatan yang efisien dan efektif. Penguatan lembaga pemberi pelayanan kesehatan dilakukan bersamaan dengan efisiensi dana serta kebijakan yang tepat sasaran. Masyarakat miskin harus dijamin oleh negara dengan cara memastikan Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) tersalurkan dengan tepat. Pembangunan infrastruktur seperti puskesmas dan rumah sakit ditingkatkan dengan tidak lupa melakukan berbagai pembenahan kualitas SDM.

Kedua, fungsi pemerintah sebagai regulator maupun fasilitator dengan cara meningkatkan partisipasi publik. Pihak swasta dirangkul sebagai mitra dan masyarakat dilibatkan. Program promosi kesehatan sebagai wujud dari paradigma mencegah diprioritaskan dengan melakukan edukasi pada masyarakat.

Peningkatan IPM Indonesia membutuhkan kebijakan yang padu dan komprehensif. Sektor kesejahteraan ekonomi rakyat harus berjalan beriringan dengan pembangunan pendidikan dan peningkatan derajat kesehatan. Terlalu lama jika kita hanya berpangku tangan menunggu hasil kerja nyata pemerintah, oleh karena itu dibutuhkan partisipasi publik yang proaktif untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan bagi setiap warga negara Indonesia.

**) Peserta PPSDMS Angkatan V Regional III Yogyakarta, mahasiswa Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran UGM 2008*

Perlunya Revolusi Sanitasi Indonesia⁴⁴

Oleh: Muhammad Irfan Hasan *)



Sanitasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah usaha untuk membina dan menciptakan suatu keadaan yang baik di bidang kesehatan, terutama kesehatan masyarakat. Sanitasi juga dapat diartikan sebagai perilaku disengaja dalam pembudayaan hidup bersih dengan maksud mencegah manusia bersentuhan langsung dengan kotoran dan bahan buangan berbahaya lainnya dengan harapan usaha ini akan menjaga dan meningkatkan kesehatan manusia.

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa melalui fokus bahasan sanitasi ini, tindakan efektif dalam upaya pencegahan penyakit akan sangat efektif. Seperti yang kita ketahui bersama, banyak sekali penyakit, bahkan hampir semua penyakit, berawal penyebab dan penularannya melalui sanitasi yang buruk. Oleh karena itu, jika sanitasi di Indonesia dapat dibenahi maka peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dapat tercapai dengan mudah.

Namun, kenyataannya, Indonesia menempati posisi ketiga negara dengan sistem sanitasi buruk di kawasan Asia Tenggara. Posisi pertama adalah Laos, dan kedua Myanmar. Sekretaris Koordinator *Indonesian Sanitation Sector Development Program* (ISSDP), Nugroho Tri Utomo, dalam lokakarya sanitasi di Banjarmasin menyatakan bahwa sistem sanitasi yang buruk telah berdampak buruk pula terhadap citra Indonesia dalam pergaulan internasional maupun nasional.

"Sebagai ilustrasi saja, kerugian akibat sanitasi buruk di Indonesia mencapai sedikitnya Rp40 triliun. Dari segi kesehatan, masyarakat miskin harus mengeluarkan sedikitnya 25 persen penghasilannya hanya untuk membayar dampak dari sanitasi yang buruk itu," ucap Nugroho.

Hal ini bisa terjadi karena beberapa penyebab beruntun yang menuju pada satu titik akar masalah. Salah satu, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sanitasi. Kondisi

⁴⁴Tulisan dimuat di Okezone.com kolom Opini Kampus, 31 Desember 2010.

tersebut bisa jadi karena pengetahuan tentang sanitasi masih sangat kurang akibat dari kurangnya sosialisasi/pendidikan bagi seluruh masyarakat. Sebab lain adalah minimnya kepedulian pemerintah. Indikasinya, jumlah anggaran yang digelontorkan untuk sanitasi sangatlah sedikit.

Berdasarkan perhitungan, pembangunan sanitasi ideal per tahun membutuhkan anggaran Rp6 triliun. Sedangkan dana yang dianggarkan pemerintah pusat per tahun hanya Rp 600 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa sanitasi belum menjadi prioritas utama bagi pemerintah karena pemerintah lebih memilih program-program yang kebermanfaatannya dapat dirasakan secara cepat dan langsung oleh masyarakat. Padahal, kerugian materiil akibat buruknya sanitasi di Indonesia sangat besar.

Penyebab utama, bisa jadi masyarakat sudah mengetahui pentingnya sanitasi, namun mereka berada pada sistem yang mendukungnya untuk tidak memedulikan sanitasi. Padahal jika masyarakat Indonesia melakukan kunjungan ke luar negeri dengan peraturan kebersihan yang ketat serta kebiasaan hidup bersih yang baik, masyarakat Indonesia tiba-tiba bisa berubah menjadi masyarakat yang sangat patuh terhadap peraturan-peraturan tersebut serta berusaha menjaga kebersihan sesuai dengan sistem di dalam negara tersebut yang sudah menjadi kebiasaan. Contohnya terlihat di negara tetangga kita, Singapura. Hal ini memperlihatkan, belum ada sistem reward and punishment yang jelas di Indonesia untuk masalah kebersihan dan gaya hidup bersih.

Semua penyebab tersebut bermuara pada satu akar masalah utama yaitu tidak adanya pergerakan yang menginisiasi revolusi sanitasi Indonesia yang dapat mengadvokasi, melakukan kegiatan-kegiatan perbaikan sistem pengelolaan sampah, pengairan, serta penerapan pola hidup bersih dan sehat.

Revolusi sanitasi di Indonesia bisa diawali dari pergerakan suatu komunitas kecil yang lalu berkembang menjadi sangat besar. Diawali dari lokasi tertentu dan kemudian meluas. Orang-orang di dalamnya adalah orang-orang yang belajar mengenai perbaikan sistem sanitasi serta mengaplikasikannya pada berbagai wilayah di Indonesia, mendokumentasikannya, lalu melanjutkannya dengan program-program unggul di berbagai wilayah lain secara beruntun.

Dengan publikasi yang masif dan efektif, komunitas ini akan menjadi besar dan menjadi contoh bagi seluruh masyarakat Indonesia bahwa masih ada komunitas yang ingin berjuang membangun Indonesia dimulai dari pribadi yang sehat serta siap berjuang membangun Indonesia di berbagai bidang. Hingga suatu saat nanti, jika ada masyarakat di suatu wilayah yang merasa kebingungan dengan sistem sanitasi yang buruk di daerahnya hingga muncul

berbagai penyakit, maka masyarakat di wilayah tersebut dapat meminta tolong kepada komunitas ini untuk mengarahkan bagaimana menerapkan sistem sanitasi dan pola hidup sehat yang terbaik.

Akan sangat banyak manfaat yang dapat diambil oleh bangsa Indonesia dari komunitas ini, mulai dari keuntungan materiil karena terjadi penghematan terhadap biaya pengobatan akibat turunnya jumlah penyakit yang menyebar, hingga keuntungan dari peningkatan produktivitas masyarakat karena semuanya siap bekerja dengan kesehatan yang dimilikinya.

**) Peserta PPSDMS Angkatan V Regional 1 Jakarta Putra, mahasiswa Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UI 2009.*

Kesenjangan Status Kesehatan, Tantangan Indonesia 2011⁴⁵

Oleh: Nisa Yulianti Suprahman *)



Perubahan sosial ekonomi yang terjadi dalam beberapa dekade belakangan ini telah menimbulkan dampak demikian luas dan beragam, baik yang negatif maupun positif, dalam setiap sendi kehidupan masyarakat Indonesia.

Dampak yang negatif antara lain perubahan ini turut mendukung munculnya tantangan baru di bidang kesehatan, yaitu adanya kesenjangan status kesehatan masyarakat. Adanya kesenjangan status kesehatan tersebut juga pernah disampaikan Menteri Kesehatan, dr. Endang Rahayu Sedyaningsih kepada karyawan dan karyawan Kementerian Kesehatan, Jumat, 17 Desember 2010, di Jakarta.

Kesenjangan status kesehatan terjadi antardaerah, antartingkatan sosial-ekonomi dan antarkawasan perkotaan dan pedesaan. Secara spesifik kesenjangan tersebut antara lain disebabkan oleh belum efektifnya pelaksanaan desentralisasi penanganan kesehatan, efisiensi penggunaan anggaran dana yang masih rendah serta distribusi dan penayagunaan tenaga kesehatan yang belum proporsional.

Desentralisasi yang memberi peluang bagi Pemerintah Daerah untuk mengambil andil penting dalam penanganan masalah kesehatan secara teoritis dapat menyebabkan tercapainya pelayanan kesehatan yang lebih responsif terhadap kebutuhan lokal. Namun pada kenyataannya hal ini lebih mendorong timbulnya disparitas antar daerah dan sulit terpenuhinya informasi kesehatan yang esensial. Terlebih lagi, peningkatan pembiayaan yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam pembiayaan pengobatan kuratif menyebabkan berbagai pelayanan kesehatan preventif dan promotif oleh Pemerintah Daerah menurun.

⁴⁵ Tulisan dimuat di MedialIndonesia.com kolom Citizen Journalism, 10 Januari 2011.

Hal itu antara lain berdampak pada kemunculan kembali Kasus polio di banyak daerah. Sehingga untuk menjawab tantangan ini, pemerintah pusat dan daerah harus meningkatkan kualitas manajemen, koordinasi dan pengawasan dalam pelayanan kesehatan pada sistem desentralisasi. Untuk itu, pendefinisian peran pemerintah pusat, propinsi dan daerah harus dilakukan dengan jelas dan efektif.

Pemerintah Pusat harus mengembalikan peran pemerintah propinsi sebagai penanggungjawab dan pusat koordinasi pemerintah daerah, sementara pemerintah pusat melakukan rekonstruksi fungsinya sebagai pihak yang berfokus pada penanganan kesehatan yang paling essential dan relevan dengan pola penyakit masa kini.

Peran pihak swasta yang meningkat saat ini seharusnya tidak lagi dijawab dengan kompetisi oleh pemerintah pusat. Dalam meningkatkan efisiensi alokasi dana kesehatan, pemerintah sebaiknya merangkul pihak swasta dengan meningkatkan koordinasi dan pengawasan. Hal ini dapat dilakukan dengan sertifikasi dan regulasi untuk menjamin kualitas kesehatan yang diberikan. Selain itu, pemerintah juga seyogyanya mengalihkan fokus perhatian dan penanganan dari daerah dimana peran swasta telah baik kepada peningkatan pelayanan kesehatan warga miskin dan pada daerah dimana peran sektor swasta belum begitu baik.

Realisasi anggaran dana kesehatan sebanyak 5% dari total APBN yang sedang diupayakan oleh Kementerian Kesehatan-pun harus dibekali dengan perencanaan program kerja yang komprehensif, yang salah satunya harus berfokus pada peningkatan kualitas, kuantitas dan keterjangkauan pelayanan kesehatan warga miskin.

Permasalahan SDM kesehatan juga merupakan tantangan yang harus segera dijawab oleh pemerintah. Koordinator Program Manajemen WHO Wilayah Asia Tenggara Dr M Mucaherul Hug pada keterangannya usai pembukaan Konferensi Aliansi Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan Se-Asia Pasifik di Sanur pada April 2010 menyatakan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara dari 57 negara di dunia yang masuk dalam kategori negara yang mengalami krisis tenaga kesehatan.

Menurut Mucaherul Hug, selain karena tidak meratanya distribusi, krisis tenaga kesehatan di Indonesia juga disebabkan oleh rendahnya kompetensi tenaga kesehatan Indonesia. Dalam hal ini, pemerintah harus memberikan perhatian lebih pada institusi pendidikan terkait, serta menyusun dan menegaskan regulasi sebagai upaya menjawab permasalahan distribusi tenaga kesehatan yang belum merata, terutama untuk daerah terpencil dan perbatasan.

Kesehatan adalah hal esensial yang dibutuhkan oleh manusia, dan menjadi hak warga atas pemerintah. Di mana pun warga tersebut berada serta bagaimanapun status sosial ekonominya, pelayanan kesehatan harus diwujudkan dengan baik untuk menjawab tantangan-tantangan yang datang pada bidang kesehatan. Sehingga diharapkan cita-cita untuk mencapai Indonesia yang lebih sehat dapat diwujudkan di tahun 2011

**) Peserta PPSDMS Angkatan V Regional 1 Jakarta Putri, mahasiswa Departemen Farmasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia 2008.*

Rapuhnya Ketahanan Pangan Negeriku⁴⁶

Oleh: Rinaldy Ardana Harahap *



..hidup matinya suatu Negara ditentukan oleh pertanian..

(Ir. Sukarno)

"Bahaya kelaparan?..Di pulau Jawa yang subur dan kaya itu, bahaya kelaparan? Ya, saudara pembaca. Beberapa tahun yang lalu ada distrik-distrik yang seluruh penduduknya mati kelaparan. Ibu-ibu menjual anak-anak untuk makan, ibu-ibu memakan anaknya sendiri "

(Multatuli, Max Havelaar, 1972 (asli 1860): 64)

Pernyataan Ir. Soekarno di atas bukanlah isapan jempol belaka. Keadaan bangsa-bangsa maju di dunia bisa menjadi bukti kebenaran perkataan sang proklamator. Ketahanan pangan bangsa-bangsa ini sungguh luar biasa, walau mereka bukanlah negara agraris. Tingkat kesehatan dan kesejahteraan rakyatnya sangat tinggi, dengan tersedianya bahan pangan yang berkualitas dan bergizi sebagai penyebab utamanya. Multatuli dalam Max Havelaar diatas menyadarkan kita akan masalah klasik yang menghantui negeri agraris ini, kelaparan.

Rakyat Indonesia sebanyak 230 juta akan menghadapi masalah pangan serius apabila tidak ada perubahan di bidang pertanian secepatnya. Ketidakmampuan mengkonsumsi sumber protein lain akibat kemiskinan menyebabkan beras menjadi sumber utama karbohidrat. Beras pun menjadi sumber pangan yang semakin populer. Misalnya Jawa, pulau dengan produksi padi tertinggi di Indonesia ini memiliki lahan tanam padi seluas 14.395 ha (BPS 2010). Data ini cukup mencemaskan, ditambah lagi dengan adanya program konversi lahan pertanian produktif. Kecepatan konversi lahan pertanian sendiri mencapai 110-110 ribu hektar per tahunnya. Akibatnya, Indonesia mengalami potensi kehilangan produksi padi 506.000 ton/tahun.

Penurunan tingkat produktivitas padi yang disebabkan oleh kelebihan pupuk ditambah berkurangnya investasi untuk sektor pertanian, seperti riset, penyuluhan, dan kredit pertanian merupakan masalah pelik lainnya. Masalah kompleks diatas sebenarnya berakar pada kebijakan pemerintah yang kurang tepat, serta tingkat pendidikan penduduk Indonesia (terutama petani) yang rendah. Kemampuan pemenuhan kebutuhan pangan dalam negeri yang semakin berkurang dan ketergantungan terhadap impor bahan pangan dari negara- negara lain merupakan buktinya.

⁴⁶ Tulisan dimuat SuaraMerdeka.com kolom Suara Remaja, 25 Desember 2010.

Data yang diperoleh dari Bataviase.co.id, pada tahun 1998, Indonesia justru menjadi negara pengimpor beras terbesar di dunia dengan jumlah 5.959.155 ton. Data terbaru menyatakan Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan produksi padi 2010 berdasarkan Angka Ramalan (ARAM) I meningkat 0,88 % atau sebesar 64,90 juta ton Gabah Kering Giling (GKG). Angka tersebut menurun dibandingkan dengan Angka Sementara (ASEM) produksi pada 2009 yang meningkat 6,64 %.

Peran pemerintah dalam mengatasi kerawanan pangan mutlak diperlukan. Ada beberapa langkah yang semestinya dilakukan. Pertama, dibutuhkan aksi nyata yang lebih banyak dari pemerintah untuk mengatasi kerawanan pangan. Kedua, pemerintah hendaknya mengembangkan kesadaran dan pemberdayaan petani untuk meningkatkan posisi tawar petani. Ketiga, peningkatan pengembangan kemandirian dan organisasi tani serta perlindungan hak asasi petani. Terakhir, pemerintah diharapkan meningkatkan investasi untuk sektor pertanian yang meningkatkan produksi pangan seperti riset, penyuluhan, serta kredit pertanian.

Keempat faktor ini bisa diwujudkan dengan berbagai cara, misalnya subsidi kepada petani yang tepat sasaran disertai kredit ringan, pengendalian harga bagi konsumen, bantuan pemanfaatan lahan untuk usaha tani keluarga, pengajaran soal ketahanan pangan ke sekolah-sekolah maupun ke petani itu sendiri, pengadaan riset dan penyuluhan, pengadaan kredit pertanian, serta perlindungan terhadap polusi lahan pertanian.

Negara agraris ini pasti sanggup untuk menjadi agraris kembali!

**) Peserta PPSDMS Angkatan V Regional 5 Bogor, mahasiswa Departemen Biokimia, Fakultas MIPA IPB 2009*

Mitos Industri Obat Murah ⁴⁷

Oleh: Giovanni F. Van Empel *)



roni yang selama ini terjadi adalah ketika isu kesehatan hanya menjadi menarik secara politis ketika adanya kasus malapraktik, biaya obat mahal, dan kuota rumah sakit yang terbatas. Dari hari ke hari, media cenderung memuat isu-isu politik, hukum, dan ekonomi. Hal ini seolah diafirmasi dengan belanja negara tahun 2011 pada sektor kesehatan yang hanya sebesar 0,5% dari total APBN. Hak untuk sehat yang termaktub dalam UUD 1945 belum menjadi prioritas para elite negeri. Perjanjian antara Indonesia dan WTO dalam sektor kesehatan memiliki implikasi dalam pasar obat.

Dengan analisis Depkes bahwa secara geografis pada 2020, Indonesia akan mencapai jumlah penduduk 250 juta jiwa, maka industri obat dalam negeri akan semakin bergantung pada pasokan obat dari negara maju. Asumsi ini berlaku terutama ketika industri obat dalam negeri tetap mengimpor bahan baku obat (BBO) yang mayoritas berasal dari China dan India.

Dari sisi keterjangkauan harga, akses, dan penggunaan rasional, obat memiliki dampak langsung terhadap derajat kesehatan. Maka tak heran, apabila pemerintah memprioritaskan kembali kebijakan obat esensial (generik). Namun, ada ancaman lain yakni kebergantungan industri obat dalam negeri dalam memasok BBO.

Data Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan menyebutkan bahwa impor BBO mencapai 96% dari kebutuhan industri dalam negeri. Maka dalam pasar terbuka yang bergantung pada pasokan luar negeri, ancaman fluktuasi harga dan embargo selalu mengintai. Artinya ada kemungkinan beban negara bertambah dalam konteks subsidi belanja obat.

Korelasi antara harga obat yang mahal dan impor BBO menimbulkan pertanyaan mengapa jika mampu memproduksi mandiri harus tetap bergantung pada pasokan luar? Di titik ini, urgensi

⁴⁷ Tulisan dimuat di Harian Seputar Indonesia kolom Suara Mahasiswa, 8 Juni 2011

kemandirian industri obat dalam negeri bersifat strategis karena menyangkut hajat orang banyak dan visi jangka panjang. Harmonisasi antara kebijakan dalam negeri dan luar negeri perlu dilakukan.

Logika sosial kemasyarakatan dalam pengadaan obat demi tercapainya standar kesehatan mesti akur dengan logika perdagangan antarnegara. Tumpang tindih kebijakan dan kepentingan hanya akan mengakibatkan obat semakin mahal dan tidak terjangkau.

**) Peserta PPSDMS Angkatan V Regional III Yogyakarta, mahasiswa Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran UGM 2008*

Meningkatkan Peran Farmasis Indonesia demi Mengisi Kemerdekaan⁴⁸

Oleh: Muhammad Irfan Hasan *)



Pada tanggal 17 Agustus 2010 kemarin, telah berumur 65 tahun usia negara Indonesia terhitung dari proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945. Kemerdekaan Indonesia yang sudah 65 tahun semestinya dibarengi dengan kemajuan bangsa tiap tahunnya di seluruh aspek. Sebagai calon farmasis yang akan menjadi salah satu stakeholders di bidang kesehatan. Tentunya kita juga memiliki harapan bersama agar pelayanan kesehatan di Indonesia semakin maju.

Jika kita melihat keadaannya sekarang, pelayanan kesehatan di Indonesia masih belum maksimal. Hal ini bisa terlihat dari banyaknya masyarakat yang berobat ke luar negeri karena merasa pelayanan di luar negeri lebih baik, namun di sisi yang lain, tenaga kesehatan tidak menyebar secara merata di Indonesia akibatnya masih banyak daerah-daerah yang kekurangan tenaga kesehatan padahal sangat membutuhkannya. Di sini kita akan melihat apa yang bisa kita lakukan sebagai calon farmasis karena farmasis ke depannya harus bisa memikul tanggung jawab besar karena peranannya yang amat luas termasuk dalam bidang kesehatan.

Pertama-tama peran farmasis di Indonesia harus dikenal terlebih dahulu. Mengenal peran farmasis akan membuat masyarakat mengerti apa yang bisa didapat dari profesi farmasis sehingga peran kita pun akan berfungsi secara maksimal. Sayangnya, saat ini peran farmasis masih kurang terekspos dan akibatnya masih banyak masyarakat yang tidak tahu peranan farmasis yang begitu krusial.

Penulis akan mengutip opini dari beberapa tokoh kefarmasian sebagai langkah-langkah kita untuk menggiatkan eksistensi bidang farmasi di dalam negeri. Perlu diketahui bahwa di negara-

⁴⁸ Tulisan dimuat di Buletin Farmamedia, diterbitkan oleh Himpunan Mahasiswa Departemen Farmasi FMIPA UI edisi November 2011.

negara maju seperti Amerika, Jepang, negara-negara di Eropa, dan lain-lain telah menyadari pentingnya kemajuan ilmu kefarmasian berimplikasi pada kemajuan kesehatan. Di negara-negara tersebut ahli farmasi sangat dihormati karena kemampuannya yang luas baik di industri dari sisi sains dan teknologi serta rumah sakit dari sisi kesehatan. Sebenarnya, peran farmasis di Indonesia juga amat luas dan krusial, namun masih banyak yang tidak mengetahuinya, akibatnya pembahasan untuk memajukan kesehatan di Indonesia masih selalu tidak menyeluruh kepada semua tenaga kesehatan. Hal ini bisa dilihat dari tidak adanya upaya untuk pemerataan penempatan farmasis di seluruh wilayah di Indonesia.

Ada beberapa langkah untuk bisa meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai farmasi. Dr. Retnosari Andrajati, ahli farmakologi Universitas Indonesia, berpendapat salah satu sebab farmasis masih kurang dikenal di Indonesia perannya, adalah karena masih sangat sedikit farmasis yang mau menulis (disampaikan pada OKK Farmasi UI 2009). Oleh karena itu, marilah kita semua belajar menulis karena kata-kata tertulis tersebut merupakan media yang efektif menyampaikan peran dan gagasan kita bagi masyarakat.

Beliau juga menyampaikan bahwa selepas dari kuliah, kita harus menjaga nama baik almamater serta profesi dengan tidak menyalahi kode etik yang ada, misalnya dengan melakukan kerja sama yang negatif bersama dokter untuk kepentingan materi semata. Setiap peran kita sebagai farmasis merupakan amal ibadah dan amal sudah seharusnya dilakukan dengan keikhlasan untuk kepentingan masyarakat bukan untuk kepentingan materi semata.

Ketua umum PP ISFI Prof. DR. Haryanto Dhanurirto, Apt.,DEA. juga pernah mengatakan bahwa farmasis di Indonesia harus mendalami sedalam-dalamnya ilmu khas farmasi seperti kimia medisinal, farmakokinetik, dan lainnya karena ilmu-ilmu itu yang merupakan 'kekuatan' dari farmasis dan tidak dipelajari oleh profesi lainnya. Lalu ilmu-ilmu yang sudah didalami tersebut diaplikasikan kepada masyarakat sehingga masyarakat merasakan secara langsung peran farmasis bagi negeri.

Peran *pharmaceutical care* sebagai upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan juga harus terus ditingkatkan. Sebagai farmasis kita harus lebih peka terhadap kejadian-kejadian seperti bencana di Indonesia. Dengan itu, farmasis dapat turun langsung ke daerah bencana dengan identitas profesinya sebagai farmasis secara serempak dan bersama-sama. Oleh karena itu, peran organisasi harus ditingkatkan pada sisi sosialnya sehingga masyarakat dapat merasakan secara langsung peran farmasis bagi mereka. Selama ini, peran-peran farmasis memang dilakukan tapi masih 'di balik layar' akibatnya banyak orang yang tidak memahami manfaat apa yang bisa diambil dari farmasis. Oleh karena itu kita harus melakukan pendekatan-pendekatan langsung ke masyarakat seperti *pharmaceutical care*, menulis, dan lain-lain. Berawal dari

mengenal fungsi farmasis, masyarakat akan mengharapkan peran farmasis lebih jauh, lalu farmasis akan mempunyai lahan amal yang lebih banyak untuk memajukan kesehatan di Indonesia.

Terakhir dan yang paling penting, kita sebagai mahasiswa wajib mengisi kemerdekaan dengan berbagai prestasi. Prestasi tersebut dapat diraih melalui tulisan, lisan, kegiatan, atau yang lainnya. Karena prestasi tersebut akan mengharumkan nama almamater dan mengharumkan nama profesi secara tidak langsung.

Hal-hal tadi hanya sebagian dari langkah-langkah untuk meningkatkan eksistensi farmasis sebagai upaya untuk meningkatkan ladang amal bagi seluruh farmasis di Indonesia. Bisa jadi, ada banyak cara-cara lain yang belum tertulis di sini dan dapat dilakukan oleh kita semua. Jadi, untuk mengisi kemerdekaan, apa lagi usaha kita berikutnya untuk mengabdikan pada masyarakat?

**) Peserta PPSDMS Angkatan V Regional 1 Jakarta Putra, mahasiswa Departemen Farmasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam UI 2008*



**SAINS,
TEKNOLOGI
DAN LINGKUNGAN**





Hutan adalah Otot Peradaban Bangsa⁵⁰

Oleh: Awalludin Ramdhan *)



Sebagaimana otot pada diri manusia, salah satu fungsi jaringan otot yang sangat penting adalah menggerakkan organ-organ tubuh. Jika otot tidak ada maka dapat dipastikan manusia tidak dapat melakukan aktivitas. Apalagi menghasilkan karya. Begitu pun dengan hutan yang ada pada suatu bangsa. Dialah yang menjadi otot peradaban. Tanpa adanya hutan suatu bangsa tidak akan mampu menggerakkan sektor-sektor yang ada di dalamnya. Sebagai contoh adalah hancurnya peradaban suku Maya di Amerika Tengah. Pada puncak kejayaannya sekitar tahun 900 Masehi, kota-kota Maya dipadati sekitar 2.000 orang per mil persegi. Sama dengan kota Los Angeles saat ini. Bahkan, di wilayah pedesaan penduduknya tetap menunjukkan jumlah yang besar. 200 - 400 orang per mil persegi.

Namun, tiba-tiba, semuanya menjadi sunyi. Dan, kesunyian ini adalah saksi salah satu kehancuran demografis dalam sejarah umat manusia. Runtuhnya peradaban suku Maya. Tom Server, seorang arkeolog veteran mengatakan, mereka menyebabkan kemusnahan mereka sendiri.

Suku Maya sering digambarkan sebagai masyarakat yang tinggal dalam keharmonisan dengan lingkungannya. Namun, seperti kebudayaan lain sebelum dan sesudah mereka menebang hutan dan menghancurkan lingkungannya untuk bertahan hidup di masa sukar. Kekeringan panjang membawa dampak bagi kehidupan penduduk suku Maya. Kenaikan temperatur dan berkurangnya curah hujan yang diakibatkan oleh penggundulan hutan menyebabkan masalah serius di kota-kota Maya. Suku Maya melakukan penggundulan hutan dengan menggunakan metode agrikultur tebang dan bakar. Sebuah metode yang masih digunakan oleh mereka hari ini.

Kekeringan bukan hanya membawa kesulitan untuk pertanian. Namun, suku Maya juga mengalami kesulitan menyimpan air untuk persediaan musim kemarau. Kota Maya mencoba

⁵⁰ Tulisan dimuat di Bksdakalteng.dephut.go.id, 4 Januari 2011.

untuk menyimpan persediaan air 18 bulan di waduk. Contohnya, di Tikal ada waduk yang menampung jutaan galon air. Tapi, tanpa curah hujan yang cukup, waduk itu menjadi kering. Kelaparan dan kehausan pun melanda.

Penggundulan hutan dan kemarau yang menyebabkan kelaparan mungkin telah membawa akibat lainnya seperti perang saudara dan wabah penyakit. Di beberapa kota Maya kuburan massal yang ditemukan berisi kelompok tengkorak dengan potongan batu jade di giginya -- yang memang biasanya hanya dipakai penduduk kelas atas suku Maya. Pemanfaatan hutan yang dilakukan suku Maya ini sama halnya dengan pandangan para konglomerat nasional dan internasional saat ini tentang hutan. Bagi mereka fungsi hutan adalah untuk menghasilkan kayu agar "perut" mereka terisi. Bila kayu niagawi habis, tidak ada lagi kayu layak tebang. Hutan itu pun dikategorikan rusak atau kritis. Benarkah demikian?

Selama ini pengertian pembangunan berkelanjutan di sektor kehutanan lebih condong melihatnya dari sudut pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan (*overall growth of the economic*). Pembangunan berkelanjutan diartikan sebagai *sustainable macro economic growth*. Hanya melihat keuntungan ekonomi (berapa rupiah) yang akan diperoleh apabila menanamkan investasi di sektor kehutanan. Kemudian keuntungan dari usaha tersebut menjadi modal untuk investasi di bidang nonkehutanan yang akan memberikan keuntungan lebih besar.

Keuntungan investasi di sektor kehutanan seharusnya dipergunakan untuk membangun atau merehabilitasi hutan supaya tetap terjaga. Kenyataannya hasil dari hutan hampir seluruhnya diinvestasikan kembali ke sektor yang tidak ada kaitannya dengan hutan. Suatu hal yang terjadi selama ini dalam pengelolaan hutan kita. Tak heran apabila kerusakan hutan semakin hari semakin bertambah. Banyak studi dan kajian-kajian ilmiah membuktikan bahwa sebagian besar pengelolaan hutan di Indonesia belum menerapkan prinsip-prinsip kelestarian (*sustainability*).

Penilaian peranan konservasi ekosistem hutan bagi kesejahteraan masyarakat merupakan pekerjaan yang sangat kompleks. Karena, melibatkan berbagai faktor yang saling terkait satu sama lain. Tidak hanya faktor teknis. Akan tetapi juga faktor sosial dan politik.

Menurut Munasinghe dan McNeely (1987), nilai kegiatan konservasi hutan sangat tergantung pada model pengelolannya. Dengan kata lain nilai konservasi hutan tidak hanya ditentukan oleh faktor abiotik, biotik, dan ekonomi. Akan tetapi juga oleh kelembagaan yang dibangun untuk mengelolanya. Secara sederhana nilai ekonomi total kegiatan konservasi hutan dapat dibagi dua yaitu nilai penggunaan (NP) dan nilai nonpenggunaan (NNP). Dengan demikian

Pearce dan Moran memfokuskan bahwa nilai ekonomi total (NET) suatu konservasi hutan adalah jumlah dari nilai penggunaan (NP) dan nilai nonpenggunaan (NP).

Nilai penggunaan terdiri dari nilai penggunaan langsung, nilai penggunaan tidak langsung, dan nilai pilihan (*option value*). Sedangkan nilai nonpenggunaan termasuklah di dalamnya nilai keberadaan (*existence value*), dan nilai warisan/kebanggaan (*bequest value*). Walaupun nilai ekonomi hutan total masih jauh lebih besar lagi. Alasannya adalah pertama, nilai tersebut masih belum mencakup seluruh nilai konservasi hutan kecuali nilai ekonominya saja.

Dan, kedua, banyak ahli ekologi menyatakan bahwa nilai ekonomi total tidak dapat dihitung dengan formula sederhana karena ada beberapa fungsi ekologis dasar yang bersifat sinergis sehingga nilainya jauh lebih besar dari nilai fungsi tunggal.

Dari sudut pandang rimbawan hutan mempunyai fungsi serba guna yaitu sebagai penghasil kayu, pengaturan tata air, tempat berlindung kehidupan liar, penghasil makanan, jasa lingkungan, penyerapan gas CO₂, tempat wisata, dan lain-lain. Namun demikian semua ahli mengakui sangatlah sulit menetapkan batas-batas fungsi tersebut satu sama lain secara tegas karena fungsi tersebut berinteraksi secara dinamis.

Setelah paham akan peranan penting hutan maka diharapkan seluruh stake holder kehutanan dapat mengubah cara pandang terhadap hutan yang hanya berorientasi kepada keuntungan ekonomi yang sempit. Prof Dr Hariadi Kartodihardjo pernah mengungkapkan: "Kerusakan hutan disebabkan oleh tindakan manusia dan tindakan manusia akibat cara pikir yang digunakannya. Untuk itu bisa jadi kerusakan hutan bukan masalah penting, karena hanya soal kerusakan fisik.

Sangat berbahaya apabila kerusakan cara pikir di balik tindakan-tindakan manusia itu, tidak dapat diperbaiki. Dan, memang terbukti sangat sulit memperbaikinya, daripada sekadar membangun tegakan hutan untuk mengganti hutan yang rusak".

Dengan mengubah cara pandang dan mengetahui runtuhnya peradaban suku Maya maka hutan yang menjadi warisan untuk menjadi penyangga kehidupan akan lestari dalam hal pemanfaatannya. Sehingga, bangsa Indonesia khususnya, dan bangsa dunia umumnya dapat menggerakkan berbagai sektor yang ada di dalamnya. Karena, hutan adalah otot peradaban bangsa.

**) Peserta PPSDMS Angkatan V Regional 5 Bogor, mahasiswa Departemen Silvikultur Fakultas Kehutanan IPB 2008.*

Peneliti Indonesia: Antara Idealisme dan Kebutuhan⁵¹

Oleh: Enung Azizah Mulyawati *)



Data Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional hingga saat ini menunjukkan bahwa sekitar 800 ilmuwan Indonesia saat ini bekerja di di luar negeri. Empat ratus di antaranya bekerja di lembaga riset dan penelitian yang cukup bergengsi, bahkan banyak juga yang menduduki posisi penting.

Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional, Dr Arif Satria dalam suatu kesempatan. Fenomena peneliti-peneliti Indonesia yang hijrah ke luar negeri bukan merupakan suatu hal yang tidak biasa lagi di negara ini. Peralnnya, menjadi peneliti di Indonesia tidak hanya menuntut penguasaan core competence akan tetapi juga menuntut kesabaran dan keikhlasan yang luar biasa.

Bagaimana tidak, ketika negara-negara lain begitu menghargai dan memerhatikan kebutuhan peneliti-penelitinya, Indonesia justru sangat memandirikan penelitiannya dengan membuat mereka harus berjuang keras dalam setiap pemenuhan kebutuhan kebutuhan risetnya. Bahkan seorang penemu teknologi baru di Indonesia mungkin hanya akan dianggap sebagai hal yang biasa-biasa saja.

Bagaimana Indonesia memerhatikan peneliti-penelitinya, dapat kita lihat dari data tahun 2009, bahwa seorang peneliti senior yang bergelar profesor riset golongan IV E hanya memperoleh penghasilan 4 jutaan rupiah sebulan. Nominal tersebut sudah termasuk tunjangan fungsional profesor riset sebesar Rp 1,4 juta per bulan.

Hal senada sempat diutarakan Dr Asvi Warman Adam, APU, peneliti LIPI yang telah mengabdikan selama 27 tahun. Jika melihat bagaimana pemerintah Indonesia memenuhi 'kebutuhan'

⁵¹ Tulisan dimuat di MediaIndonesia.com kolom Citizen Journalism, 8 Februari 2011.

pejabat-pejabat dan aparat negaranya, adalah suatu hal yang wajar jika para peneliti Indonesia cemburu.

Dahulu mungkin pernah terjadi kenaikan tunjangan fungsional peneliti yang cukup signifikan, yaitu di tahun 1983, pada saat BJ Habibie menjadi Menteri Negara Riset dan Teknologi. Saat itu, tunjangan fungsional ahli peneliti utama adalah sebesar Rp 900.000, dua kali lipat lebih besar daripada tunjangan pejabat tinggi eselon I.

Kesejahteraan tersebut hanya terjadi pada masa itu saja, 27 tahun setelahnya tunjangan tersebut hanya mengalami kenaikan sebesar Rp 500.000 menjadi Rp 1,4 juta per bulan. Sungguh miris jika dibandingkan dengan tunjangan para pejabat negara yang mengantongi uang tunjangan lebih dari Rp 100 juta per bulan.

Poros permasalahannya yang ingin disampaikan adalah bagaimana pemerintah Indonesia menghargai, mengapresiasi, dan memerhatikan peneliti-penelitinya. Jika kondisi seperti ini terus berlanjut, maka merupakan suatu kewajaran jika negeri ini terus menerus kehilangan orang-orang potensial perubah peradaban dalam bidang ilmu pengetahuannya.

Bisa jadi suatu saat pemerintah harus mengeluarkan ongkos yang begitu mahal untuk mendatangkan tenaga-tenaga pengajar dan peneliti luar negeri. Tentunya hal tersebut tidak diinginkan oleh kita semua.

Oleh karena itu, merupakan suatu langkah yang sangat bijak jika pemerintah mulai membenahi dan mengambil tindakan solutif terhadap permasalahan yang hampir lapuk ini. Mengingat beberapa kali 'janji-janji' peningkatan kesejahteraan para peneliti sempat dikeluarkan oleh pemerintah, dalam hal ini Presiden Republik Indonesia (salah satunya pada saat Sidang Paripurna DPR tanggal 15 Agustus 2008). Agar membawa keberkahan bagi bangsa ini, karena para pemimpinnya adalah orang-orang yang menepati janji.

**) Peserta PPSDMS Angkatan V Regional 1 Jakarta Putri, mahasiswa Departemen Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 2008.*

Tantangan Bidang Sains Indonesia⁵²

Oleh: Faldo Maldini *)



Presiden RI dalam pidato kenegaraannya Agustus 2009 pernah berkata bahwa untuk menjadikan Indonesia menjadi maju, bermartabat, dan sejahtera dalam beberapa dekade ke depan, diperlukan tiga pilar penting dalam kehidupan bernegara yakni kemandirian, daya saing tinggi, serta peradaban yang unggul yang mampu membangun dan memiliki peradaban unggul dan mulia.

Penguasaan ilmu dan teknologi mutlak diperlukan untuk kemajuan bangsa. Hal ini dapat tercapai apabila sumber daya manusia yang terlibat dalam penelitian mencukupi, atmosfer pengembangan dan penerapan teknologi sudah tercipta dengan baik. Serta tak lupa ada hubungan yang erat antara periset, pemerintah, dan swasta dalam memberikan solusi dari permasalahan aktual yang ada di masyarakat. Berbicara tentang sains tentu saja bukan merupakan sebuah drama satu babak yang dalam sekejap bisa dibangun. Sumber daya manusia (SDM) yang terlibat dalam penelitian bidang sains menjadi pilar utama dalam penguasaan ilmu dan teknologi.

Pembagian SDM yang menekuni sains bisa diklasifikasikan menjadi mahasiswa, dosen, dan praktisi dalam institusi kenegaraan seperti BPPT dan LIPI. Tapi, melihat realita saat ini, sangat disayangkan karena SDM yang mempunyai keinginan besar meniti karier di bidang sains tidak terlalu banyak. Peminat jurusan sains murni di setiap universitas cenderung semakin menurun.

Dosen dan staf pengajar yang menekuni penelitian juga mengalami penurunan semangat. Hal ini sangat berbeda dengan keadaan mereka saat kuliah ke luar negeri. Institusi negara yang bergerak dalam bidang penelitian bernasib kritis. Ini merupakan sebuah tantangan bagi pihak terkait, bagaimana negara dan institusi pendidikan bisa menarik minat mahasiswa dan memberi fasilitas kepada staf pengajar agar riset dalam bidang sains bisa berjalan lancar.

⁵² Tulisan dimuat di Harian Seputar Indonesia kolom Suara Mahasiswa, 4 Januari 2011.

Atmosfer pengembangan dan penerapan teknologi terkait karakter bangsa ini. Suasana sains bisa dibangun dengan kesadaran bahwa sains itu penting. Tetapi, realita yang ada sekarang, bangsa kita masih bermental lemah dan menganggap sains tidak terlalu penting. Bangsa kita tidak memiliki semangat berkarya yang besar. Untuk memenuhi kebutuhan negara sering melakukan impor barang dari asing yang sudah jadi. Kita tidak pernah mendengarkan rekayasa genetika yang bisa mengatasi serangan padi sebagai salah satu solusi bagi ketahanan pangan Indonesia.

Di bidang keteknikan dan industri pun kita sering memakai jasa asing dan keadaan ini diperparah dengan dikuasainya bangsa kita oleh bangsa asing tersebut. Membangun atmosfer pengembangan dan penerapan teknologi terkait masalah mental untuk menghasilkan inovasi sendiri. Apakah itu sudah ada pada stake holder yang mengambil kebijakan di negara ini? Apakah mahasiswa memiliki semangat untuk membangun jiwa saintisnya?

Hubungan yang erat antara periset, pemerintah, dan swasta dalam memberikan solusi dari permasalahan aktual yang ada di masyarakat juga merupakan tantangan sains Indonesia pada 2011. Hal ini memang sepertinya sulit untuk dicapai, tetapi hal yang sulit itu bukan mustahil digapai! Semua bisa saja diwujudkan asal ada keinginan besar untuk berubah. Akan tercipta keharmonisan dalam membangun sains jika masing-masing pihak tidak egois dan saling membantu.

Periset membutuhkan pemerintah, begitu pun swasta. Interaksi ketiganya bagaikan sebuah simbiosis mutualisme yang saling menguntungkan. Dan akan lebih baik jika masyarakat pun turut mendapat hasil dari keharmonisan itu. Munculnya gagasan energi terbarukan, solusi menghadapi permasalahan lingkungan dan perubahan iklim dan juga pengembangan teknologi dalam bidang kedokteran dan kesehatan masyarakat adalah beberapa bagian sains yang memiliki interaksi langsung pada masyarakat

**) Peserta PPSDMS Angkatan V Regional 1 Jakarta Putra, mahasiswa Departemen Fisika Fakultas MIPA UI 2008.*

Isu Iklim dan Politik Global⁵³

Oleh: Muh. Dimas Arifin*)



Entah siapa yang memulai, kajian-kajian mengenai iklim yang pada dekade-dekade sebelumnya yang benar-benar sepi dari pembahasan di tahun-tahun ke belakang menjadi topik yang sangat seksi untuk dibicarakan. Hampir semua kalangan membicarakannya. Mulai dari akademisi hingga pedagang koran.

Topik ini juga menjadi sangat hangat dibicarakan dengan antusias oleh para pejabat dari tingkat kepala desa hingga tingkat kepala-kepala negara di dunia. Ada cerita unik dari seorang dosen Meteorologi Fisik Institut Pertanian Bogor saat beliau menghadiri kampanye pemilihan camat di Jawa Timur. Saat itu 3 dari 5 calon membawa isu *global warming*. Analisis yang mereka lakukan, karena berbekal pengetahuan seadanya dan untuk tujuan politik, akhirnya berupa analisis-analisis yang agak melenceng. Salah satu dari mereka mengatakan BBM jangan dipakai lagi karena akan meningkatkan risiko angin puting-beliung. Calon kedua mengatakan agar rumah-rumah sebaiknya jangan menggunakan jendela dari kaca karena akan menyebabkan efek rumah kaca dan *global warming*. Sementara itu calon terakhir mengatakan agar petani mengganti tanamannya dengan tanaman jarak untuk jadi energi alternatif.

Isu perubahan iklim di Indonesia menjadi sangat ngetrend dengan marak diadakannya konferensi mengenai iklim dan global warming. Konferensi terbaru yang diadakan di Indonesia adalah konferensi pemuda untuk perubahan iklim akhir bulan Februari lalu. Yang patut disayangkan, konferensi-konferensi tersebut masih melihat bahwa perubahan iklim hanya disebabkan oleh hal-hal terkait emisi karbon dan gas rumah kaca.

Setiap konferensi memang selalu mengarahkan tanggung jawab atas emisi ini kepada negara-negara maju, sebagai contoh Amerika Serikat. Namun, konferensi-konferensi ini jarang memiliki kekuatan untuk memaksa Amerika Serikat dan negara maju untuk mengurangi gas karbon yang

⁵³ Tulisan dimuat di Okezone.com kolom Opini Kampus, 25 Maret 2011.

umumnya berasal dari industri dan kendaraan bermotor mereka yang jelas jauh lebih besar dari emisi yang dihasilkan oleh negara-negara berkembang. Alih-alih memaksa mereka, justru negara maju yang memaksa negara dunia ketiga untuk mengurangi emisi dan memelihara hutan dengan kompensasi yang mereka tentukan kemudian.

Yang sungguh mengherankan, para ilmuwan ikut mengamini tindakan barat memaksa negara dunia ketiga itu. Padahal jelas bahwa hal ini sarat dengan kepentingan politik. Ketika negara-negara berkembang dilarang menambah emisi serta memelihara lahan mereka yang tertutup hutan, maka disadari ataupun tidak mereka telah mengubah isu perubahan iklim menjadi isu energi dan sumber daya lahan. Barat telah menghambat atau mencegah perkembangan industri negara-negara berkembang dengan dalih pencegahan perubahan iklim ini. Penghambatan inilah yang akan membuat negara-negara tersebut, termasuk Indonesia, menderita ketergantungan akan barang-barang impor hasil produksi negara-negara maju. Jelaslah secara ekonomi dan politik, isu ini merugikan.

Di Indonesia sendiri, *carbon trade* yang mengkompensasi wilayah hutan Indonesia menyebabkan beberapa wilayah yang tercatat sebagai hutan (meski telah gundul) harus dipertahankan sebagai hutan serta tidak boleh dimanfaatkan untuk hal lain termasuk pertanian. Hal ini disampaikan oleh mantan menteri pertanian RI 2004-2009, Anton Apriyantono dalam sebuah kajian pertanian yang digelar di Fakultas Pertanian Bogor awal bulan yang lalu.

Secara ilmiah, *global warming* sebenarnya bukan sekadar hasil dari ulah manusia. Penelitian membuktikan bahwa suhu muka bumi naik sebesar 0,76 derajat Celcius selama seratus tahun terakhir menunjukkan bahwa pemanasan global adalah hal yang wajar dan secara alamiah merupakan siklus. Karena jika kita menyandarkan perubahan iklim global hanya pada emisi karbon dan teori gas rumah kaca, seharusnya terjadi kenaikan yang lebih signifikan dari sekadar 0,76 derajat celcius setelah revolusi industri. Pada 125 ribu tahun yang lalu, bumi kita 3 sampai 5 derajat lebih tinggi temperaturnya dari hari ini. *Global warming* dan *global cooling* adalah sebuah siklus alami yang tidak dengan tiba-tiba terjadi. Memang emisi gas rumah kaca turut berperan, namun sekali lagi hal ini bukanlah faktor tunggal dalam terjadinya perubahan iklim.

Harapannya dalam momentum hari meteorologi sedunia ini, kita semakin peduli dengan sisi-sisi ilmiah dari perubahan iklim. Ketika selama ini kita sebagai negara dunia ketiga diperalat oleh negara maju untuk melanggengkan kepentingan mereka, dengan memahami dan peduli dengan sisi ilmiah perubahan iklim ini kita akan lebih bijak dalam mengartikan setiap kebijakan barat. Sehingga untuk masa selanjutnya kita tidak dengan mudah dibodohi dengan iming-iming kompensasi padahal kebijakan energi serta lahan kita disetir oleh negara maju.

Selamat hari Meteorologi Se-dunia...

**) Peserta PPSDMS Angkatan V Regional 5 Bogor, mahasiswa Departemen Geofisika dan Meteorologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam IPB 2009*

Potensi Pemuda dalam Menekan Laju Kenaikan Suhu Bumi⁵⁴

Oleh: Rima Febrina*)



Wacana mengenai kenaikan suhu Bumi dewasa ini seakan menjadi pemberitaan yang semakin memanas. Padahal kenaikan suhu dan ketidakteraturan atau perubahan iklim merupakan merupakan siklus alami yang memang terjadi di alam. Apabila perubahan iklim terjadi secara alami, maka hal tersebut tidak akan menjadi suatu permasalahan yang kritis karena berlangsung dalam keseimbangan. Akan tetapi, permasalahannya jelas berbeda ketika *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC) melansir keterangan bahwa perubahan iklim yang terjadi saat ini diakibatkan oleh peningkatan suhu bumi secara global atau biasa disebut fenomena *Global Warming*.

Dari hari ke hari fenomena *global warming* menyebabkan bumi semakin tidak nyaman dihuni. Jika tidak ada upaya penanganan, maka dalam beberapa tahun suhu permukaan bumi akan terus meningkat drastis. Panasnya Jakarta tahun ini saja sudah banyak dikeluhkan, sulit dibayangkan bagaimana menderitanya anak dan cucu kita pada tahun-tahun mendatang. Pada tahun 2050 sebanyak 130 juta penduduk Asia diprediksi akan mengalami kekeringan. Departemen Kelautan dan Perikanan RI mencatat dampak buruk perubahan iklim mengakibatkan sekitar 2000 pulau Indonesia terancam tenggelam. Selanjutnya, perubahan iklim pun turut mengancam keseimbangan berbagai siklus kehidupan, seperti merusak siklus tanam dan panen, ketidakseimbangan ekosistem dan habitat, bahkan kepunahan spesies mahluk hidup di alam.

Sebenarnya telah banyak wacana 'hitam diatas putih' mengenai kesepakatan, rancangan tindakan maupun program dalam rangka menekan laju perubahan iklim. Sayangnya, sampai saat ini realisasi dan aplikasi nyatanya belum termaksimalikan.

⁵⁴ Tulisan dimuat di Medialndonesia.com kolom Citizen Journalism, 27 Januari 2011

Penanganan untuk permasalahan ini dapat dilakukan dengan cara mitigasi dan adaptasi sebagaimana telah diisukan dalam Protokol Kyoto. Berdasarkan Protokol Kyoto, mitigasi adalah pengurangan emisi karbon sampai batas titik aman. Hal ini sangat penting mengingat laporan terbaru dari IPCC menyebutkan bahwa emisi karbon yang terjadi sampai hari ini berkisar hingga 450 ppm padahal batas aman yang ditetapkan hanya sebesar 350 ppm. Jelas terlihat bagaimana efek pemanasan global kian membahayakan.

Pemuda adalah bagian dari masyarakat yang memiliki derajat pendidikan yang tinggi. Intelektualitas yang tercermin dari kompetensi, berbagai riset dan inovasi serta beragam pergerakan membuat mahasiswa menjadi sosok potensial dalam mengatasi permasalahan ini. Mengutip dari pernyataan Rossabeth Moss Kanter, seorang profesor dari Harvard Business School yang mengemukakan bahwa masa depan kelak didominasi oleh nilai-nilai dan pemikiran kaum muda.

Konsep mengenai mitigasi sebenarnya telah diketahui secara luas, bahkan oleh masyarakat awam sekalipun. Salah satunya melalui pencanangan gerakan 3R: *Recycle, Reduce, Reuse*. Kaum muda memiliki peran penting sebagai inisiator dan inspirator gerakan tersebut. Mahasiswa sebagai bagian dari kaum muda dapat mencontohkannya dalam skala kecil, antara lain; lebih memilih menggunakan transportasi umum dibandingkan kendaraan pribadi untuk pergi ke kampus, bike to campus, memanfaatkan kertas secara bolak-balik untuk keperluan catatan maupun fotokopi materi yang memang dibutuhkan, tidak malu untuk menggunakan barang hasil daur ulang, seperti tas dan notes serta masih banyak hal mudah lainnya yang dapat dilakukan.

Kemampuan konsep teoritis juga harus terus dikembangkan seiring dengan kompetensi dalam berbagai inovasi dan riset berbasis lingkungan. Beberapa potensi kaum muda sebenarnya telah banyak berkembang. Terbukti dengan ditemukannya kreasi produk ramah lingkungan, seperti; alat pengolah sampah, CO₂ traps, inovasi pemanfaatan energi alternatif dari biogas, panel surya dan lain sebagainya. Sangat disayangkannya, pemerintah masih belum tergerak untuk menyokong secara penuh. Sehingga kaum muda terkadang menemui kesulitan dalam pengembangan riset yang lebih luas. Meskipun demikian, pemuda tidak diharapkan berhenti berimajinasi dan melahirkan kreasi sebagai upaya untuk menyelamatkan bumi dari ancaman perubahan iklim.

Selain melakukan mitigasi secara pribadi mahasiswa juga dapat melakukan advokasi-advokasi kepada masyarakat. Teknik dan fungsi advokasi masih dipegang strategis oleh mahasiswa. Hal ini dikarenakan tendensi masyarakat Indonesia hingga saat ini masih lebih mempercayai propaganda-propaganda yang dilakukan oleh mahasiswa. Advokasi-advokasi yang dilakukan

mahasiswa meliputi kerjasama dalam pengembangan energi alternatif, kampanye dan sosialisasi gerakan ramah lingkungan. Mahasiswa sebagai agen perubahan sosial (*agent social of change*) dianggap sebagai pemegang kebijakan masa depan, maka permasalahan krusial seperti ancaman perubahan iklim yang terjadi sekarang ini menjadi tantangan tersendiri. Dengan semangat dan komitmen yang terjaga, bukanlah suatu kemustahilan tantangan tersebut terpecahkan.

Didukung dengan perkembangan zaman dan era komunikasi, mahasiswa pun sebenarnya telah sangat terfasilitasi dalam melakukan publikasi dan sosialisasi. Banyak media, baik cetak maupun elektronik yang dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya sebagai wadah yang bersifat persuasif terhadap berbagai program berbasis lingkungan. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari situs resmi Greenpeace Indonesia menyatakan bahwa hanya dengan langkah pengurangan emisi gas rumah kaca yang sistematis dan radikal dapat mencegah perubahan iklim yang dapat mengakibatkan kerusakan yang lebih parah kepada ekosistem dunia dan penduduk yang tinggal didalamnya.

Selanjutnya adalah tahap adaptasi. Mahasiswa memiliki peran penting mengingat kecenderungan pemilikannya terhadap suatu pergerakan yang cepat. Posisi mahasiswa terkenal strategis untuk mampu mendekati pihak pemerintah, perusahaan, maupun lapisan masyarakat biasa. Dalam konteksnya terhadap upaya adaptasi, mahasiswa diharapkan bersama pemerintah, industri dan berbagai sektor privat lain mampu menyiapkan strategi bagi masyarakat luas untuk beradaptasi menghadapi perubahan alam dan iklim. Beradaptasi dilakukan dengan berbagai cara, seperti; penghijauan, tata lansekap lingkungan dan aktivitas penghijauan.

Jika kaum muda, khususnya mahasiswa kehilangan tekad serta kepedulian terhadap alam, maka dimungkinkan suatu saat nanti manusia akan mengalami kepunahan akibat kondisi alam yang ekstrim. Perubahan iklim sedang bertransformasi menjadi bencana. Pemuda lah yang secara konkret mampu berupaya menahan laju datangnya bencana tersebut. *Save our Earth then we're gonna save our soul.*

**) Peserta PPSDMS Angkatan V Regional 1 Jakarta Putri, mahasiswa Departemen Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam UI 2009*

Peran Strategis Pemuda terhadap Perubahan Iklim ⁵⁵

Oleh: Nisa Yulianti Suprahman *)



Perubahan iklim di bumi bukan lagi hanya perbincangan yang dilakukan untuk sekedar menakut-nakuti manusia, karena kehadiran serta dampaknya sudah semakin dirasakan. Gejala bahwa bumi semakin panas dan cuaca tidak menentu sehingga sulit bagi para petani untuk bersahabat dengannya adalah sedikit bukti. Kejadian ini adalah sebuah dampak kecil dari perubahan iklim. Jika keadaan ini terus berlanjut, maka diperkirakan suhu bumi yang naik dapat menyebabkan melelehnya bongkahan dan gunung es di kutub dan meningkatnya permukaan laut. Suhu air laut berubah dan memengaruhi arus angin menjadi topan angin kencang. Hal ini memukul mundur pantai pesisir dan “memakan” serta menenggelamkan pulau.

Pemuda sebagai tumpuan bangsa memiliki potensi yang begitu besar untuk menangani permasalahan ini. Sedikitnya terdapat 3 hal yang dapat dilakukan oleh pemuda untuk berespon terhadap permasalahan global ini, yaitu karya nyata langsung, pengembangan riset dan pengontrolan kebijakan.

Poin pertama yaitu karya nyata langsung. Usaha ini dapat meliputi keterlibatan pemuda dalam program penghijauan dan sebagai motivator masyarakat dalam menyelamatkan tanah ini. Pemuda memiliki posisi yang sangat strategis dalam hal ini karena memiliki semangat dan idealisme yang tinggi serta dekat dengan masyarakat. Solusi ini merupakan solusi yang utama. Karena kunci pemecahan masalah ini adalah sebuah tindakan nyata yang dilakukan oleh setiap orang di bumi, bukan sederet wacana yang tidak direalisasikan.

Fenomena perubahan iklim disebabkan oleh fenomena gas rumah kaca yang membentuk semacam “selimut” yang membalut bumi sehingga sinar matahari yang masuk dan menghangatkan bumi dihalangi untuk kembali ke angkasa. Gas rumah kaca banyak dihasilkan

⁵⁵ Tulisan dimuat di Medialndonesia.com kolom Citizen Journalism, 24 Januari 2011

dari pembakaran *fossil fuel*, yaitu terdiri dari minyak bumi, batu bara, dan gas alam, untuk energi bagi transportasi, industri, dan rumah tangga.

Perubahan iklim hadir disertai fenomena kemiskinan dan peningkatan jumlah manusia sehingga menuntut maraknya perindustrian, peningkatan sarana transportasi dan tempat tinggal. Hal ini merupakan sebuah dilema yang menuntut inovasi dalam bidang sumber daya energi dan manajemen limbah. Di sinilah pemuda dapat mengambil perannya melalui ilmu yang ditimbanya. Sistem energi berbasis *fossil fuel* yang diandalkan sekarang harus diubah ke arah pengembangan energi terbarukan, seperti sel surya, hidrogen, angin, gelombang, panas bumi, mikro-hidro, biomassa, dan tenaga kinetika alami yang memungkinkan desentralisasi pembangkitan dan penggunaan energi dengan sistem pengadaan yang lebih cepat dan murah, serta bersih produknya.

Berbagai konferensi tingkat nasional dan dunia telah dilakukan dalam rangka melindungi bumi dari perubahan iklim. Namun kenyataannya, kebijakan yang diambil oleh beberapa negara masih menunjukkan bahwa keegoisan masih menghalangi niat baik mereka untuk memelihara bumi. Hal ini lagi-lagi diakibatkan oleh kebutuhan akan negara-negara tersebut terhadap perindustrian.

Kenyataan ini menunjukkan bahwa manusia baru sampai pada tahap pembangunan yang hanya berlandaskan pada kepentingan negaranya, tanpa memedulikan lagi dampak buruknya pada satu-satunya tempat yang dapat dipijak dan menjadi tempat kehidupannya berlangsung. Dalam hal ini, pemuda dapat menjalankan fungsinya melalui intervensi-intervensi sehat dan solutif yang dapat diberikan kepada pemerintah negaranya untuk dapat tetap meningkatkan kesejahteraan rakyat namun tidak mengesampingkan penanganan perubahan iklim.

Memelihara bumi bukanlah sebuah mimpi, namun suatu keharusan. Karena itulah, hal ini semestinya menjadi prioritas kita semua, terutama pemuda yang memiliki peranan penting dan amat strategis, serta menjadi tumpuan masa depan bangsa..

**) Peserta PPSDMS Angkatan V Regional 1 Jakarta Putri, mahasiswa Departemen Farmasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia 2008.*

Analisis Tren Kemasan Produk AMDK untuk Indonesia Hijau 2011⁵⁶

Oleh: Rima Febrina*)



Sebut saja perkembangan industri air minum dalam kemasan (AMDK). Pergeseran budaya membuat tingkat aktivitas manusia lebih banyak dihabiskan diluar ruangan. Hal ini memaksa masyarakat melakukan peningkatan pemenuhan kebutuhan cairan tubuh. Ditambah lagi oleh kenaikan suhu seperti sekarang ini yang merupakan dampak dari pemanasan global. Efeknya adalah industri AMDK memegang prospek yang semakin cerah ditahun mendatang.

Pada umumnya, AMDK menggunakan botol atau gelas plastik sebagai kemasannya. Plastik merupakan polimer sintetik yang dikenal tidak ramah lingkungan. Setidaknya plastik membutuhkan waktu ratusan hingga ribuan tahun untuk dapat terdekomposisi sempurna. Ketika terurai pun partikelnya akan mencemari tanah dan air. Jika solusi untuk menekan penumpukkan limbah kemasan plastik adalah dengan membakarnya, maka efek gas rumah kaca akan kian bertambah, selain ancaman kanker dan gangguan sistem saraf akibat gas beracun hasil pembakaran tidak sempurna dari polimer plastik.

Sampah botol dan gelas plastik juga menjadi salah satu faktor terjadinya lingkaran arus lambat di lautan Pasifik atau lebih dikenal sebagai fenomena oseanografi gyre. Lebih jauh lagi seorang ahli oseanografi Amerika, menyebut lautan Pasifik sebagai "*Great Pacific Garbage Patch*" karena sekitar 100 juta ton sampah plastik terapung mengikuti aliran gyre. Botol dan gelas plastik bekas sering terlihat menyumbat saluran air dan mengakibatkan banjir. Masih banyak permasalahan lingkungan lain yang disebabkan limbah dari kemasan produk AMDK, seperti gangguan keseimbangan ekosistem perairan dan biota laut. Persoalan sampah kemasan AMDK kemudian mulai menjadi bahaya laten.

⁵⁶ Tulisan dimuat di MedialIndonesia.com kolom Citizen Journalism 6 Januari 2011.

Di satu sisi, sebenarnya para penggerak industri AMDK pun telah menemukan banyak kendala ditahun 2010 akibat penggunaan plastik sebagai bahan baku kemasan. Penggunaan plastik tidak efisien untuk biaya produksi. Bagaimana tidak, jika ternyata harga bijih plastik sebagai bahan baku mengikuti pergerakan harga minyak dunia yang kian meroket. Analisa perekonomian melansir data rata-rata harga minyak dunia sepanjang tahun 2010 mencapai US\$ 85 per barel dan probabilitas *ICP (Indonesia Crude Price)* akan mencapai US\$ 90 per barel ditahun 2011. Tentu kondisi seperti ini akan meningkatkan besaran biaya produksi sementara masyarakat Indonesia sendiri masih menganut kecenderungan konsumsi produk dengan harga yang murah dan menuntut kualitas memuaskan. Imbasnya adalah produsen AMDK akan menikmati gradien negatif dari hasil usahanya.

Apabila solusi yang ditawarkan untuk mengantisipasi kondisi ini melalui mekanisme daur ulang limbah botol dan gelas plastik jelaslah tidak aplikatif. Realita yang ada adalah kondisi penggerak industri daur ulang kian kembang kempis akibat kenaikan harga bahan bakar minyak dan tarif dasar listrik. Ketidakeimbangan yang terjadi antara biaya produksi dengan keuntungan perusahaan membuat banyak industri daur ulang plastik gulung tikar. Apalagi dengan adanya pemulihan krisis ekonomi global yang akan terus berjalan pada tahun 2011 belum ada kemungkinan Indonesia bebas - atau setidaknya- mampu meminimalisasikan tingkat inflasi.

Kembali ke wacana mengenai kerusakan lingkungan seiring dengan pertumbuhan industri AMDK, Indonesia sebenarnya masih berpeluang untuk tetap menghijaukan alam. Salah satunya dengan menggiatkan konversi kemasan karton untuk produk AMDK. Perbandingannya, limbah karton hanya memerlukan paling lama 5 bulan untuk terdekomposisi sempurna dan minim partikel berbahaya. Balai Besar Pulp dan Kertas mengemukakan bahwa BBPK pun telah melakukan modifikasi alat daur ulang kemasan kertas dan karton yang mampu menghasilkan pulp serat panjang berkapasitas 10 ton per bulan. Pulp serat panjang memiliki kualitas yang baik sebagai bahan baku. Pembaharuan dalam industri daur ulang seperti ini sangat potensial, sayangnya pemerintah tampaknya masih belum memberi perhatian yang lebih untuk mengembangkannya.

Mirisnya lagi, penelitian di Indonesia mengenai tandan buah kelapa sawit yang dapat diolah menjadi pulp serat pendek lagi-lagi luput dari dukungan pemerintah. Hingga akhirnya, negara tetangga, Malaysia lebih dulu mengaplikasikannya sebagai bahan baku kemasan produk AMDK yang lebih ramah lingkungan. Meskipun demikian, pengembangan terhadap inovasi-inovasi tersebut masih tetap memegang prospek yang cerah bagi Indonesia ditahun 2011.

Program penyokong lainnya adalah adanya sistem HTI (Hutan Tanaman Industri) yang berlaku di Indonesia. Sebagian besar pulp memang masih diperoleh dari kayu hutan. Tahun 2011 harus

menjadi titik tolak baru untuk memperketat pengawasan terhadap HTI. Ditambah lagi, Indonesia mencanangkan penggabungan diri dalam *FSC (Forest Stewardship Council)* suatu badan ecolabel yang akan mensertifikasi kemasan karton sebagai tanda bahwa bahan baku yang digunakan berasal dari hutan yang memang dikelola sebagai penyedia bahan baku industri.

Hingar bingar didunia perpolitikkan maupun perekonomian sepertinya telah mengalahkan sensitivitas masyarakat terhadap permasalahan mengenai kondisi alam yang kian kritis sekarang ini. Akselerasi perekonomian dan pertumbuhan industri di Indonesia tidak selaras lagi dengan daya dukung lingkungan. Sementara alam lah yang memegang peranan penting terhadap keberlangsungan hidup manusia. Dengan adanya peralihan kemasan karton untuk produk AMDK semoga dapat dijadikan suatu gerakan konkret untuk Indonesia lebih hijau ditahun 2011.

Selamat hari Meteorologi Se-dunia...

*) *Peserta PPSDMS Angkatan*

Profil Kontributor Pilihan

Dari seluruh peserta PPDMS Angkatan V yang mengirimkan tulisannya sebagai bahan dari penyusunan buku ini, kami telah memilih 3 (tiga) orang kontributor terbaik. Selain produktifitas tulisan yang tinggi, kualitas tulisan juga menjadi acuan penilaian. Peghargaan ini kami berikan sebagai bentuk apresiasi atas capaian yang cemerlang mereka. Semoga di masa yang akan datang kemahiran menulis mereka semakin terasah sehingga menghasilkan tulisan yang berkualitas dan memberikan manfaat bagi pembacanya.

Ketiga peserta tersebut adalah:

1. Giovanni Fadhillah vanEmpel (FK UGM 2008)
2. Haniva Az Zahra (Fpsikologi UI 2009)
3. Muhammad Irfan Hasan (Farmasi FMIPA UI 2008)

Profil lebih jauh masing-masing mereka dapat dilihat pada halaman berikutnya.

Giovanni F. Van Empel

Tempat tanggal lahir: Jakarta, 11 Januari 1990



↳ Pendidikan

- SD Islam Al- Azhar Kelapa Gading (1996-2002)
- SMP Islam Al-Azhar Kelapa Gading (2002-2005)
- SMA Islam Al-Azhar Kelapa Gading (2005-2008)
- Pendidikan Dokter FK UGM Yogyakarta (2008- ...)

↳ Organisasi

- Pegiat Lingkar Studi Bulak Sumur (koordinator jaringan dan humas) (2010-sekarang)
- Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia (tim Jaringan Alumni) (2011-sekarang)
- Presiden Mahasiswa BEM FK UGM (2010)
- Ketua OSIS SMA Al-Azhar Kelapa Gading (2006-2007)

↳ Capaian khusus

- Delegasi The International Student Festival in Trondheim (ISFIT), Norwegia, 10-20 Februari 2011
- Peserta Towards Unity for Health (TufH), Kathmandu-Nepal 13-17 November 2010

↳ Prestasi Menulis:

- "Menggugah Budaya Pendidikan Indonesia", dimuat di rubrik opini kampus okezone.com, 12 Agustus 2010.
- "Kereta Api sebagai Centrum Transportasi Mudik", dimuat di rubrik suara mahasiswa okezone.com, September 2010.
- "Menyejahterakan Kesehatan Indonesia", dimuat di Balairungpress.com tanggal 12 Oktober 2010.
- "Guru dan Semangat Mendidik" dimuat di website BEM KM UGM, Oktober 2010.
- "Menemukan keadilan dalam kesehatan". Buletin MEDISINA, April 2011.
- " Ideologi Usang" dimuat di rubrik Argumentasi! KOMPAS Kampus Nasional, Selasa 31 Mei 2011.
- "Revitalisasi Spirit Kolektivisme Bangsa" dimuat di Harian Seputar Indonesia, Sabtu 21 Mei 2011.
- "Kegelisahan Teuku Jacob" dimuat di buletin SIMPUL, Mei 2011.
- "Mitosis Industri Obat Murah" dimuat di Harian Seputar Indonesia, 8 Juni 2011.
- "Melestarikan Alam Mikrokosmos" dimuat di Harian Seputar Indonesia, 14 Juni 2011.
- "Ancaman Kelainan Mental Para TKI" dimuat di Harian Seputar Indonesia, 27 Juni 2011.
- "Humanisasi Guru dan Kebangkitan Indonesia" dimuat di rubrik kampus okezone.com, 29 Juni 2011.

Haniva Az Zahra

Tempat tanggal lahir: Yokohama, 1 July 1992



▾ Pendidikan

- SDN Batan Indah Tangerang (1999-2004)
- SMP IT Nurul Fikri Boarding School (2004-2007)
- SMUN 2 Tangerang (2007-2009)
- Fakultas Psikologi UI (2009 - ...)

▾ Organisasi

- Ka. Biro Kesekretariatan BEM UI (2011)
- Staff Divisi Dokumentasi dan Informasi Forum Lingkar Pena Depok (2010-sekarang)
- Staff Departemen Kesejahteraan Mahasiswa BEM Psikologi UI (2010)
- Sekretaris Divisi Kemuslimahan FUSI Psikologi UI (2010)

▾ Prestasi Menulis:

- "Pengesahan RUU Perawat Butuh Perawat" di muat di Suara Mahasiswa okezone.com, Jumat 13 Mei 2011.
- "Menyikapi Kelemahan Pemimpin Perempuan" dimuat di Suara Mahasiswa okezone.com, Kamis 21 April 2011.
- "Belajar Tentang Feminisme: Sebuah Awal" dimuat di Suara Mahasiswa okezone.com, Selasa 26 April 2011.
- "Politik Kampus: Belajar Demokrasi Serius Santai" dimuat di Suara Mahasiswa Seputar Indonesia, Rabu 20 April 2011.
- "Pornografi Awal Kebobrokan Bangsa" dimuat di Opini Mahasiswa di okezone.com, Kamis 10 Maret 2011.
- "Perempuan dan Kesetaraan Gender" dimuat di Opini Mahasiswa di okezone.com, 9 Maret 2011.
- "Tidak ada Alasan untuk Pemimpin", dimuat di Opini Mahasiswa di okezone.com, Selasa 1 Maret 2011.
- "Jangan Sampai Rakyat Jalan Kaki" dimuat di Opini Publik mediaindonesia.com, Rabu, 23 Februari 2011.
- "Indonesia Dalam Perspektif Psikologi Perkembangan Manusia; Indonesia Sudah Dewasa Akhir dimuat di Citizen Jurnalisme mediaindonesia.com, Selasa 25 Januari 2011.
- "Black berry dan Anak Muda Indonesia" dimuat di opini kampus okezone.com, Selasa 25 Januari 2011.
- "Ada Banyak, Pulau (seperti) Bali" dimuat di Suara Mahasiswa Seputar Indonesia, Senin 17 Jan 2011.
- "Bukan Perkara Mudah Perceraian" dimuat di Citizen Jurnalisme mediaindonesia.com, Kamis 13 Januari 2011.

- "Seandainya Primer Kebutuhan Pangan Bukan" dimuat di Opini Publik mediaindonesia.com, Senin 10 Januari 2011.
- "Satu Lagi Potensi Perempuan" dimuat di kampus.okezone.com, Rabu 22 Desember 2010.
- "Perempuan murah poligami" dimuat di kampus.okezone.com, Minggu 19 Desember 2010.
- "Murah 18 Desember Perempuan DENGAN Topeng Pahlawan" dimuat di okezone.com, Sabtu 18 Desember 2010.
- "Bahkan Ritual Banjir Menjadi" dimuat mediaindonesia.com, Kamis 16 Desember 2010.
- "Ibu itu Malaikat Dunia" dimuat di kampus.okezone.com, Kamis 16 Desember 2010.
- "Pendidikan Tinggi, Pelatihan Agent of Change Bangsa", Kompetisi Esai Mahasiswa, Tempo Institut, September 2010.
- "Saat Ibu Peradaban Angkat Bicara", Esai tentang Kepemimpinan Perempuan, Lomba Karya Tulis Pemuda Tingkat Nasional, FLP bekerja sama dengan Kemenpora, Oktober 2010.
- "Era Digital Membuat Perempuan Berani "Bicara", terpilih sebagai 20 tulisan terbaik yang dibukukan oleh Hasfa Publishing.
- "Pendidikan Karakter untuk Calon Pemimpin", lolos seleksi dalam International Youth Leadership Camp, Praha Juli 2011.
- "Pendidikan Keberbakatan untuk Anak Perempuan, Pentingkah?", lolos seleksi dalam Shanghai International Conference for Social Science, April 2011.

Muhammad Irfan Hasan

Tempat tanggal lahir: Jakarta, 28 November 1990



📌 Pendidikan

- SDN 01 Pondok Bambu Jakrta Timur (1996-2002)
- SMPN 51 Jakarta (2002-2005)
- SMAM 61 Jakarta (2005-2008)
- Departemen Farmasi FMIPA UI (2008-....)

📌 Organisasi

- Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) FMIPA UI, Ketua Komisi Tata Tertib Lembaga (201)
- Himpunan Mahasiswa Departemen (HMD) Farmasi Universitas Indonesia, Sekretaris Umum (2010)
- Himpunan Mahasiswa Departemen (HMD) Farmasi UI, Ketua Divisi Syiar Departemen Asy Syifa (Lembaga Dakwah Departmen) Farmasi (2009)

📌 Capaian khusus

- Mahasiswa Berprestasi (Mapres) Utama (Juara I) FMIPA UI 2011
- Juara 1 Lomba Debat Bahasa Inggris Olimpiade Ilmiah Mahasiswa (OIM) FMIPA UI 2010

📌 Prestasi Menulis:

- "Banjir dan Macet Jakarta Butuh Langkah Aktif, Berani, dan Berbeda" dimuat di Suara Pembaca Detik.com, 4 Nopember 2011.
- "Antara Kos dan Asrama", dimuat di kolom Kompas Kampus, Koran Kompas, 13 Juli 2010.
- "Capaian Meningkatkan Peran Farmasis Indonesia dalam Rangka Mengisi Kemerdekaan", dimuat di kolom Karya Mahasiswa Buletin Farmamedia, November 2010.
- "Perlunya Adanya Revolusi Sanitasi Indonesia", dimuat di kolom Opini okezone.com, 31 Desember 2010.
- "Visualisasi Mimpi, Menggapai Prestasi", dimuat di kolom Suara Mahasiswa okezone.com, 6 Januari 2011.
- "Menggapai Prestasi Meraih Mimpi", dimuat di kolom Opini Harian Media Indonesia, 10 Januari 2011.
- "Membangun Kompetisi Lewat Kewirausahaan" dimuat di Citizen Journalism Media Indonesia Online, 28 Agustus 2010.
- "Program 60 Mahasiswa UI, PPSDMS: Mobile Library dan Rumah Belajar Gratis dengan Metode Collaborative Learning", dimuat di kolom Regional Kompasiana.com, 26 Oktober 2010.
- "Menempa Diri dalam Bulan Ramadhan sebagai Upaya Pemersatu Umat Islam Melalui Kepemimpinan), Juara I Lomba Esay Semarak Ramadhan Farmasi, Himpunan Mahasiswa Departemen Farmasi UI, September 2010.



Profil PPSDMS Nurul Fikri



– akan menjadi bangsa terpuruk, miskin dan jauh tertinggal dalam pergaulan dan kompetisi global, bila kepemimpinannya lemah.

Mengantisipasi kondisi demikian, Yayasan Bina Nurul Fikri mewujudkan program yang berkhidmat pada upaya pengembangan sumber daya manusia untuk menjadi pemimpin-pemimpin masa depan. PPSDMS melakukan aktivitas seleksi dan rekrutmen serta pembinaan terpadu yang ditujukan kepada mahasiswa berprestasi dalam organisasi dan memiliki kepedulian sosial. PPSDMS juga melakukan pengembangan ke berbagai daerah dan membangun jaringan alumni.

Alumni PPSDMS diharapkan menjadi pemimpin-pemimpin yang mampu mengimplementasikan Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam. PPSDMS bersifat non-profit yang berada di bawah naungan Yayasan Bina Nurul Fikri. Semua kegiatan PPSDMS disampaikan kepada publik secara terbuka dan bertanggung jawab dan seluruh hasil kegiatannya dipersembahkan untuk kepentingan bangsa dan negara.

Sebagai langkah awal, pada bulan Juni 2002 PPSDMS mulai menjalankan program ini dengan merekrut dan menyeleksi 20 orang mahasiswa terbaik dari berbagai fakultas di Universitas Indonesia. Generasi pertama PPSDMS ini dibina selama 2 tahun berturut-turut dan saat ini telah menjadi Alumni PPSDMS. Pada tahun-tahun berikutnya PPSDMS terus mengembangkan sayapnya.

Hingga tahun 2011 ini, PPSDMS telah berada di 5 kota (Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya dan Bogor). Total jumlah peserta PPSDMS angkatan V saat ini adalah 190 orang yang berasal dari 7 Perguruan Tinggi Negeri (UI, ITB, UNPAD, UGM, UNAIR, ITS dan IPB). Pada saat yang sama, PPSDMS telah memiliki alumni sebanyak 396 orang sejak angkatan I (2002-2004). Mereka tersebar di berbagai institusi publik, swasta, dan NGO, dan banyak pula di antaranya yang sedang melanjutkan studi S2 dan S3 di dalam dan luar negeri.

Visi

Melahirkan pemimpin-pemimpin masa depan yang memiliki pemahaman Islam yang komprehensif, integritas dan kredibilitas yang tinggi, berkepribadian matang, moderat, serta peduli terhadap kehidupan bangsa dan negara.

Misi

1. Melatih dan mengembangkan mahasiswa terbaik sebagai kader-kader pemimpin bangsa.
2. Melakukan pengembangan institusi PPSDMS di berbagai daerah di Indonesia.
3. Menaburkan dan menebarkan alumni PPSDMS ke tengah-tengah masyarakat sebagai pemimpin-pemimpin yang tangguh
4. Mempersiapkan alumni PPSDMS untuk berperan di instansi, lembaga ataupun institusi strategis demi kepentingan bangsa dan negara.

Peserta PPSDMS Angkatan V terdiri dari:

1. Regional I Jakarta Putra dengan 30 orang peserta mahasiswa UI
2. Regional I Jakarta Putri dengan 30 orang peserta mahasiswi UI
3. Regional II Bandung dengan 35 orang peserta mahasiswa ITB dan UNPAD
4. Regional III Yogyakarta dengan 30 orang peserta mahasiswa UGM
5. Regional IV Surabaya dengan 30 orang peserta mahasiswa ITS dan UNPAD
6. Regional V Bogor dengan 30 orang peserta mahasiswa IPB

Kantor Pusat PPSDMS Nurul Fikri:

Gedung PPSDMS Nurul Fikri Lt.2

Jl. Lenteng Agung Raya No.20, Srengseng Sawah, Jakarta Selatan, 12640

Telp: 021 7888 3828, Fax: 021 7888 3829

Webiste: www.ppsdms.org

Twitter: @ppsdms